



LAPORAN KINERJA

PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN

TAHUN 2022



BAGIAN ORGANISASI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
PERNYATAAN REVIU.....	iii
IKHITISAR EKSEKUTIF.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1. GAMBARAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN.....	1
1.1. Geografi.....	1
1.2. Demografi.....	3
2. KEWENANGAN DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	8
2.1. Kewenangan.....	8
2.2 Struktur Organisasi	8
3. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN KINERJA.....	11
4. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KINERJA.....	13
BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	15
1. RENCANA STRATEGIS.....	15
1.1. Visi Kabupaten Pelalawan.....	15
1.2. Misi Kabupaten Pelalawan	19
2. PERJANJIAN KINERJA	26
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA.....	29
1. CAPAIAN KINERJA.....	29
2. PENGUKURAN, EVALUASI & ANALISIS KINERJA UTAMA DAERAH.	30
3. AKUNTABILITAS KEUANGAN 2022.....	87
BAB 4 PENUTUP.....	113
LAMPIRAN	



KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh,

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2022 dapat terselesaikan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN menyebutkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Hal ini menyiratkan bahwa wujud akuntabilitas dari penyelenggara pemerintah adalah mempertanggung jawabkan hasil akhir dan manfaat dari suatu program dan kegiatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat bukan sekedar menyatakan bahwa program dan kegiatan telah terlaksana, namun yang terpenting adalah apakah program dan kegiatan pemerintah telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta dampak yang mampu membawa perubahan bagi kesejahteraan masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban inilah yang disebut dengan akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu penyelenggara pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan mapupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran perio dik yang diukur dengan seperangkat indikator kinerja non-keuangan (performance Indicator). Tujuan utama akuntabilitas kinerja adalah meningkatkan akuntabilitas publik instansi pemerintah dan meningkatkan efesiensi, efektifitas dan produktivitas kinerja organisasi pemerintah serta meminimalkan peluang tercipta korupsi,kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan tahun 2022 ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 tahun 2014. Laporan ini merupakan media pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan Kabupaten Pelalawan dalam mencapai sasaran –sasaran yang telah di tetapkan dalam RPJMD Kabupaten

Pelalawan Tahun 2021-2026 dan merupakan tahapan terakhir pembangunan Lima Tahunan dari pentahapan dalam dokumen RPJPD tahun 2005-2025, dengan visi jangka panjang adalah **Terwujudnya Kabupaten Pelalawan Yang Sejahtera, Mandiri, Inovatif, dan Berdaya Saing Global secara Berkelanjutan, dalam Masyarakat Inklusif yang Beradat, Beriman, Bertakwa dengan Mengembangkan Nilai Budaya Melayu Tahun 2025.**

Untuk itu saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap segenap tingkatan Aparatur Negara/Birokrasi yang telah melakukan berbagai langkah dan terobosan untuk kemajuan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Pelalawan.

Akhirnya saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim penyusun dan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pelalawan serta seluruh Perangkat Daerah yang telah turut membantu dalam penyusunan Laporan ini. Semoga laporan Kinerja ini bermanfaat bagi kita semua.

Pangkalan Kerinci, Maret 2023

BUPATI PELALAWAN



H. ZUKRI MISRAN



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN INSPEKTORAT DAERAH

KOMPLEK PERKANTORAN BHAKTI PRAJA PANGKALAN KERINCI
Telp/Fax. (0761) 494287 – Email : Inspektorat.pelalawanriau@gmail.com
KODE POS : 28300

PERNYATAAN REVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pelalawan untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Subtansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Pangkalan Kerinci, 30 Maret 2023

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN PELALAWAN

H. A. KARIM, SH, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641210 199402 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan menjanjikan berbagai pencapaian atas sasaran strategis yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Berbagai capaian diukur dengan indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Hasil capaian kinerja yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan memberikan gambaran bahwa peningkatan akuntabilitas kinerja secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam memantau capaian kinerja masing-masing Perangkat Daerah adalah dengan membangun **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Online (senja@pelalawankab.go.id)**. Sistem tersebut perlu dipelihara serta dikembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan monitoring SAKIP.

Secara umum capaian kinerja utama tahun 2022 dari 22 Sasaran Strategis Strategis dan 29 Indikator Kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut : Sebanyak 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja merupakan capaian kinerjanya "*Sangat Memuaskan*", 4 (empat) Indikator Kinerja merupakan capaian kinerjanya "*Memuaskan*", dan 1 (satu) Indikator Kinerja merupakan capaian kinerjanya "*Baik*" serta 1 (satu) Indikator Kinerja merupakan capaian kinerjanya "tidak ada", atau **79,31 persen capaian kinerjanya telah sesuai/melebihi target** dengan rincian sebagai berikut :

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	72.71	Sangat Memuaskan
2	Terwujudnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Kesenjangan Gender	Indeks Pendidikan	62.79	Sangat Memuaskan
		Indek Pembangunan Gender	60	Sangat Memuaskan
		Indek Pembangunan Literasi Masyarakat	89.15	Sangat Memuaskan
3	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Indeks Kesehatan	79.11	Sangat Memuaskan
4	Terwujudnya Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga yang Kompetitif dan Berdaya Saing	Kategori Kabupaten Layak Pemuda	Pratama	-
5	Meningkatnya Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat	Peningkatan Indeks Kerukunan Beragama	0.5	Sangat Memuaskan
6	Terwujudnya Masyarakat yang Agamis dan Berakhlak Mulia	Tingkat Pertumbuhan Rasio Keterisian Rumah Ibadah	2.5	Sangat Memuaskan
7	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Mandiri dan Berdaya Saing	Laju Pertumbuhan Ekonomi	2.83	Sangat Memuaskan
8	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah serta Pengembangan Desa Mandiri	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4.49	Baik
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	2	Sangat Memuaskan
9	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	LPE Kategori Industri Pengolahan	2.63	Sangat Memuaskan
10	Meningkatnya Kualitas Investasi Daerah	Persentase Peningkatan	6.5	Sangat Memuaskan

		Investasi Daerah		
11	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	8.23	Sangat Memuaskan
12	Meningkatnya Kesempatan Kerja bagi Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	5.33	Memuaskan
13	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Indeks Gini	0.005	Sangat Memuaskan
		Indeks Pengeluaran	76.62	Sangat Memuaskan
14	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Berkelanjutan	Peningkatan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	1.5	Sangat Memuaskan
15	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Infrastruktur Dasar Kepada Masyarakat	Peningkatan Inderks Konektivitas Wilayah	2.5	Sangat Memuaskan
		Rasio Pemukiman layak Huni	78.82	Sangat Memuaskan
16	Meningkatnya Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65.96	Sangat Memuaskan
17	Meningkatnya Pariwisata Daerah melalui Pemajuan Budaya Melayu	LPE Sektor Pariwisata	2	Sangat Memuaskan
18	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Wisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD (Pajak Restoran, Hiburan, Hotel, Retribusi Objek Wisata) (Rp.Juta)	9.344	Sangat Memuaskan
19	Meningkatnya Kualitas Masyarakat yang Berbudaya	Indeks Pertumbuhan Kebudayaan	0.580	Sangat Memuaskan
20	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	50.00	Sangat Memuaskan
21	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja		Sangat Memuaskan

		Indeks Inovasi Daerah (IID)	60	Memuaskan
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	65	Memuaskan
22	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	Memuaskan

BAB I PENDAHULUAN

1. GAMBARAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN

1.1 Geografi

Secara geografis luas Kabupaten Pelalawan adalah 13.924,94 Km² yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari daratan, dan sebagian lainnya kepulauan. Beberapa pulau besar yang ada di wilayah Kabupaten Pelalawan di antaranya Pulau Mendul (Penyalai), Pulau Muda, Pulau Serapung, Pulau Lebu, dan pulau-pulau kecil lainnya.

Dilihat dari posisinya, Kabupaten Pelalawan merupakan kawasan strategis yang dilewati jalur Lintas Timur Sumatera yang merupakan jalur ekonomi terpadat. Di samping itu, Kabupaten Pelalawan juga berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Kepulauan Riau tepatnya Kecamatan Kundur dan Kabupaten Karimun.

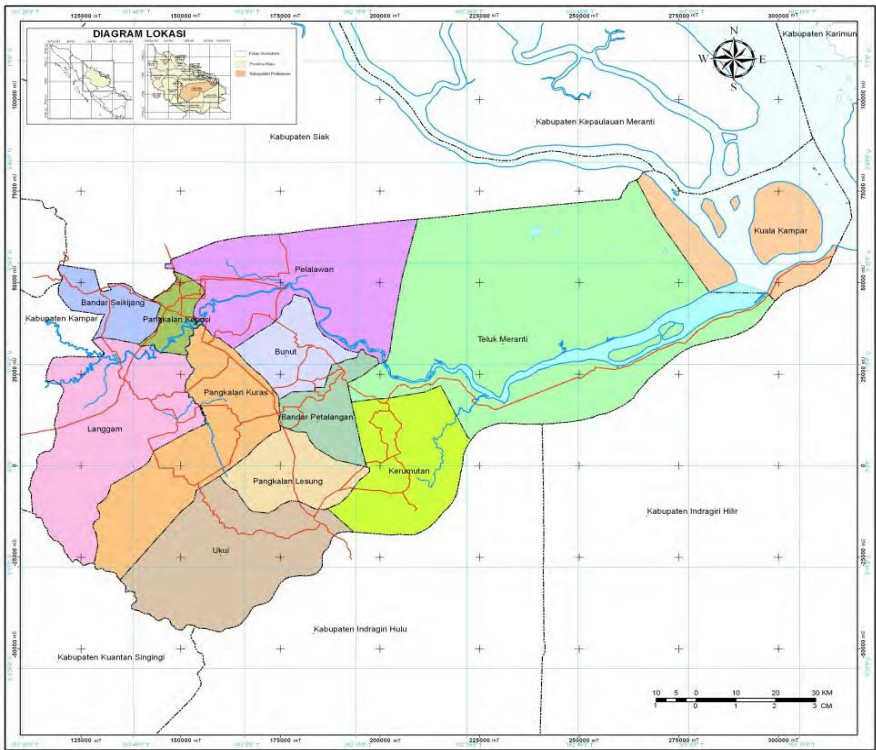
Kabupaten Pelalawan terletak di pesisir timur pulau Sumatera dengan wilayah daratan yang membentang di sepanjang bagian hilir sungai Kampar serta berdekatan dengan Selat Malaka, secara geografis Kabupaten Pelalawan terletak antara 1°25" LU dan 0°20" LS serta antara 100°42" ~ 103°28" BT dengan batas-batas wilayah :

- Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Meranti;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi & Kabupaten Indragiri Hilir;
- Sebelah Barat : Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar;
- Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau.

Sumber : Buku Statistik Sektor Daerah Kabupaten Pelalawan, Diskominfo Tahun 2022

Gambar.1

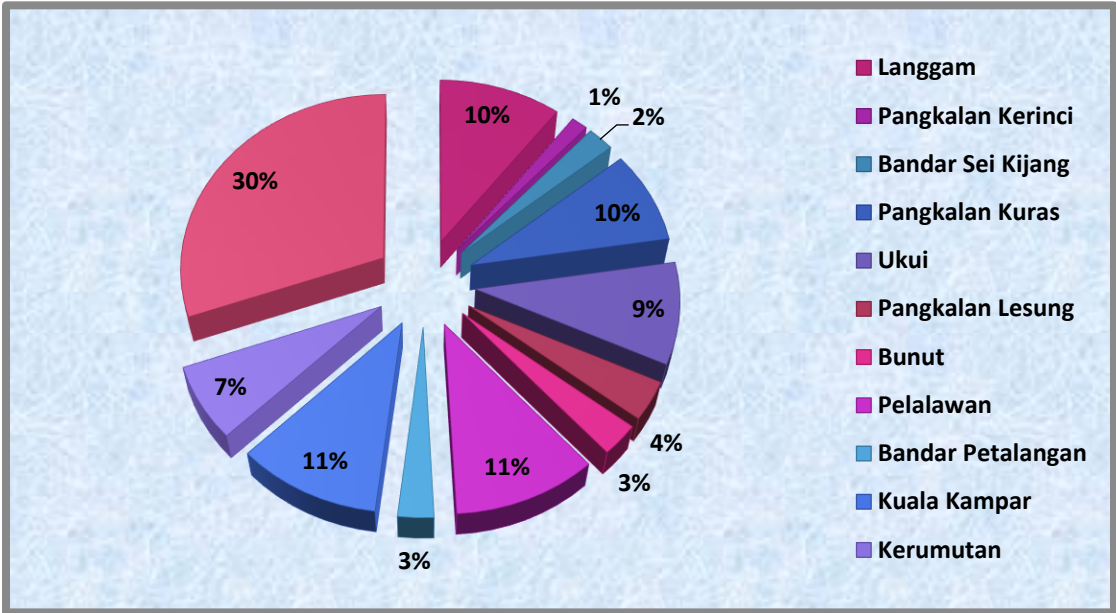
Peta Kabupaten Pelalawan



Sumber : Buku Statistik Sektorial Daerah Kabupaten Pelalawan, Diskominfo Tahun 2022

Kabupaten Pelalawan pada dasarnya terdiri dari daratan dan perairan. Adapun daratan merupakan perbukitan dan daratan. Sedangkan, perairan terdiri dari sungai dan laut. Kabupaten Pelalawan memiliki beberapa pulau yang relatif besar, di antaranya Pulau Mendul Serapung, Pulau Lebu, Pulau Muda dan beberapa pulau kecil seperti Pulau Ketam, Pulau Tugau dan Pulau Labu. Selain itu, wilayah administratif kecamatan di Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan dengan Kecamatan terluas adalah Kecamatan Teluk Meranti yaitu 423,984 Ha (30,45%) dan yang paling kecil adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan Luas 19,355 Ha atau 1,19% dari luas Kabupaten Pelalawan

Grafik. 2 Persentase Luas Wilayah Administrasi Per Kecamatan



Sumber : Buku Statistik Sektorl Daerah Kabupaten Pelalawan, Diskominfo Tahun 2022

1.2 Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan hasil proyeksi yang dilakukan BPS Pelalawan tahun 2022 adalah 483.662.00 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 247,994 jiwa dan perempuan 235,628 jiwa. Penduduk terbanyak berdomisi di Pangkalan Kerinci yaitu 144,915 jiwa dan terendah di Bandar Petalangan 14.646 jiwa.

Tabel.1
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Per Km²menurut Kecamatan Tahun 2022

Kecamatan / Sub-Regency		Luas (Km²) / Area	Jumlahn Penduduk/Population	KepadatanPenduduk / Population Density
(1)	(2)	(3)	(4)	
Langgam		1,476,29	37,315.00	23,66
PangkalanKerinci		217,26	103.968.00	667,01
Bandar SeiKijang		325,03	23.035.00	139,96
PangkalanKuras		1,224,55	67.101.00	53,38
Ukui		1,337,47	43.184.00	31,48
PangkalanLesung		438,08	331.464.00	78,55
Bunut		444,65	16.829.00	38,36
Pelalawan		1.469,38	20.464.00	14,56
Bandar Petalangan		361,85	17.842.00	40,48
Kuala Kampar		683,39	18.086.00	26,74
Kerumutan		976,31	26.348.00	26,97
TelukMeranti		4,113,03	17.271.00	4,55
Jumlah	2021	13,067,29	399.264.00	37,01
Total	2022	13,924,94	422.907.00	33

Sumber : BPS Kabupaten Pelalawan Dalam Angka 2022

Tabel.2
Jumlah Kelurahan dan Desa Kabupaten Pelalawan
Tahun 2022

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Daerah Km2	Status Pemerintahan		Jumlah	Jumlah Rukun Warga (RW)
			Kelurahan	Desa		
Langgam	Langgam	1,476,29	1	7	8	46
PangkalanKerinci	Pangkalan Kerinci	217,26	3	4	7	59
Bandar SeiKijang	Sei Kijang	325,03	1	4	5	29
PangkalanKuras	Sorek Satu	1,224,55	1	16	17	79
Ukui	Ukui Satu	1,337,47	1	11	12	67
PangkalanLesung	Pkl.Lesung	438,08	1	9	10	61
Bunut	PangkalanBunut	444,65	1	9	10	51
Pelalawan	Pelalawan	1.469,38	1	8	9	51
Bandar Petalangan	LubukKerANJI	361,85	1	10	11	54
Kuala Kampar	Teluk Dalam	683,39	1	9	10	63
Kerumutan	Kerumutan	976,31	1	9	10	64
TelukMeranti	Teluk Meranti	4,113,03	1	8	9	57
Jumlah		13,067,29	14	104	118	645

Sumber : BPS Kabupaten Pelalawan Dalam Angka 2022

Tabel.3
Jumlah Penduduk Kabupaten Pelalawan Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2022

Kecamatan / Sub-Regency	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Langgam	18,000	16,927	34,927
PangkalanKerinci	73,883	71,032	144,915
Bandar SeiKijang	23,510	21,980	45,490
PangkalanKuras	33,457	31,913	65,370
Ukui	22,054	20,056	42,110
PangkalanLesung	17,781	16,631	34,412
Bunut	8,589	8,469	17,058
Pelalawan	11,171	10,220	21,391
Bandar Petalangan	7,330	7,316	14,646
Kuala Kampar	9,310	8,961	18,271
Kerumutan	13,433	12,889	26,332
TelukMeranti	9,476	9,224	18,700
JUMLAH	247,994	235,628	483,622

Sumber: BPS Kabupaten Pelalawan Dalam Angka 2022

BUPATI PELALAWAN & WAKIL BUPATI

Bupati Pelalawan dan Wakil Bupati Pelalawan terpilih tahun 2020 Bapak **H.ZUKRI dan H.NAZARUDDIN SH, MH** yang dilantik pada tanggal 26 April 2021 oleh Gubernur Riau di Balai Pelangi Kediaman Gubernur Riau, berdasarkan Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor : 131.14-1042 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas Keputusan Kementerian dalam Negeri Nomor 131.14-281 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 di Kabupaten/ Kota di Riau. Memiliki visi dan misi yakni Visi Kabupaten Pelalawan tahun 2021-2024 yang merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dalam kurun waktu 2020-2024. Pencapaian cita-cita ini diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasarannya yang akan selalu diwarnai berbagai peluang dan tantangan masa depan yang perlu diantisipasi.

Misi Pembangunan Kabupaten Pelalawan tahun 2021-2024 memperlihatkan tindakan yang akan dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai visi Kabupaten Pelalawan Tahun 2021-2024. Selanjutnya Bupati dan Wakil Bupati mempunyai visi dan misi diterjemahkan kedalam tujuan dan sasaran.

Bupati dan Wakil Bupati semasa kampanye Pilkada, mempunyai Visi, Misi dan masalah pembangunan serta isu-isu strategi Kabupaten Pelalawan yang tantangan lima tahun ke depan, dengan memperhitungkan sumber daya sebagai modal dasar yang dimiliki baik dalam ilmu pengetahuan maupun iman.

Pembangunan merupakan basis utama ekonomi kerakyatan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang harus didukung oleh peran serta masyarakat dalam menciptakan kesempatan kerja. Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pelalawan harus menggesa percepatan pembangunan di segala bidang yang tertuang dalam 7 (tujuh) program unggulan di 12 (dua belas) kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan.

H. ZUKRI mengatakan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tersebut, makanya dia meminta dengan tegas kepada seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan dengan serius untuk menjalankan

seluruh program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Pemerintah Kabupaten terus berkomitmen untuk membangun prasarana dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi produktif masyarakat. Seperti pembangunan jalan dan jembatan, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, pendidikan dasar dan menengah serta prasarana sosial lainnya. Dan untuk mengejar kemajuan pembangunan tersebut, maka ditegaskan agar setiap Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan dapat serius menjalani program/kegiatan yang sudah direncanakan dengan baik.

Penanggulangan kemiskinan, anak yatim serta janda-janda tua juga menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang dilakukan dengan cara menertibkan kebijakan dan pelaksanaan program-program pada pelayanan umum, namun demikian untuk mencapainya diperlukan suatu komitmen bersama dari seluruh stakeholder dengan budaya dan etos kerja masyarakat yang menjadikan seluruh unsur masyarakat menjadi aktif dan proaktif. Disamping itu Bupati Pelalawan bersama wakilnya, meminta agar hubungan kerjasama kemitraan dengan sesama stakeholder untuk pembangunan setempat dalam rangka membangun iklim dan budaya politik yang demokratis dan perlu ditingkatkan. Hal ini agar terjadi sinergi kebijakan dan sinkronisasi serta koordinasi antara Pemerintah Kabupaten, Propinsi maupun Pusat.

Kegiatan-kegiatan lain yang menjadi prioritas adalah peningkatan pendapatan daerah dengan cara menertibkan langkah-langkah kebijakan yang bersahabat dengan pasar, sehingga tidak menimbulkan eksese ekonomi biaya tinggi. Dengan mempertimbangkan segala aspek bidang pembangunan, kondisi daerah, potensi, permasalahan, tantangan dan peluang Kabupaten Pelalawan, serta visi dalam RPJPD yaitu "***Terwujudnya Kabupaten Pelalawan Yang Sejahtera, Mandiri, Inovatif, dan Berdaya Saing Global secara Berkelanjutan, dalam Masyarakat Inklusif yang Beradab, Beriman, Bertakwa dengan Mengembangkan Nilai Budaya Melayu Tahun 2025***", maka dengan terpilihnya **H. ZUKRI sebagai Bupati dan H. NASARUDIN, S.H.,M.H., sebagai Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan**, Visi pembangunan Kabupaten Pelalawan yang hendak dicapai dalam RPJMD Periode 2021-2026 adalah : **PELALAWAN MAJU 2026**

Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah membuahkan hasil yang sangat menggembirakan, mendapatkan penghargaan antara lain :

1. Opini WTP Tahun 2022 yg kesembilan kalinya, dari BPK RI
2. Penghargaan dari Presiden Republik Indonesia, Anugerah INAGARA AWARD
3. Penghargaan dari Presiden Republik Indonesia, Piala Adipura Kategori KOTA KECIL, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
4. Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kabupaten Pelalawan Kategori " Terdefinisi" atau " Level 3 "
5. Program Penghargaan Pariwisata Indonesia Terbaik Tahun 2020
 - " Juara 2 Batik Bono " Cendera Mata Terpopuler
 - " Juara 1 Promosi Pariwisata Digital Terpopuler
 - " Juara 1 Tempat Berselancar Terpopuler
 - " Juara 3 Minuman Tradisional Terpopuler
6. Penghargaan dari Gubernur Riau Peringkat Pertama Realisasi Investasi Terbesar di Propinsi Riau Tahun 2019 sampai 2022
7. Penghargaan Nasional Procurement Award, Kategori Komitmen Penerapan Standar LPSE
8. Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Kategori PRATAMA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
9. Penghargaan Nasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Tokoh Penggerak Literasi Nasional, khusus Peningkatan Kompetensi Guru.
10. Penghargaan Nasional dari Kementerian Kesehatan dinyatakan Bebas dari Eliminasi Penyakit Kaki Gajah (FILARIASIS)
11. Penghargaan BKN Award 2022 Peringkat Pertama Kategori atas Capaian dalam Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja

2. KEWENANGAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

2.1 Kewenangan

Kabupaten Pelalawan sebagai daerah otonomi, memiliki kewenangan mencakup seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, yuridis, moneter dan fiskal nasional, agama serta kewenangan bidang lain seperti kebijakan perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional.

Adapun beberapa kewenangan sesuai dengan amanat Undang-undang No 23 Tahun 2014 yaitu kewenangan pemerintah kabupaten meliputi : perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, pengawasan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum, penanganan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan dan alokasi SDM potensial, penanggulangan masalah sosial, pelayanan ketenagakerjaan, fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan usaha menengah, pengendalian lingkungan hidup, pelayanan pertanahan, pelayanan kependudukan dan catatan sipil, pelayanan administrasi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan dasar sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah.

2.2 Struktur Organisasi

Penataan kelembagaan yang sesuai dengan konsep otonomi daerah mempunyai arti penting yang sangat strategis untuk meningkatkan kinerja aparatur perangkat daerah yang terdapat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan terdiri dari Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Asisten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan yang terdiri dari :

SEKRETARIAT DAERAH

1. Bagian Pemerintahan dan Kerjasama
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat

3. Bagian Hukum
4. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
5. Bagian Administrasi Pembangunan
6. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
7. Bagian Umum
8. Bagian Organisasi
9. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
10. Bagian Perencanaan dan Keuangan

STAF AHLI

1. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Kemasyarakatan & Sumber Daya manusia
2. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik
3. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Pembangunan

ASISTEN

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
3. Asisten Administrasi Umum

SEKRETARIAT DPRD

1. Bagian Umum
2. Bagian Keuangan
3. Bagian Persidangan dan Produk Hukum

PERANGKAT DAERAH

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3. Dinas Kesehatan
4. Dinas Sosial
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6. Dinas Tenaga Kerja
7. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

10. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
11. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
12. Dinas Penanaman Modal dan PTSP
13. Dinas Perkebunan dan Peternakan
14. Dinas Lingkungan Hidup
15. Dinas Perikanan
16. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17. Dinas Perhubungan
18. Dinas Komunikasi dan Informatika
19. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
20. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
21. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
22. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
23. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
24. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
25. Inspektorat Daerah
26. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadaman Kebakaran

KECAMATAN

1. Kecamatan Pangkalan Kerinci
2. Kecamatan Pangkalan Kuras
3. Kecamatan Bunut
4. Kecamatan Bandar Petalangan
5. Kecamatan Pangkalan Lesung
6. Kecamatan Ukui
7. Kecamatan Kerumutan
8. Kecamatan Teluk Meranti
9. Kecamatan Kuala Kampar
10. Kecamatan Bandar Sei.Kijang
11. Kecamatan Langgam
12. Kecamatan Pelalawan

3 MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN KINERJA

Penyelenggaraan otonomi daerah telah membawa tuntutan dan perubahan terhadap sistem nilai dan budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut nilai dasar yang senantiasa dapat mengakomodasikan kebutuhan yang berorientasi kepada aspirasi masyarakat dengan prinsip-prinsip demokratisasi, peran serta, pemerataan dan berkeadilan. Kondisi tersebut menuntut adanya kerangka pikir yang terstruktur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Untuk itu diperlukan peningkatan budaya dan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil serta pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju *good governance* yakni pemerintahan Kabupaten Pelalawan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kinerja merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi. Pengukuran kinerja ini dapat dilakukan oleh instansi sendiri atau bekerja-sama dengan pejabat dan pelaksana pemeriksaan. Pengukuran kinerja ini sangat penting bagi organisasi yang berorientasikan hasil untuk mengukur kinerjanya sendiri dan melihat tingkat kinerja yang telah dicapai atau hasil-hasil yang diperoleh. Pengukuran kinerja ini, dapat dilakukan dengan baik jika ada satuan pengukuran kinerja yang sah. Cara-cara pengukuran yang tepat akan sangat tergantung pada sistem informasi yang ada untuk pengumpulan data yang tepat dan akurat.

Penerapan AKIP akan membawa konsekuensi terhadap perlunya perubahan-perubahan di beberapa segmen atau sub sistem dari administrasi Negara. Sebagai contoh, dalam proses penganggaran sebagaimana disebutkan di atas *incremental budgeting system* seharusnya sudah di tinggalkan. Sedangkan *budget line system* harus dipandang sebagai klasifikasi mata anggaran saja. Naik turunnya penyediaan anggaran dapat dipandang akan berpengaruh pada naik turunnya hasil yang diinginkan.

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Pelalawan tahun 2021 merupakan bagian tak terpisahkan dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) di lingkungan pemerintah Kabupaten Pelalawan. Sistem AKIP ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maksud dari Penyusunan laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan 2022 yang memiliki tujuan:

1. Bahan Evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pemerintah pusat maupun masyarakat;
2. Memberikan informasi guna penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
3. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
4. Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good dovernment*) dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.

Esensi dari Sistem AKIP bagi Pemerintah Kabupaten Pelalawan adalah Perwujudan dari implementasi system pengendalian menejemen sektor publik di Kabupaten Pelalawan sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen Pemerintahan untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis pemerintah dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem AKIP diawali dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Secara selaras setia tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan dan sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja pemerintah

yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholders dalam wujud Laporan Kinerja (LKj) memiliki dua fungsi utama sekaligus yaitu:

1. Laporan kinerja merupakan sarana bagi pemerintah untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders,
2. Laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja pemerintah sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang.

Dalam Laporan Kinerja (LKj) ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun 2022 .Strategis disini dimaksudkan kegiatan yang mempunyai bobot strategis dalam kaitannya dengan tugas pokok dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, sementara dari sudut pembiayaan disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan tidak termasuk biaya yang bersifat penunjang. Capaian kinerja individual per kegiatan sesuai data yag tersedia, minimal sampai pada indicator input, output dan outcome.

Capaian Kinerja yang disajikan/digunakan untuk menentukan tingkatan kinerja ditetapkan dengan kategori sebagai berikut :

>90-100	: Sangat Memuaskan,	>80-90	: Memuaskan
>70-80	: Sangat Baik,	>60-70	: Baik
>50-60	: Cukup,	>30-50	: Kurang

4 SISTIMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KINERJA

Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan selama tahun 2022. Capaian kinerja (*performance results*) 2022 tersebut diperbandingkan dengan rencana kinerja (*performance plan*) sebagai tolak kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Kabupaten Pelalawan tahun 2022 dapat diuraikan singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas gambaran umum Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang menjabarkan kondisi geografis dan demografi, kewenangan dan struktur organisasi, maksud dan tujuan penyusunan laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan serta sistematika penyusunan laporan.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan kinerja yang direncanakan dan ditetapkan dalam rangka menjalankan prioritas pembangunan di tahun 2022 yang berdasarkan rencana strategis dan misi Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

BabIII Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2022 dan realisasi anggaran yang digunakan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

Bab IV Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Pelalawan tahun 2022 ini dan menguraikan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pelalawan tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan

Sebagai upaya perwujudan **“Terwujudnya Kabupaten Pelalawan Yang Sejahtera, Mandiri, Inovatif, Dan Berdaya Saing Global Secara Berkelanjutan, Dalam Masyarakat Inklusif Yang Beradat, Beriman, Bertakwa Dengan Mengembangkan Nilai Budaya Melayu Tahun 2025”**, Pemerintah Kabupaten Pelalawan merencanakan pembangunan pada periode tahap ke empat pelaksanaan pembangunan jangka panjang. Dengan terpilihnya bupati dan wakil bupati periode pembangunan 2021-2026 sebagai pemimpin pelaksana pembangunan daerah, maka rumusan perencanaan harus menyesuaikan visi dan misi kepala daerah yang telah diselaraskan dengan pencapaian visi pembangunan jangka panjang hingga 2026.

1.1 . Visi Kabupaten Pelalawan

Visi merupakan keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, dimana visi mengenai pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2021 - 2026 merupakan penjabaran dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi menjadi penting karena akan menyatukan

dan mengintegrasikan seluruh komponen dalam pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Pelalawan.

Dengan mempertimbangkan segala aspek bidang pembangunan, kondisi daerah, potensi, permasalahan, tantangan dan peluang Kabupaten Pelalawan, Maka Visi Kabupaten Pelalawan yaitu “***Terwujudnya Kabupaten Pelalawan Yang Sejahtera, Mandiri, Inovatif, dan Berdaya Saing Global secara Berkelanjutan, dalam Masyarakat Inklusif yang Beradat, Beriman, Bertakwa dengan Mengembangkan Nilai Budaya Melayu Tahun 2025***”,

Dengan terpilihnya **H. ZUKRI sebagai Bupati dan H. NASARUDIN, S.H.,M.H., sebagai Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan**, Visi pembangunan Kabupaten Pelalawan yang hendak dicapai dalam RPJMD Periode 2021-2026 adalah :

“Pelalawan Maju 2026”

Visi “**Pelalawan Maju 2026**” dapat diartikan secara singkat sebagai kondisi terwujudnya Kabupaten Pelalawan sebagai pusat industri dan pariwisata yang Makmur Ekonominya, Adil dalam berkehidupan dan pembangunannya, Jaya kinerja daerahnya dan Unggul Sumber Daya Manusianya pada tahun 2026.

Visi tersebut merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam 5 tahun ke depan yang terdiri dari 2 unsur utama, yaitu **Pelalawan Maju**. Kata MAJU terdiri dari beberapa akronim yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1. Pelalawan Makmur**, memiliki makna bahwa masyarakat Kabupaten Pelalawan berada dalam suatu kondisi yang berkecukupan dan tidak kekurangan dalam perekonomian. Masyarakat Kabupaten Pelalawan diharapkan agar dapat kebutuhan primer, dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier dengan mudah dan tanpa adanya tekanan. Dalam hal ini masyarakat dapat dikatakan makmur apabila semua kebutuhannya dapat dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Sehingga diharapkan masyarakat dapat terbebas dari segala himpitan, tekanan dan diskriminasi serta mendapatkan penghidupan yang cukup merupakan hal yang harus bisa

diwujudkan bersama sebagai bentuk tanggung jawab negara melalui pemerintah daerah.

2. **Pelalawan Adil**, memiliki makna masyarakat Kabupaten Pelalawan mendapatkan perlakuan yang tidak memihak atau sama rata, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak ada pilih kasih hak sesuai kewajibanya terutama dalam kehidupan keagamaan, pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Berlaku adil adalah memperlakukan hak dan berpegang pada kebenaran dan tidak sewenang - wenang. Dengan adanya keadilan dalam kehidupan beragama, pembangunan infrastruktur, kesehatan serta pendidikan untuk masyarakat, maka kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
3. **Pelalawan Jaya**, merupakan kondisi yang diharapkan untuk selalu berhasil, mendapatkan kesuksesan terutama berjaya dalam kinerja untuk mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan dengan dukungan basis data terintegrasi. Data yang terintegrasi merupakan kebutuhan dasar dalam merencanakan suatu pembangunan dan mewujudkan rencana tersebut. Dengan data yang terintegrasi dengan baik, maka target – target pembangunan yang telah direncanakan dapat terwujud dengan tepat.
4. **Pelalawan Unggul**, memiliki makna untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki kondisi kualitas moral, sosial dan intelektual yang berkembang dengan baik, memiliki daya saing, kreatif, inovatif dalam pembangunan SDM yang beriman dan berilmu pengetahuan. Beriman dan berpengatahuan menjadi dasar dalam pembangunan manusia yang selalu berlandaskan pada keimanan dan memiliki pengetahuan yang baik dalam setiap pikiran dan perbuatannya untuk membangun Pelalawan, sehingga dapat mewujudkan Pelalawan yang unggul dengan kualitas sumber daya manusia yang baik.

Berdasarkan visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas maka tujuan pembangunan Kabupaten Pelalawan selama periode pelaksanaan pembangunan daerah jangka menengah maka ditetapkan indikator tujuan

yang kemudian menjadi Indikator makro Daerah pembangunan Kabupaten Pelalawan sebagai berikut:

Tabel.2.1
Indikator Tujuan Pembangunan Kabupaten Pelalawan
Tahun 2021-2026

VISI/ MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR
Visi : PELALAWAN MAJU 2026					
Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan iman. (Maju SDM)					
1	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Point	71,56	74,30
2.	Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat	Peningkatan Indeks Kerukunan Umat Beragama	Point	na	2,5
Misi 2: Mewujudkan kemakmuran ekonomi di Perkotaan dan Perdesaan yang mandiri dan berdaya saing (Maju Ekonomi)					
3.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi mandiri dan berdaya saing	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	2,24	4,00
4.	Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	Tingkat Kemiskinan	%	9,16	6,50
Misi 3: Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, lengkap , dan berkelanjutan (Maju Infrastruktur)					
5.	Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan	Peningkatan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	%	na	7,5
Misi 4: Mengembangkan pariwisata daerah berbasis partisipasi masyarakat dan budaya melayu sebagai perekat negeri (Maju Wisata & Budaya)					

VISI/ MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR
6	Meningkatkan pariwisata daerah melalui pemajuan budaya melayu	LPE sektor Pariwisata	%	na	4
Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola dan layanan Pemerintahan yang humanis (<i>Good Public Services</i>) berbasis datadan teknologi informasi (Maju Kepemerintahan)					
7	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	40,05	70

1.2 Misi Kabupaten Pelalawan

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sesuai dengan visi diatas, selanjutnya disusun misi yang mencerminkan tentang segala daya dan upaya yang akan dilaksanakan untuk pencapaian visi Kabupaten Pelalawan Tahun 2021-2026 yaitu **"Pelalawan Maju 2026"**. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Pelalawan Tahun 2021-2026 , sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan iman. (Maju SDM)
2. Mewujudkan kemakmuran ekonomi di Perkotaan dan Perdesaan yang mandiri dan berdaya saing (Maju Ekonomi)
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, lengkap , dan berkelanjutan (Maju Infrastruktur)
4. Mengembangkan pariwisata daerah berbasis partisipasi masyarakat dan budaya melayu sebagai perekat negeri (Maju Wisata & Budaya)
5. Mewujudkan Tata Kelola dan layanan Pemerintahan yang humanis (Good Public Services) berbasis data dan teknologi informasi (Maju Kepemerintahan)

Penjelasan masing-masing dari misi di atas diuraikan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan iman. (Maju SDM)

Sumber daya manusia merupakan elemen yang sangat penting dalam suatu pembangunan. Sumber Daya Manusia adalah yang menggerakkan pembangunan dan manusia yang digerakkan untuk membangun. Dalam rangka untuk mencapai suatu kemajuan, maka potensi-potensi yang ada di dalam diri seseorang haruslah dikembangkan. Bila dikembangkan secara teratur, terencana akan dapat membawa pada suatu tingkat sosial tertentu yang dapat mendukung keberhasilan terhadap suatu pembangunan. Dengan demikian sumber daya manusia tidak henti-hentinya ditantang untuk lebih mampu mengembangkan potensi yang ada, ditambah upaya lain dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas kemampuan dan sekaligus mendukung produktivitas kerja. SDM yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan beriman dapat mendukung pembangunan daerah secara optimal.

Misi yang pertama ini merupakan suatu upaya yang diarahkan untuk membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan beriman melalui peningkatan derajat pendidikan, derajat kesehatan, sertifikasi ketrampilan/keahlian serta penerapan nilai keagamaan. Terwujudnya kualitas pendidikan masyarakat yang berkeadilan, pelayanan kesehatan yang baik, dan peningkatan iman serta ketaqwaan masyarakat dapat mendorong tercapainya sumberdaya manusia yang unggul dan beriman sesuai dengan Misi pertama yaitu Maju SDM. Dalam mewujudkan misi pertama ini terdapat beberapa program unggulan, yaitu :

a. Agama :

- Bantuan masjid, musholla dan rumah ibadah lainnya serta kegiatan remaja masjid dan keagamaan lainnya
- Memberikan insentif bagi imam dan gharim masjid setiap desa dan kelurahan serta pengurus rumah ibadah agama lainnya
- Meningkatkan kesejahteraan guru PDTA/MDA

b. Pendidikan :

- Bantuan pendidikan untuk siswa miskin, anak yatim dan anak disabilitas

- Bantuan pendidikan D3/S1 bagi mahasiswa tidak mampu dan beasiswa penuh bagi anak yatim tidak mampu dan mahasiswa berprestasi sesuai potensi dan kebutuhan daerah
 - Meningkatkan kesejahteraan guru tenaga pendidik (honorar dan swasta) melalui insentif yang layak
- c. Kesehatan :
- Memastikan tidak ada lagi masyarakat miskin yang tidak dapat berobat (asuransi/jaminan kesehatan masyarakat)
 - Bantuan persalinan ibu hamil dan asupan gizi balita serta pengobatan penyandang disabilitas
- d. SDM Siap Kerja :
- Pelatihan kerja/kompetensi keahlian bagi lulusan SMA/Perguruan Tinggi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha
 - Mendirikan D3 Vokasi dan Balai Siap Kerja

2. Mewujudkan Kemakmuran Ekonomi di Perkotaan dan Perdesaan yang mandiri dan berdaya saing (Maju Ekonomi)

Pembangunan adalah suatu proses yang bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan perekonomian. Tujuan utama dari usaha pembangunan ekonomi dalam mencapai kemakmuran adalah untuk mewujudkan masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhannya, menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan pendapatan, dan tingkat pengangguran. Kemakmuran ekonomi di tingkat perkotaan dan perdesaan haruslah seimbang sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing – masing daerah, agar dapat selalu bersinergi satu sama lain untuk mewujudkan kemakmuran di Kabupaten Pelalawan.

Terdapat beberapa upaya yang diarahkan untuk mewujudkan kemakmuran perekonomian masyarakat perkotaan dan perdesaan yang mandiri dan berdaya saing melalui pengembangan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan sebagai basis perekonomian daerah serta pengembangan industri, umkm dan investasi sehingga berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja dan penurunan angka kemiskinan. *Untuk mewujudkan misi kedua, terdapat beberapa program unggulan, yaitu :*

a. Maju Ekonomi Masyarakat :

- Bantuan modal UMKM bagi pengangguran berbasis ekonomi kreatif (maksimal 25 juta);
- Bantuan pupuk gratis bagi petani (kelapa sawit, padi dan hortikultura) dan bantuan bibit gratis kelapa sawit dan pinang, serta bantuan pupuk gratis bagi petani swadaya;
- Bantuan *replanting* kebun kelapa sawit dan konversi karet menjadi kelapa sawit atau pinang;
- Menjamin kestabilan harga jual hasil produk pertanian dan perkebunan;
- Pengembangan kawasan sentra pertanian padi, perikanan dan peternakan serta bantuan alat mesin pertanian dan alat tangkap/budidaya.

b. Maju Ekonomi Daerah

- Membangun pusat percetakan terbesar di Indonesia;
- Membangun pusat konveksi (pabrik/pemanfaatan tekstil) terbesar di Indonesia;
- Menciptakan industri rumahan olahan turunan sawit (seperti sabun, coklat, kosmetik, dsb) dan kelapa (seperti minyak kelapa);

3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, lengkap , dan berkelanjutan (Maju Infrastruktur)

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral dari suatu pembangunan dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur diyakini sebagai motor pembangunan suatu daerah. Pembangunan infrastruktur dapat mendukung segala aktifitas dan sebagai fasilitas dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan berdasar pada keadilan, lengkap, dan berkelanjutan dapat mendukung suatu daerah untuk mencapai Pelalawan yang maju dan sejahtera.

Suatu upaya yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas, kuantitas infrastruktur dan terbangunnya konektivitas wilayah daratan maupun perairan melalui layanan transportasi (jalan, jembatan, roro/dermaga), perluasan

cakupan pelayanan air minum/bersih serta penataan drainase ibukota kabupaten/kecamatan yang didukung ketersediaan listrik dan jaringan telekomunikasi yang adil, lengkap dan memadai diseluruh wilayah.

Untuk mencapai misi ketiga, terdapat beberapa program unggulan, yaitu :

- Ketersediaan dan meratanya sarana prasarana belajar mengajar;
- Ketersediaan dan kelengkapan fasilitas kesehatan sesuai standar di RSUD maupun Puskesmas;
- Pembangunan rumah sakit baru di kawasan selatan Pelalawan dan peningkatan status level Puskesmas serta mempermudah akses penduduk ke RSUD Selasih;
- Pembenahan dan penataan infrastruktur ibukota kabupaten dan kecamatan (drainase, air bersih, ruang terbuka hijau dan taman kreatifitas anak muda);
- Penyelesaian Jalan Lintas Bono terkoneksi Roro Sokoi – Pulau Mendul – Prov. Kepri, pembangunan akses jalan Ukui – Kerumutan, dan jalan/jembatan ke istana Sayap terkoneksi lintas Bono;
- Membangun infrastruktur listrik desa dan jaringan gas rumah tangga perkotaan;
- Membangun infrastruktur pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan pariwisata unggulan daerah berbasis pengelolaan lingkungan hidup yang lestari;
- Menghijaukan kawasan lintas timur dengan program pemberian bantuan bibit buah ke masyarakat untuk ditanam di pekarangan rumah.

4. Mengembangkan pariwisata daerah berbasis partisipasi masyarakat dan budaya melayu sebagai perekat negeri (Maju Wisata & Budaya)

Sektor pariwisata berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Perkembangan dan pertumbuhan pariwisata perlu diantisipasi agar perkembangannya tetappada jalurnya dan daya dukungnya. Pembangunan dalam wilayah objek wisata akan memberikan sumbangan yang sangat besar apabila dikelola secara profesional, karena sumbangan bagi daerah yang bersangkutan, pariwisata dapat memacu pertumbuhan kawasan sekitar objek

wisata tersebut. Pada saat ini, pariwisata yang berbasis pada kebudayaan daerah atau kearifan lokal sangat menarik untuk dikembangkan. Berbagai kebudayaan lokal di setiap daerah mulai di munculkan untuk menarik wisatawan. Banyaknya kebudayaan yang ada dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam mendukung perkembangan pariwisata di setiap daerah.

Suatu upaya yang diarahkan untuk mengembangkan pariwisata partisipatif melalui pengembangan objek dan destinasi wisata sehingga mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan serta meningkatnya pendapatan masyarakat dan daerah dari sektor pariwisata. Pengembangan wisata ini juga diarahkan pada pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu juga diarahkan pada pemajuan budaya melayu sebagai perekat dari berbagai budaya yang ada di Kabupaten Pelalawan. *Untuk mencapai misi keempat, terdapat beberapa program unggulan, yaitu:*

- Memberikan insentif kepada tokoh – tokoh adat yang termasuk di dalam LAM (datuk, batin dan penghulu) dan pakaian adat;
- Pembangunan pariwisata partisipatif dengan melibatkan masyarakat setempat;
- Pembenahan objek wisata unggulan daerah (Bono, air panas, tugu ekuator, istana sayap, suaka magra satwa kerumutan dan TNTN);
- Pembangunan Wisata Perikanan terpadu di Sungai Nilo, Sungai Hulu Bandar dan Sungai Kerumutan;
- Pembangunan pusat kesenian dan paguyuban adat;

5. Mewujudkan Tata Kelola & layanan Pemerintahan ygg humanis (Good Public Services) berbasis data dan teknologi informasi (Maju Pemerintahan)

Di era modernisasi seperti ini, pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Paradigma atau pandangan pergeseran sistem pemerintah yang dulu sentralistik kini telah berubah menjadi sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi memberikan kemudahan untuk membentuk lingkungan kerja yang ideal, memperluas cakupan pelayanan publik dan partisipasi, peningkatan responsibilitas serta pengawasan dapat

dilakukan secara intensif oleh pemerintah. Apabila pemerintah dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik, maka manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Pelayanan publik yang baik harus didukung dengan data – data yang terintegrasi serta memanfaatkan perkembangan teknologi agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat. Suatu upaya Kabupaten Pelalawan yang diarahkan untuk meningkatkan tata kelola dan layanan publik yang baik dan responsif didukung oleh data pembangunan yang lengkap, valid dan terintegrasi melalui sistem layanan teknologi.

Adapun peran masyarakat dalam partisipasi perwujudan pembangunan dapat dilibatkan tidak hanya dalam sisi perencanaan saja melalui musrenbang atau mekanisme lainnya, akan tetapi dalam implementasi setiap program kegiatan pembangunan serta pengawasan dalam setiap pelaksanaannya harus mampu menjadi tugas masyarakat yang diemban, khususnya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Diharapkan, partisipasi masyarakat akan mendorong terwujudnya pemerintahan yang responsif dan bertanggung jawab, serta meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dan membantu konsolidasi demokrasi.

Untuk mendukung tercapainya misi kelima, terdapat beberapa program unggulan, yaitu :

- Penyediaan data terintegrasi yang menjadi basis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan (*one big data*);
- Menghadirkan aplikasi "**Klik Pelalawan**" untuk kemudahan pelayanan pemerintahan terpadu (pelayanan perizinan, administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, dan sebagainya);
- Penggratiskan izin usaha mikro dan kecil;
- Penerapan *single salary* berdasarkan kinerja ASN perorangan;
- Penambahan pendapatan tenaga honor disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan penilaian tenaga kerja dan pemberian Tunjangan Hari Raya;
- Menggratiskan pemakaian gedung daerah untuk acara pernikahan (pada hari Sabtu – Minggu);

2. PERJANJIAN KINERJA 2022

Dalam tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah menetapkan sasaran yang ingin dicapai dengan memanfaatkan sumber dana yang seluruhnya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pelalawan Tahun 2022.

Keseluruhan indikator sasaran yang ingin dicapai tersebar pada program dari berbagai Kegiatan yang ada di Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah mengalokasikan Anggaran Belanjanya yakni pada APBD Perubahan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2022 dengan alokasi sebesar Rp 1.916.975.102.815,00

Perjanjian Kinerja yang dicapai untuk Tahun 2022 sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	72.71
2	Terwujudnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Kesenjangan Gender	Indeks Pendidikan	62.79
		Indek Pembangunan Gender	60
		Indek Pembangunan Literasi Masyarakat	89.15
3	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Indeks Kesehatan	79.11
4	Terwujudnya Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga yang Kompetitif dan Berdaya Saing	Kategori Kabupaten Layak Pemuda	Pratama
5	Meningkatnya Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat	Peningkatan Indeks Kerukunan Beragama	0.5
6	Terwujudnya Masyarakat yang Agamis dan Berakhlak Mulia	Tingkat Pertumbuhan Rasio Keterisian Rumah Ibadah	2.5
7	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Mandiri dan Berdaya Saing	Laju Pertumbuhan Ekonomi	2.83

8	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah serta Pengembangan Desa Mandiri	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4.49
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	2
9	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	LPE Kategori Industri Pengolahan	2.63
10	Meningkatnya Kualitas Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	6.5
11	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	8.23
12	Meningkatnya Kesempatan Kerja bagi Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	5.33
13	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Indeks Gini	0.005
		Indeks Pengeluaran	76.62
14	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Berkelanjutan	Peningkatan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	1.5
15	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Infrastruktur Dasar Kepada Masyarakat	Peningkatan Inderks Konektivitas Wilayah	2.5
		Rasio Pemukiman layak Huni	78.82
16	Meningkatnya Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65.96
17	Meningkatnya Pariwisata Daerah melalui Pemajuan Budaya Melayu	LPE Sektor Pariwisata	2
18	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Wisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD (Pajak Restoran, Hiburan, Hotel, Retribusi Objek Wisata) (Rp.Juta)	9.344
19	Meningkatnya Kualitas Masyarakat yang Berbudaya	Indeks Pertumbuhan Kebudayaan	0.580
20	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	50.00
21	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja	
		Indeks Inovasi Daerah (IID)	60
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	65
22	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bias dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD, Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 3 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yg ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) Daerah diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

3.1. Capaian Kinerja Makro Pemerintah Daerah

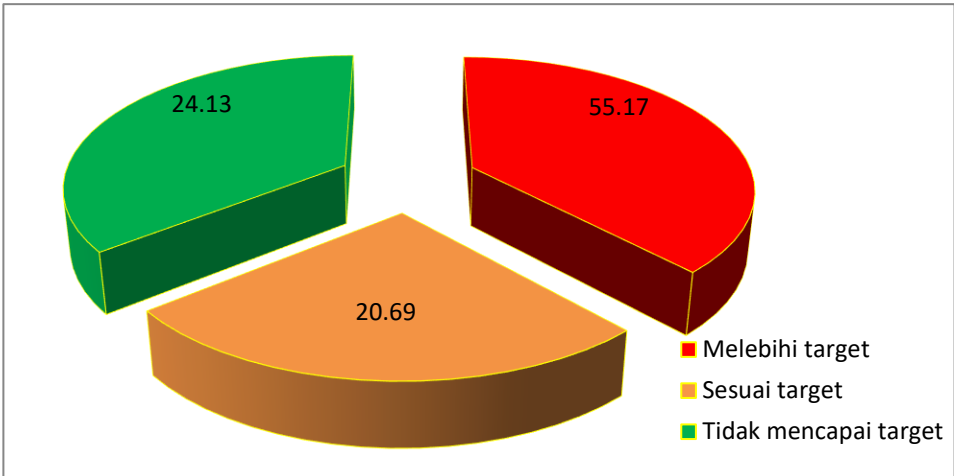
Indikator makro pembangunan merupakan Indikator yang mengidentifikasi terkait keberhasilan pembangunan secara umum yang dapat diperbandingkan secara Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ukuran keberhasilan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah yang terdapat dalam RPJMD 2021-2026 Kabupaten Pelalawan yakni Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 3 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2021-2026 ditetapkan menjadi yakni Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang ditetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir masa jabatan. Capaian Kinerja Makro Daerah tahun 2022 merupakan tahun pertama atas pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026, sebagaimana tertera pada tabel. 3.1. dibawah ini.

Tabel. 3.1
Pencapaian Kinerja Makro Pemerintah Daerah
Kabupaten Pelalawan Tahun 2022

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
1	Meningkatnya Kualitas Pembangunan manusia	IPM	71,56	72,71	72,94	100.30
2	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	9,16	8,23	8.97	91.75
3	Meningkatnya Kesempatan Kerja bagi Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,99	5,33	2.34	43.90
4	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Indeks Gini	NA	0,005	0,294	58.80

5	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Mandiri dan Berdaya saing	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	2,24	2,83	4.07	143.81
6	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat	PDRB per Kapita	129,83	133,22	144.31	108.32

Diagram 3.1.
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Daerah Tahun 2022



3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Utama Daerah

Analisa dan evaluasi kinerja memberikan justifikasi dan penyelesaian tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang ditargetkan. Secara umum Pemerintah Daerah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 3 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2021-2026 dengan Jumlah sasaran yang diperjanjikan untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah Tahun 2022 sebanyak 22 (dua puluh dua) sasaran-sasaran strategis dengan 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja. Capaian kinerja tahun 2022 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2021-2026 Kabupaten Pelalawan. Capaian kinerja utama Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD adalah sebagaimana tertera dibawah ini:

Tabel. 3.2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi AWAL	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022 (%)
1	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	71.56	72.71	72.94	100,31
2	Terwujudnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Kesenjangan Gender	Indeks Pendidikan	62.33	62.79	64.29	102.39
		Indek Pembangunan Gender	88.51	89.15	88.94	99.76
		Indek Pembangunan Literasi Masyarakat	NA	60	70.98	118.30
3	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Indeks Kesehatan	78.71	79.11	89.41	113.02
4	Terwujudnya Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga yang Kompetitif dan Berdaya Saing	Kategori Kabupaten Layak Pemuda	NA	Pratama	–	–
5	Meningkatnya Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat	Peningkatan Indeks Kerukunan Beragama	NA	0.5	0.5	100.00
6	Terwujudnya Masyarakat yang Agamis dan Berakhlak Mulia	Tingkat Pertumbuhan Rasio Keterisian Rumah Ibadah	NA	2.5	2.5	100,00
7	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Mandiri dan Berdaya Saing	Laju Pertumbuhan Ekonomi	2.24	2.83	4.39	155.12
8	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah serta Pengembangan Desa Mandiri	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4.24	4.49	3.12	69.49
		Pertumbuhan Status Desa Mandiri	NA	2	7	350.00
9	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	LPE Kategori Industri Pengolahan	1.94	2.63	4.71	179.09
10	Meningkatnya Kualitas Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	5.30	6.5	8,40	129,23
11	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	9.16	8.23	8.97	91.75
12	Meningkatnya Kesempatan Kerja bagi Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	5.99	5.33	2,73	195.23
13	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Indeks Gini	NA	0.005	0,012	240.00
		Indeks Pengeluaran	76.40	76.62	76.12	99.35

14	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Berkelanjutan	Peningkatan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	NA	1.5	1.5	100.00
15	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Infrastruktur Dasar Kepada Masyarakat	Peningkatan Inderks Konektivitas Wilayah	NA	2.5	2.5	100.00
		Rasio Pemukiman Layak Huni	76.32	78.82	81.32	103,17
16	Meningkatnya Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63.54	65.96	69.20	104,91
17	Meningkatnya Pariwisata Daerah melalui Pemajuan Budaya Melayu	LPE Sektor Pariwisata	NA	2	13.43	671.50
18	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Wisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD (Pajak Restoran, Hiburan, Hotel, Retribusi Objek Wisata) (Rp.Juta)	5.584	9.344	10.341	110.67
19	Meningkatnya Kualitas Masyarakat yang Berbudaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	0.52	0.580	0.60	103.45
20	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	49.62	50.00	56.65	113.3
21	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja	63.76	70.00	64.78	92.54
		Indeks Inovasi Daerah (IID)	60.50	60	53.39	88.98
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	65.00	65	66,26	101,93
22	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80.33	91	81,74	89,82

Tabel. 3.3.

RATA-RATA CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA DAERAH TAHUN 2022

NO	Sasaran Daerah	Jumlah Indikator Kinerja	Rata-rata % Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia	1	100.31
2	Terwujudnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Kesenjangan Gender	3	106.82
3	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	1	113.02
4	Terwujudnya Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga yang Kompetitif dan Berdaya Saing	1	-
5	Meningkatnya Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat	1	100.00
6	Terwujudnya Masyarakat yang Agamais dan Berakhlak Mulia	1	100.00

7	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Mandiri dan Berdaya Saing	1	155.12
8	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah serta Pengembangan Desa Mandiri	2	209.74
9	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	1	179.09
10	Meningkatnya Kualitas Investasi Daerah	1	129.23
11	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1	108.99
12	Meningkatnya Kesempatan Kerja bagi Masyarakat	1	51.22
13	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat	2	169.67
14	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Berkelanjutan	1	100.00
15	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Infrastruktur Dasar Kepada Masyarakat	2	101.59
16	Meningkatnya Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	1	104.91
17	Meningkatnya Pariwisata Daerah melalui Pemajuan Budaya Melayu	1	671.50
18	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Wisata	1	110.67
19	Meningkatnya Kualitas Masyarakat yang Berbudaya	1	103.45
20	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1	113.30
21	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3	100.93
22	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	89.82
Jumlah/Rata-rata Capaian Kinerja		29	109.70

Selanjutnya pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja utama pada setiap sasaran dan indikator pada tahun 2021 sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pelalawan tahun 2021-2026, secara rinci dapat dilihat pada analisis dibawah ini :

1. Analisis Pencapaian Sasaran :
Meningkatnya Kuallitas Pembangunan Manusia

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA 2022
				TARGET	REALISASI	
1	Indeks Pembangunan Manusia	%	71,56	72.71	72.94	100.31

Indikator Pembangunan Manusia Kabupaten Pelalawan Tahun 2022
ditetapkan target sebesar 72.71 persen sementara realisasinya sebesar 72.94 persen

artinya capaian kinerja adalah sebesar 100.31 persen. Jika dibandingkan kondisi awal maka capaian realisasinya sebesar 71.56 persen artinya mengalami peningkatan sebesar 1.37 persen. Adapun yang menjadi Indikator Indeks Pembangunan Manusia terdiri dari Umur Harapan Hidup Saat Lahir (tahun), Harapan Lama Sekolah (tahun), Rata-rata Lama Sekolah (tahun) dan Pengeluaran per kapita disesuaikan (000 Rp/tahun)

Indeks Harapan Hidup diukur dengan angka harapan hidup saat lahir (AHH) guna mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya melalui pendekatan Angka Harapan Hidup (AHH) dimana Angka Harapan Hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Pelalawan tahun 2022 mencapai 71,53 poin dan mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,29 poin dibandingkan tahun 2021, dengan capaian Angka harapan Hidup sebesar 71,24 poin.

Indeks pengetahuan diukur dengan kombinasi antara lama sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang dan rata-rata lama sekolah guna mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan derajat pendidikan masyarakat melalui pendekatan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah dimana Rata-rata lama sekolah adalah sebuah angka yang menunjukkan rata-rata lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir.

Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pelalawan pada tahun 2022 mencapai 12,68 poin mengalami kenaikan sebesar 0,27 poin dibandingkan tahun 2021 yang mencapai sebesar 12,41 poin. Capaian Harapan lama sekolah sebesar 12,68 menunjukkan bahwa harapan lama sekolah di Kabupaten Pelalawan setara dengan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat. Sedangkan rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Pelalawan pada tahun 2022 mencapai 8,72 tahun mengalami peningkatan 0,02 tahun dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 8,70 tahun. Capaian rata-rata lama sekolah sebesar 8,72 tahun menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pelalawan setara dengan tingkat lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat.

Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Pelalawan pada tahun 2022 adalah mencapai sebesar 8.72, jika dibandingkan dengan tahun 2021 adalah sebesar 8.70 artinya mengalami kenaikan sebesar 0.02 ini menunjukkan bahwa semakin tingginya

kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan serta didukung semakin meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Rata-rata Lama Sekolah adalah Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Indikator Rata-rata Lama Sekolah adalah untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka capaian Rata-rata Lama Sekolah maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya

Indeks standar hidup layak diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan atau paritas daya beli guna mengukur kemampuan masyarakat dalam membelanjakan pendapatannya melalui kemampuan daya beli. Pada tahun 2022 kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Pelalawan mencapai Rp.12.163.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 491.000,00 dari Rp.11.672.000,00 pada tahun 2021. Pencapaian ini menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran perkapita masyarakat pada tahun 2022 mengalami peningkatan.

Capaian Indikator IPM Kabupaten Pelalawan Tahun 2022 sebagai berikut

INDEK PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN PELALAWAN
TAHUN 2021-2022

NO	INDIKATOR IPM	INDEK PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN PELALAWAN	
		TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (tahun)	71,24	71,53
2	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,41	12,68
3	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,70	8,72
4	Pengeluaran per kapita disesuaikan (000 Rp/tahun)	11 672,00	12 163,00
	Indeks Pembangunan Manusia	72,08	72,93

2. Analisis Pencapaian Sasaran :
Terwujudnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Kesenjangan Gender

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA 2022
				TARGET	REALISASI	
1	Indeks Pendidikan	%	62,33	62,79	64.29	102.39
2	Indeks Pembangunan Gender	%	88,51	89.15	88.94	99.76
3	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	Na	60.00	70,98	118.30

Indeks Pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan bidang pendidikan. Indikator pembentuk indeks Pendidikan adalah Angka Melek Huruf dan Rata-rata lama Sekolah. Dibanding dua komponen pembentuk IPM yang lain yaitu indeks Kesehatan dan indeks Daya Beli, pencapaian indek Pendidikan di Kabupaten Pelalawan selama ini relatif paling besar. Kondisi ini diharapkan bisa menjadi motor penggerak pembangunan di bidang lainnya. Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk kemampuan masyarakat untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kemampuan agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan secara berkelanjutan. Keberhasilan pendidikan sangat tergantung pada kualitas kesehatan yang dimiliki. Usia harapan hidup yang lebih panjang dapat meningkatkan pengembalian atas investasi dalam pendidikan. Kesehatan yang lebih baik akan menyebabkan rendahnya tingkat depresiasi dari modal pendidikan. Dengan demikian pendidikan dan kesehatan merupakan komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital. Peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan merupakan kunci untuk menikmati tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Indeks pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan di bidang pendidikan yang mempunyai kedudukan strategis, mengingat kualitas sumber daya manusia yang tercermin didalamnya sangat menentukan tingkat produktivitas suatu bangsa. Indeks pendidikan diukur dari kemampuan baca tulis orang dewasa secara tertimbang (dua pertiga) dan rata-rata tahun bersekolah. Kemampuan baca-tulis orang dewasa tercermin dari data angka melek huruf (literacy rate) yaitu proporsi penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis (baik huruf latin maupun huruf lainnya). Rata-rata

lama sekolah (means-years of schooling) menunjukkan jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun keatas. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 25 tahun masih dalam proses sekolah .

Indeks Pendidikan Kabupaten Pelalawan Tahun 2022 adalah sebesar 64.29 atau dengan capaian kinerja sebesar 102.39 persen. Jika dibandingkan dengan kondisi awal maka capaian kinerjanya adalah sebesar 62.33, maka artinya mengalami kenaikan sebesar 1.96 “Indeks Pendidikan merupakan komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia yang dipresentasikan oleh indikator APM (Angka Partisipasi Murni dan APK (Angka Partisipasi Kasar) Kabupaten Pelalawan tahun 2022. Tingkat keberhasilan pembangunan bidang pendidikan di daerah bisa dilihat dari Indeks Pendidikan,” “Kita tetap komitmen untuk meningkatkan Indeks Pendidikan tahun berikutnya, di antaranya melalui: peningkatan Sumber Daya Manusia pengajar. Pendidikan diperlukan sebagai sarana untuk membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Melalui pendidikan yang baik, diharapkan tercipta Pendidikan diperlukan sebagai sarana untuk membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Melalui pendidikan yang baik, diharapkan tercipta manusia sebagai pelaku pembangunan yang berjiwa pembaharu, yang dapat mengembangkan segala potensi diri dan mengambil peran dalam pembangunan berbagai aspek kehidupan. Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk kelompok umur tertentu yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin terhadap penduduk kelompok umur tersebut. AMH 15 tahun ke atas Kabupaten Pelalawan tahun 2022 adalah 99.30 persen. Tingkat partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur diantaranya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APS merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada kelompok umur tertentu terhadap penduduk pada kelompok umur yang sesuai. paling rendah yaitu pada jenjang SMA sebesar 60.36 persen. Diharapkan nilai APK pada setiap jenjang dapat terus meningkat. Ketepatan umur penduduk dalam berpartisipasi untuk mengenyam pendidikan dapat dilihat melalui Angka Partisipasi Murni (APM). APM merupakan proporsi penduduk pada kelompok

umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Berikut APM dan APK Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Pelalawan.

ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) DAN ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) MENURUT JENJANG PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN

JENJANG PENDIDIKAN	ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM)		ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK)	
	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD/MDA	99,13	99,30	105,91	108,22
SMP/MTs	77,85	77,73	89,68	90,10
SMA/MA	59,71	60,36	93,93	95,28

Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Pelalawan Tahun 2022 adalah sebesar 88.94 atau dengan realisasi sebesar 99.76 persen, jika dibandingkan dengan Kondisi Awal atau tahun sebelumnya adalah sebesar 88.51 persen atau terjadi peningkatan sebesar 0.43 persen. Indikator kinerja Gender yang dihitung adalah antara lain tingkat pengetahuan, tingkat layak hidup serta angka harapan hidup masyarakat. Keberhasilan dari program ini didukung dari program pengentasan kemiskinan, program peningkatan Kesehatan masyarakat serta program tingkat Pendidikan masyarakat sehingga Tindakan sinergi antar sector dalam bekoordinasi melaksanakan program.

Gender adalah pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Gender tidak sama dengan kodrat. Kodrat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan YME, sehingga manusia tidak mampu untuk merubah atau menolak Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, dan seimbang Terdapat dua indikator yang dapat

menggambarkan keadaan gender, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Nilai IDG di Kabupaten Pelalawan pada tahun 2021 adalah 49,48. Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Nilai IPG di Kabupaten Pelalawan pada tahun 2021 adalah 88,73

Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Nilai IPG di Kabupaten Pelalawan pada tahun 2021 adalah 88,51

Indek Pembangunan Literasi Masyarakat adalah bentuk pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat.

Ukuran keberhasilan dan pencapaian terwujudnya kualitas Pendidikan masyarakat yang berkeadilan dan kesetaraan gender sangat ditentukan oleh Indikator kinerja Indeks Pembangunan literasi Masyarakat yang tertuang dalam indikator kinerja kunci (IKK), seberapa relevan, penting dan efektif serta layak indikator kinerja indeks pembangunan literasi masyarakat terhadap terwujudnya kualitas Pendidikan masyarakat yang berkeadilan dan kesetaraan gender, factor-faktor penentu tingginya indeks pembangunan literasi masyarakat didukung oleh minat baca dan ditopang oleh adanya perpustakaan kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan dan sekolah-sekolah serta kegiatan literasi yang dilaksanakan oleh Kabupaten Pelalawan melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pelalawan. **Pada tahun 2022 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Pelalawan** adalah sebesar 70.98 atau dengan realisasi sebesar 118.30 persen. Jika dibandingkan dengan Kondisi Awal/tahun sebelumnya capainnya belum ada. Selanjutnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Propinsi Riau Tahun 2021 adalah sebesar 70.98 dengan rincian adalah : $ULPM1 = 0.0017$, $UPLM2 = 1.6199$, $UPLM3 = 0.0029$, $UPLM4 =$

0.4520, UPLM5 = 1.8885, UPLM6 = 0.3232 dan UPLM7 = 0.6804 . Kemudian Untuk hasil Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang merupakan hasil survei yang dilaksanakan oleh Perpustakaan nasional Republik Indonesia, tingkat Literasi Pelalawan secara Nasional adalah “BAIK” artinya Kemampuan membaca masyarakat Kabupaten Pelalawan lebih tinggi dari IPLM secara nasional, dimana untuk Indeks Pembangunan Nasional adalah sebesar 64,48 dengan perbandingan kabupaten Pelalawan (Riau) dengan Nasional adalah 70,98 : 64,48 atau rasio 1,1 : 1

Adapun program yang mendukung atas keberhasilan Indikator kinerja sasaran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah Program pembinaan perpustakaan yang memenuhi Standar Perpustakaan Nasional (SNP) dengan terpenuhinya perpustakaan baik yang ada di Kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan dan sekolah sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Mengenai Kendala atau hambatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah Jumlah Perpustakaan yang terbatas dan belum maksimalnya dorongan anggaran dari pemerintah daerah serta tidak adanya wewenang penuh yang diberikan oleh Perpustakaan Nasional RI untuk Kabupaten/Kota melakukan pengukuran secara mandiri terhadap Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat sehingga data IPLM untuk Kabupaten/kota mengacu pada IPLM Propinsi.

3. Analisis Pencapaian Sasaran : Terwujudnya Kualitas Pelayanan Kesehatan

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA 2022
				TARGET	REALISASI	
1	Indeks Kesehatan	%	78.71	79.11	89.41	113.02

Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat adalah indikator kunci untuk melihat pembangunan kesehatan sampai tingkat kabupaten/kota. Penyusunan Indek Pembangunan Kesehatan Masyarakat Tahun 2022 mengacu kepada model IPKM dijabarkan dalam tujuh subindeks yaitu :

- Kesehatan Balita,
- Kesehatan Reproduksi,
- Pelayanan Kesehatan,

4. Perilaku Kesehatan,
5. Penyakit Tidak Menular,
6. Penyakit Menular, dan
7. Kesehatan Lingkungan.

Indeks Kesehatan Kabupaten Pelalawan membaik dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Hal tersebut merupakan hasil dari penghitungan Indeks Kesehatan tahun 2022 yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas Kesehatan untuk ke semua sektor, menentukan prioritas daerah yang harus dibantu, dan masalah spesifik daerah yang perlu diprioritaskan penanganannya.

Indeks Kesehatan Kabupaten Pelalawan Tahun 2022 adalah sebesar 89.41 atau capaian realisasinya sebesar 113.02 persen, jika dibandingkan dengan kondisi awal/sebelumnya realisasinya capaian adalah sebesar 78.71 atau 98.72 persen artinya mengalami kenaikan sebesar 10.70 persen. Capaian realisasi tersebut menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Pelalawan meningkat dalam 3 tahun terakhir ini. Sebagai contoh, peningkatan/pada capaian tersebut dapat dilihat pada Persentase Balita Gizi Buruk (%) yang mengalami penurunan menjadi 0,02% dari total Balita yang ada di Kabupaten Pelalawan. Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak menular penderita Hipertensi 34,72%.

Adapun Program yang mendukung atas keberhasilan Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut :

- a. Program Pengendalian Penyakit Menular Dan Tidak Menular :
 1. Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
 2. Penanggulangan HIV/AIDS.
- b. Program Bina Gizi, Kesehatan Ibu & Anak Serta Kesehatan Lingkungan :
 1. Pembinaan Prilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS).
 2. Pembinaan Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
 3. Penanggulangan Gizi Buruk.
 4. Pelacakan Kasus Kematian Ibu Dan Bayi
- c. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar :
 - Peningkatan Pelayanan Dan Penanggulangan Masalah Kesehatan.

Mengenai Kendala dan Hambatan terhadap Indikator Kinerja ini adalah Masalah Pandemi COVID-19 membawa pengaruh terhadap pembangunan Kesehatan masyarakat di Kabupaten Pelalawan. Hal ini terlihat dari pencapaian 12 Indikator SPM yang mengalami penurunan. Target sasaran pelayanan dasar

tidak bisa terpenuhi 100%, tidak bisa melakukan pelayanan langsung kemasyarakat dalam bentuk promosi Kesehatan.

7 (tujuh) indikator penyusunan Indek Pembangunan Kesehatan Masyarakat mencerminkan capaian program dan sebagai potret capaian pembangunan kesehatan wilayah. Masih adanya kesenjangan antar wilayah menunjukkan masih perlunya terobosan program untuk meningkatkan capaian sehingga pembangunan kesehatan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Berdasarkan komponen dan Indek Pembangunan Kesehatan Masyarakat antar Kabupaten, ditemukan bahwa penyakit tidak menular konsisten masih menjadi masalah di hampir semua Kabupaten, serta disparitas antar Kabupaten di dalam Provinsi Riau. Indek Pembangunan Kesehatan Masyarakat tahun 2022 ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk monitoring dan evaluasi keberhasilan pembangunan kesehatan selama satu tahun, di tingkat Kabupaten Pelalawan. Hasil evaluasi tersebut diharapkan bermanfaat untuk menetapkan kebutuhan dan arah pembangunan kesehatan yang sesuai dengan besaran masalah di kabupaten Pelalawan.

4. Analisis Pencapaian Sasaran :
Terwujudnya Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga yang Kompetitif dan Berdaya Saing

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA 2022
				TARGET	REALISASI	
1	Kategori Kabupaten Layak Pemuda	Poin	NA	Pratama	—	—

Pemuda merupakan tulang punggung pembangunan di masa yang akan datang. Potensi pemuda Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke perlu pengelolaan yang terintegrasi. Hal ini yang mendasari Pemerintah, melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), mencanangkan program Kabupaten/Kota Layak Pemuda yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 tahun 2017. Kabupaten Pelalawan sebagai salah satu Kabupaten yang ada di Propinsi Riau yang masih dalam proses pengembangan, diharapkan dapat turut serta menjadi salah satu Kabupaten/Kota Layak Pemuda di Indonesia. Oleh karena Kabupaten Pelalawan berusaha dan berbenah kelayakan sebagai Kota Layak Pemuda, dengan tujuan menggunakan metode campuran (mix method), yaitu mengkombinasikan

antara metode kuantitatif dan kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan metode pengumpulan data secara langsung pada sumber data, melalui survei lapangan dan wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen atau data dari suatu lembaga atau instansi. Hasil ini nantinya menunjukkan bahwa kegiatan kepemudaan di Kabupaten Pelalawan yang terdiri atas kegiatan penyadaran pemuda, Swadaya Masyarakat. Dengan kondisi pelaksanaan kegiatan dan ketersediaan sarana-prasarana kepemudaan, Kabupaten Pelalawan dinilai cukup layak untuk menjadi salah satu Kota Layak Pemuda di Indonesia. Kategori Kabupaten/Kota Layak Pemuda Kabupaten/Kota Layak Pemuda, dibagi menjadi 3 kategori, yaitu: 1. Utama Kategori yang diberikan kepada Kabupaten/Kota yang memiliki: a. Kebijakan/Regulasi b. Program kegiatan c. Keterlibatan stakeholder pemuda d. Pendanaan e. Prasarana/sarana f. Data 2. Madya Kategori yang diberikan untuk Kabupaten/Kota yang memiliki komitmen kuat di dalam fasilitasi dan pengembangan pemuda dengan indikator yang sesuai/ditetapkan oleh Tim Penilai. 3. Pratama Kategori yang diberikan untuk Kabupaten/Kota yang potensial (mempunyai potensi, kemampuan) dan memiliki kecenderungan dan langkah-langkah untuk menyiapkan daerah Kabupaten/Kota Layak Pemuda

Kategori Kabupaten Layak Pemuda Kabupaten Pelalawan tahun 2022 adalah belum ada capaian. Namun potensi pemuda yang ada di Kabupaten Pelalawan memerlukan sesuatu pengintegrasian dalam pengelolaannya di daerah. Karenanya, diperlukan suatu sistem layanan pemuda yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak pemuda. Struktur penduduk Indonesia saat ini pada dasarnya cukup positif dalam mendukung pembangunan ekonomi, mengingat jumlah penduduk yang tergolong usia produktif jauh lebih besar dibanding penduduk yang kurang produktif. Kondisi ini merupakan keunggulan menghadapi bonus demografi," Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dalam hal ini Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan mengeluarkan kebijakan dan program Kabupaten/Kota Layak Pemuda untuk menyadarkan, memberdayakan, dan mengembangkan potensi kaum muda dalam mendukung pembangunan daerah di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan agama. Kategori Layak Pemuda merupakan salah satu program prioritas Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan untuk meningkatkan mutu standarisasi kepemudaan di

seluruh Indonesia, sehingga semua Kota dan Kabupaten di Indonesia mempunyai standardisasi dalam pengembangan pemuda yang berusia 16 sampai 30 tahun yang diatur dalam UU dan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No 11 Tahun 2017," Program KLP ini, dapat meningkatkan partisipasi dan peran serta pemuda dalam pembangunan agama, sosial, budaya, dan ekonomi, sesuai dengan Nawa Cita dan komitmen pemerintah, masyarakat dunia dalam mewujudkan suatu kabupaten/kota yang memiliki sistem pembangunan yang berbasis layanan dan kepemudaan," Pembinaan pemuda di Kabupaten Pelalawan mendapatkan perhatian serius. Selalu diberi ruang untuk berkiprah. Selain itu, juga diberikan pembinaan intensif melalui dinas-dinas terkait."Ini dilakukan supaya pemuda nantinya tampil sebagai penerus cita-cita bangsa memiliki karakter yang kuat sehingga Indonesia disegani di antara bangsa-bangsa di dunia. bangsa ini dianugerahi bonus demografi yang tidak dimiliki bangsa lain di dunia. Bonus tersebut adalah jumlah penduduk usia produktif jauh lebih banyak dari usia non produktif. Lebih dari 60 persen penduduk Indonesia adalah usia produktif, yaitu pemuda. Ini merupakan modal Indonesia untuk mencapai kejayaan," Kota layak pemuda, lantaran Indonesia akan dihadapkan bonus demografi 2020-2035 mendatang. Di mana pemudanya akan mendominasi masyarakat keseluruhan dengan usia 16 tahun hingga 30 tahun. Untuk menggarap potensi, pihaknya kemudian menggagas kegiatan ini dengan harapan pemuda bisa berkreasi dibanding melakukan pelbagai hal negatif.

5. Analisis Pencapaian Sasaran :
Meningkatnya Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA 2022
				TARGET	REALISASI	
1	Peningkatan Indeks Kerukunan Umat Beragama	%	NA	0,5	0.5	100

Peningkatan Index Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Pelalawan Tahun 2022 adalah sebesar 0.5 atau dengan capaian kinerja sebesar 100 persen masuk pada kategori baik. Mendapatkan nilai baik tersebut

bukanlah hal mudah. Untuk itu, perlu Kerjasama dan sinergi seluruh pihak yang ada di Kabupaten Pelalawan terutama Kementerian Agama di Kabupaten Pelalawan dan atau pemangku kepentingan . Indesk KUB bukan hanya melihat keberhasilan kita tapi yang paling penting adalah pemetaan masalah, prediksi masalah dan deteksi masalah, karena Indeks KUB dibangun dari beberapa variable yaitu toleransi, kerjasama dan kesetaraan.

Indeks KUB menjadi *early warning* dan *monitoring system* yang baik karena dapat melihat pola pikir dan sikap di masyarakat Indonesia. Ini adalah inventaris terbaik yang dimiliki Kemenag, maka perlu tindak lanjut dari hasil tersebut. Potret KUB adalah cara untuk menunjukkan wajah toleransi melalui potret kerukunan yang ada di Indonesia . Kerukunan Umat beragama sebagian penting kerukunan Nasional merupakan tugas bersama umat Bergama, pemerintah daerah, civitas academica, termasuk kalangan masyarakat madani (civil society. Maka kita menggandeng berbagai pihak untuk mewujudkan cita-cita luhur ini.

6. Analisis Pencapaian Sasaran :
Terwujudnya Masyarakat yang Agamais dan Berakhlak Mulia

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA 2022
				TARGET	REALISASI	
1	Tingkat Pertumbuhan Rasio Keterisian Rumah Ibadah	%	NA	2,5	2,5	100

Pada Tahun 2022 Tingkat Pertumbuhan Rasio Keterisian Rumah Ibadah Kabupaten Pelalawan adalah sebesar 2,5 atau terealisasi sebesar 100 persen . Jika dibandingkan dengan Kondisi Awal maka Tingkat Pertumbuhan Rasio Keterisian Rumah Ibadah di Kabupaten Pelalawan jauh lebih meningkat. Terkait hal tersebut diatas Pemerintah Daerah Kabupetn Pelalawan melalui Perangkat Daerah terkait tetap memperhatikan rumah-rumah ibadah yang ada diwilayah daerah Kabupaten Pelalawan. Peningkatan terhadap jumlah Kapasitas penampung jamaah yang ada di rumah ibadah juga menjadi perhatian, Kementerian Agama bersama para tokoh agama dan pemuda untuk terus merawat kerukunan, menghargai perbedaan, dan menghindari perpecahan. ini menunjukkan bahwa Tuhan menginginkan kita berbeda-beda. Kita diciptakan berbeda-beda. Diciptakan untuk tidak sama,

tujuannya agar kita bersatu. Yang sama tidak perlu dibedakan yang beda tidak perlu disamakan. Tantangan kita ke depan, khususnya FKUB adalah bagaimana memperluas segmentasi_silaturahmi_dan sosialisasi lintas agama, bukan hanya ke level para tokoh dan pemangku jabatan, melainkan saatnya ekspansi ke level generasi muda dan pelajar.

7. Analisis Pencapaian Sasaran :
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Mandiri dan Berdaya Saing

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA 2022
				TARGET	REALISASI	
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	2.24	2.83	4.39	155.12

Laju pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pelalawan Tahun 2022 adalah sebesar 4,39 atau terealisasi sebesar 155.12 persen. Jika dibandingkan dengan kondisi Awal atau tahun sebelumnya maka persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pelalawan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 1.56. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya sektor industri yang menguat, stagnasi tingkat konsumsi rumah tangga dan investasi yang makin meningkat, walaupun secara keseluruhan terpengaruh oleh kondisi global serta pengaruh Pandemi Covid-19 yang melanda dunia beberapa tahun terakhir

Selanjutnya jika dibandingkan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Riau Tahun 2022 yakni sebesar 3,81 persen dan tahun 2021 sebesar mengalami minus 1,12 persen. Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2022 tercatat sebesar 5,72 persen. Menguatnya pemulihan ekonomi ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi Q3 2022 dibandingkan Q2 2022 sebesar 1,8 persen. Dengan tingkat pertumbuhan ini, level PDB nasional secara kumulatif s.d. tahun 2022 berada 6,6 persen di atas level kumulatif tahun 2021. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi didorong oleh pertumbuhan positif seluruh sektor. Hal ini menunjukkan roda perekonomian kembali bergerak hampir merata di semua sektor ekonomi. Pada sektor manufaktur tumbuh sebesar 4,8 persen, pertumbuhan sektor hilirisasi sumber daya alam tumbuh kuat dengan industri logam dasar yang tercatat tumbuh 20,2 persen, serta industri tekstil dan pakaian jadi dan sektor alas kaki dan barang kulit

masing-masing tumbuh 8,1 persen dan 13,4 persen. Kinerja perekonomian yang kuat dan selaras dengan kualitas pemulihan ekonomi terus terjaga ditandai juga dengan berlanjutnya perbaikan kondisi ketenagakerjaan tahun 2022. Secara umum, tingkat pengangguran konsisten menurun jika dibandingkan dengan tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi mampu menyerap tenaga kerja hingga 4,25 juta orang dalam kurun sampai dengan bulan Agustus tahun 2022

8. Analisis Pencapaian Sasaran :
Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah serta Pengembangan Desa Mandiri

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA 2022
				TARGET	REALISASI	
1	LPE Kategori Pertanian Kehutanan dan Perikanan	%	4.24	4.49	3.12	69.49
2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	NA	2	7	350.00

Dalam perencanaan pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah, memerlukan bermacam-macam data statistik untuk dasar penentuan strategi dan kebijaksanaan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat, maka dari itu perlu adanya perhitungan analisis yang tepat untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu daerah dalam periode tertentu. Keberhasilan kinerja perekonomian dan pembangunan di suatu daerah tercermin dalam laporan Produk Domestik Regional Bruto yang hingga saat ini secara rutin setiap tahun disusun oleh Diskominfo bekerja sama dengan BPS. Maka dari itu perlu adanya perhitungan secara pasti terhadap perhitungan PDRB di suatu daerah agar pembangunan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan bisnis berbasis usaha di bidang pertanian atau bidang lain yang mendukungnya, baik di sektor hulu maupun di hilir. Penyebutan "hulu" dan "hilir" mengacu pada pandangan pokok bahwa Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan bekerja pada rantai sektor pangan (food supply chain). Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dengan perkataan lain, adalah cara pandang ekonomi bagi usaha penyediaan pangan. Sebagai subjek akademik, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mempelajari

strategi memperoleh keuntungan dengan mengelola aspek budidaya, penyediaan bahan baku, pascapanen, proses pengolahan, hingga tahap pemasaran.

LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Pelalawan Tahun 2022 adalah sebesar 3.12 atau dengan capaian kinerja sebesar 69.49 persen, jika dibandingkan dengan kondisi awal adalah sebesar 4.24 artinya mengalami penurunan sebesar 1.12 persen.

Keberhasilan Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri terletak pada besarnya capaian indikator jumlah desa dengan kategori Mandiri. Yang menjadi dasar dikategorikan Desa Mandiri adalah Permendagri Nomor: 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Penilaian dilakukan dengan mengevaluasi terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kinerja Desa, Desa berbasis Teknologi Informasi/E-Government, Pelestarian Adat dan Budaya, Inovasi, Tanggap dan Siaga Bencana, Pengaturan Investasi, Partisipasi Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Keamanan dan Ketertiban, pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi yg dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa jumlah desa yang dikategorikan Mandiri pada tahun 2022 terealisasi sebesar 33 desa (akumulati). **Untuk Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri Kabupaten Pelalawan** Tahun 2022 adalah sebesar 7 persen atau dengan realisasi capaian sebesar 350.00 persen, jika dibandingkan dengan kondisi awal yakni 2 artinya mengalami jauh peningkatan sebesar 5 persen. Berikut Tabel Desa Pembangunan kategori Desa Mandiri :

**INDEK DESA PEMBANGUNAN KATEGORI DESA MANDIRI
TAHUN 2022**

NO	DESA	KODE DESA	KECAMATAN	NILAI IDM
1	Lubuk Terap	1405112005	Bandar Petalangan	0,9554
2	Angkasa	1405112006	Bandar Petalangan	0,9368
3	Lubuk Kembang Sari	1405012007	Ukui	0,0365
4	Silikuan Hulu	1405012008	Ukui	0,9270
5	Terbangiang	1405112004	Bandar Petalangan	0,9200
6	Tri Mulya Jaya	1405012009	Ukui	0,9190
7	Kuala Semundam	1405012001	Bandar Petalangan	0,9141

8	Ukui II	1405112011	Ukui	0,9043
9	Tambun	1405032003	Bandar Petalangan	0,8992
10	Sialang Bungkok	1405122011	Bandar Petalangan	0,8959
11	Air Terjun	1405122010	Bandar Petalangan	0,8921
12	Bukit Jaya	1405122004	Ukui	0,8878
13	Sialang Godang	1405122007	Bandar Petalangan	0,8849
14	Mulya Subur	1405042006	Pangkalan Lesung	0,8840
15	Lubuk Keranji Timur	1405122009	Bandar Petalangan	0,8729
16	Simpang Beringin	1405122003	Bandar Sei.Kijang	0,8713
17	Makmur	1405122003	Pangkalan Kerinci	0,8711
18	Lubuk Raja	1405022008	Bandar Petalangan	0,8711
19	Beringin Makmur	1405122006	Kerumutan	0,8692
20	Sari Makmur	1405072008	Pangkalan Lesung	0,8670
21	Air emas	1405012002	Ukui	0,8630
22	Bukit Gaja	1405012003	Ukui	0,8616
23	Kampung baru	1405012005	Ukui	08,557
24	Sidomukti	1405032017	Pangkalan Kuras	0,8556
25	Pematang Tinggi	1405072007	Kerumutan	0,8486
26	Lbk Kembang Bunga	1405012006	Ukui	0,8486
27	Genduang	1405042003	Pangkalan lesung	0,8486
28	Terantang Manuk	1405032005	Pangkalan kuras	0,8433
29	Lubuk Ogung	1405112002	Bandar Seikijang	0,8417
30	Muda Setia	1405112004	Bandar Seikijang	0,8227
31	Kiab Jaya	1405112005	Bandar Seikijang	0,8208
32	Bukit Lembah Subur	1405072004	Kerumutan	0,8200
33	Balam Merah	1405082009	Bunut	0,8156

Program yg mendukung tercapainya indikator ini adalah program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan. Disamping Desa Mandiri tentunya juga tidak terlepas dengan desa yang teralirisi Listrik. Jumlah Desa yang teraliri listrik sebanyak 100 (seratus) Desa, sedangkan desa yang belum teraliri listrik sebanyak 4 (empat) desa, Berikut Desa Kabupaten Pelalawan yang teraliri Listrik , Tabel dibawah ini :

RINCIAN DESA YANG TERALIRI LISTRIK
KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA		
		DESA	TERALIRI LISTRIK	BELUM TERALIRI LISTRIK
1	Kec. Bandar Sei Kijang	4	4	-
2	Kec. Langgam	7	7	-
3	Kec. Pangkalan Kerinci	4	4	-
4	Kec. Pelalawan	8	8	-
5	Kec. Bunut	9	9	-
6	Kec. Pangkalan Kuras	16	16	-
7	Kec.Bandar Petalangan	10	10	-
8	Kec. Pangkalan Lesung	9	9	-
9	Kec. Kerumutan	9	9	-
10	Kec. Ukui	11	11	-
11	Kec. Teluk Meranti	8	6	2
12	Kec. Kuala Kampar	9	7	2
JUMLAH		104	100	4

RINCIAN STATUS DESA KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2022

NO	STATUS DESA	JUMLAH	PERSENTASE
1	Mandiri	33	32.04
2	Maju	41	39.81
3	Berkembang	29	28.16
4	Tertinggal	0	0.00
5	Sangat Tertinggal	0	0.00

9. Analisis Pencapaian Sasaran :
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA 2022
				TARGET	REALISASI	
1	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	1.94	2,63	4.71	179.09

LPE Industri Pengolahan mencapai 2,15 triliun pada tahun 2022. Kategori ini diharapkan sebagai penampung output dari sektor primer untuk selanjutnya dapat menghasilkan input bagi seluruh sektor ekonomi baik primer, sekunder maupun tersier. Namun jika dilihat dari kontribusinya, industri pengolahan belum bisa dijadikan salah satu sektor unggulan bagi ekonomi di Kabupaten Pelalawan, karena kontribusinya hanya berada pada kisaran 3-4 persen. Hal ini dikarenakan sebagian besar industri pengolahan di Kabupaten Pelalawan masih berbasis industri mikro kecil, tenaga kerja dan output yang masih minim. Terlebih sejak adanya Pandemi COVID-19, Industri Pengolahan di Kabupaten Pelalawan juga merupakan kategori yang terkena dampak oleh adanya wabah tersebut. Sektor Industri Pengolahan, meliputi: a. Subsektor Industri Migas - Pengilangan Minyak Bumi- Gas Alam Cair (LNG), b. Subsektor Industri Bukan Migas - Makanan, Minuman dan Tembakau - Tekstil, Barang dari Kulit dan Alas Kaki - Barang Kayu dan Produk Lainnya - Produk Kertas dan Percetakan - Produk Pupuk, Kimia dan Karet - Produk Semen dan Penggalian Bukan Logam, - Logam Dasar Besi dan Baja, - Peralatan, Mesin dan Perlengkapan Transportasi - Produk Industri Pengolahan Lainnya.

Industri Pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa Industri /makloon dan pekerjaan perakitan (*assembling*). Jasa industri merupakan kegiatan industri yang melayani keperluan pihak lain. Pada kegiatan ini bahan baku disediakan oleh pihak lain sedangkan pihak pengolah hanya melakukan pengolahannya dengan mendapat imbalan sejumlah uang atau barang sebagai balas jasa (upah makloon), misalnya perusahaan penggilingan padi yang melakukan kegiatan menggiling padi/gabah petani dengan balas jasa tertentu. Perusahaan atau usaha industri adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut

LPE Kategori Industri Pengolahan Kabupaten Pelalawan tahun 2022 adalah sebesar 4.71 atau capaian realisasinya sebesar 179.09 persen.

Jika dibandingkan dengan tahun 2021 adalah sebesar 1.94 , maka pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 2,77 persen. Untuk Perusahaan Industri Pengolahan dibagi dalam 4 golongan yaitu :

1. Industri Besar (banyaknya tenaga kerja 100 orang atau lebih)
2. Industri Sedang (banyaknya tenaga kerja 20-99 orang)
3. Industri Kecil (banyaknya tenaga kerja 5-19 orang)
4. Industri Rumah Tangga (banyaknya tenaga kerja 1-4 orang)

Penggolongan perusahaan industri pengolahan ini semata-mata hanya didasarkan kepada banyaknya tenaga kerja yang bekerja, tanpa memperhatikan apakah perusahaan itu menggunakan mesin tenaga atau tidak, serta tanpa memperhatikan besarnya modal perusahaan itu.

10. Analisis Pencapaian Sasaran : Meningkatnya Kualitas Investasi Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA 2022
				TARGET	REALISASI	
1	Presentase Peningkatan Investasi Daerah	%	5.30	6,5	8.40	129.23

Untuk Memajukan suatu daerah tergantung kepada perkembangan ekonomi pada suatu daerah itu perlu adanya peningkatan investasi pada daerah. Mengukur derajat pencapaian dibidang Investasi dilakukan analisa dan perhitungan investasi, sumber data investasi tersebut terdapat pada Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPSE) dengan cara mengunduh laporan triwulan secara berkala. Peningkatan Investasi memiliki kontribusi sebagai pengungkit terhadap bergerakaknya pembangunan ekonomi suatu daerah. Sebagian ahli ekonomi memandang pembentukan investasi merupakan faktor penting yang memainkan peran strategis terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu Daerah. Ada beberapa anggapan mengenai manfaat investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Daerah yaitu :

1. Investasi akan menciptakan perusahaan-perusahaan baru, memperluas pasar atau merangsang penelitian dan pengembangan teknologi lokal baru.

2. Investasi akan meningkatkan daya saing industry ekspor, dan merangsang ekonomi local melalui pasar kedua (sector keuangan) dan ketiga (sector jasa/pelayanan).
3. Investasi akan meningkatkan pajak pendapatan dan menambah pendapatan daerah/Nasional, serta memperkuat nilai mata uang untuk pembiayaan impor.

Investasi merupakan salah satu faktor yang menentukan laju pertumbuhan ekonomi. Suatu daerah akan berkembang secara dinamis jika investasi yang dikeluarkan jauh lebih besar dari nilai penyusutan faktor-faktor produksinya. Daerah yang memiliki investasi yang lebih kecil dari pada penyusutan faktor produksinya akan cenderung mengalami pereconomian yang stagnasi. Meningkatnya investasi akan menjamin kontinuitas pembangunan ekonomi, menyerap tenaga kerja dan menekan kemiskinan yang muaranya akan memacu perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Oleh karena itu guna menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing peningkatan realisasi investasi harus menjadi salah satu perhatian Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan.

Capaian Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Investasi Daerah Kabupaten Pelalawan tahun 2022 adalah sebesar 8.40 atau dengan realisasi capaian sebesar 129.23 persen, dengan Kretaria capaian **“Sangat Baik ”**, Realisasi Pertumbuhan Investasi mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan capaian kondisi Awal/sebelumnya artinya mengalami kenaikan sebesar 3.10 persen, pada tahun 2022 capaian pertumbuhan investasi PMA dan PMDN sebesar 8.40 persen atau sebesar Rp.25.363.407310.000. Program yang mendukung atas keberhasilan Indikator Kinerja tersebut yakni : Program pengembangan iklim penanaman modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Perbandingan Keberhasilan atas Indikator Kinerja tersebut dengan Pemerintah Provinsi dan Nasional. Secara Nasional berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang diterima Kementerian Investasi/BKPM dari perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). "Pada kuartal tiga ini, realisasi PMDN di Indonesia mencapai Rp.113,5 triliun dan PMA Rp.103,2 triliun, total keduanya Rp.216,7 triliun,". Capaian realisasi investasi PMA dan PMDN Provinsi Riau Tahun 2021 sebesar Rp.53,05 triliun atau 108,05 persen, dibandingkan dengan sebesar Rp.49,1 triliun, target realisasi investasi tahun

2021, dari jumlah investasi tersebut Kabupaten Pelalawan Meraih **Peringkat Pertama di Propinsi Riau**.

**11. Analisis Pencapaian Sasaran :
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat**

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA 2022
				TARGET	REALISASI	
1	Tingkat Kemiskinan	%	9,16	8,23	8,97	91.75

Kemiskinan merupakan permasalahan yang muncul hampir di setiap daerah. Masalah kemiskinan ini menjadi suatu tantangan bagi daerah karena menyangkut eksistensi dari hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak sebagai hak dasar manusia. Kemiskinan terjadi karena adanya keterbatasan akses masyarakat dalam kegiatan sosial ekonomi. Peningkatan akses ekonomi bagi masyarakat terutama untuk masyarakat miskin dapat membantu mempercepat pengentasan kemiskinan. Kabupaten Pelalawan terus mengupayakan peningkatan akses ekonomi bagi masyarakat miskin dengan meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat serta pemerataan pendapatan masyarakat.

Adapun Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pelalawan tahun 2022 adalah 8,97 atau dengan capaian realisasinya sebesar 91.75 persen jika dibandingkan dengan kondisi awal/sebelumnya adalah sebesar 9,16 persen, artinya capaian kinerjanya mengalami kenaikan sebesar 0.19 persen. Artinya Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pelalawan untuk tahun 2022 mengalami persentase penurunan sebesar 0.19 persen. Sebagai perbandingan Propinsi Riau Tingkat Kemiskinannya adalah capainnya sebesar 6,84 persen dan Tingkat Kemiskinan secara Nasional adalah sebesar 9,57 persen

Untuk Tingkat keberhasilan dan realisasi pada program perlindungan dan jaminan sosial mencapai 82,26%, program Rehabilitasi Sosial 33,88% dan Program Pemberdayaan Sosial 94,84% dengan indicator kinerjanya yaitu Persentase PMKS yang Dapat Memenuhi Kebutuhan Dasarnya, Persentase PMKS yang Dapat Melaksanakan Fungsi Sosialnya Secara Wajar dan Persentase PMKS yang Dapat Memenuhi Kebutuhan Dasarnya Secara Mandiri.

Program yang mendukung atas keberhasilan Indikator Kinerja adalah 1). Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan

Sosial Kesejahteraan Keluarga), 2).Program Rehabilitasi Sosial (Sub Kegiatan Pemberian Bantuan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat), 3).Program Pemberdayaan Sosial (Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota)

Adapun yang menjadi hambatan dan kendala yakni keterbatasan SDM dalam Pendataan, Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan sehingga membutuhkan waktu yang cukup panjang dalam penyelesaiannya sampai dengan Penetapan Penerima Bantuan, Proses Penyusunan regulasi untuk calon penerima bantuan membutuhkan tahapan-tahapan yang memakan waktu.

Strategi peningkatan akses ekonomi bagi masyarakat miskin merupakan strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dalam meningkatkan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan masyarakat. Peningkatan kesempatan kerja ini dilakukan untuk mengurangi pengangguran terutama untuk angkatan kerja, yang didukung dengan peningkatan kualitas angkatan kerja serta memperluas lapangan pekerjaan. Peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat juga terus diupayakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan untuk mendukung percepatan pengentasan kemiskinan, melalui pemberian jaminan perlindungan sosial dan kualitas kehidupan masyarakat. Melalui strategi percepatan pengentasan kemiskinan ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan terus mengupayakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tingginya angka kemiskinan di Pelalawan jika dibandingkan dengan daerah sekitar di Provinsi Riau menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk melakukan percepatan dalam pengentasan kemiskinan. Sebagai permasalahan yang multidimensi, kemiskinan tidak bisa dilihat dari sudut pandang satu arah, namun beberapa fokus mampu menjadikan satu benang merah dalam mengurangi angka kemiskinan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan namun memiliki bobot tinggi dalam pengentasan kemiskinan adalah pendidikan anggota rumah tangga, *culture mindset*, dan paling penting adalah kesempatan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

INDIKATOR KEMISKINAN KABUPATEN PELALAWAN, 2022

NO	INDIKATOR KEMISKINAN	2022
1	Persentase Penduduk Miskin	9.63
2	Jumlah Penduduk Miskin	49.30
3	Garis Kemiskinan	618.738
3	Indeks Kedalaman Kemiskinan	1.45
4	Indeks Keparahan Kemiskinan	0.32

Fokus tersebut akan mampu memutus rantai kemiskinan dengan cara mengembangkan sektor perekonomian yang memberikan *multiflier effect* bagi peningkatan ekonomi masyarakat dan memberikan akses bahan pangan secara baik seperti mengupayakan food estate, pembangunan sektor perikanan, pembangunan pembibitan peternakan, memberikan akses pupuk gratis pada sektor perkebunan dan pertanian, pendirian pusat konveksi dan percetakan, memfasilitasi pendidikan, pelatihan dan kesadaran akan berwirausaha dan pemberdayaan, terutama pada masyarakat miskin. Dengan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada sektor ekonomi diharapkan cara pandang dan cara berfikir masyarakat akan menjadi lebih maju dan berkembang.

12. Analisis Pencapaian Sasaran :

Meningkatnya Kesempatan Kerja Bagi Masyarakat

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA 2022
				TARGET	REALISASI	
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,99	5,33	2.73	195.23

Pemerintah Provinsi Riau mengklaim angka pengangguran terbuka di Provinsi Riau tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 1,15 persen dari tahun 2021.Pada tahun 2022 angka pengangguran terbuka di Provinsi Riau tahun 2022 turun menjadi 4,42 persen dari tahun sebelumnya 5,57 persen."Namun sayangnya penurunan angka pengangguran terbuka di Riau tidak merata di seluruh kabupaten/kota, penurunan angka pengangguran terjadi terutama di daerah yang banyak investasi, seperti **Pelalawan** karena di sana dimotori oleh PT RAPP. Kemudian di Kota Dumai, karena di sana terdapat kawasan industri. Lalu di Kabupaten Bengkalis setelah adanya alih kelola pengelolaan migas oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). Artinya problem kabupaten/kota lainnya masih

ada. Contoh Pekanbaru, tekanan persoalan sosial pengangguran ini cukup tinggi. Termasuk di daerah pesisir yang jarang ada investor, seperti yang kita ketahui pengangguran tertinggi di Kepulauan Meranti. Untuk itu mengajak seluruh perusahaan di Riau agar pengangguran terbuka ini menjadi perhatian bersama. Sebab jika pemerintah dan swasta tidak berkolaborasi dan bekerjasama, maka pengurangan angka pengangguran tidak bisa dilakukan. Begitu juga Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (**TPAK**) merupakan suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam suatu wilayah. Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja yaitu penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, pensiunan atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase jumlah Angkatan Kerja terhadap Jumlah Penduduk Usia 15 tahun keatas. TPAK sama dengan Jumlah Angkatan Kerja dibagi dengan Jumlah Penduduk usia 15 tahun keatas dikalikan 100. Semakin Tinggi Tingkat TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula tingkat pasokan tenaga kerja untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menggambarkan bahwa kebutuhan akan pekerjaan yang tinggi, hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan pendapatan yang rendah serta meningkatnya jumlah tanggungan keluarga, sehingga penduduk usia kerja lebih memilih dunia kerja dibanding bersekolah dan mengurus rumah tangga. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pelalawan tahun 2022 berdasarkan data yang diperoleh Badan Pusat Statistik, sebesar 69,18 yang ditetapkan sebesar 70,00 persen. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan adalah jumlah Angkatan Kerja pada periode Agustus 2022 tercatat sebanyak 252.000 orang pada tahun 2022 bertambah secara absolut sebanyak 15.000 orang dibanding Agustus 2021 berjumlah 237.000 orang . Kenaikan persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK Kabupaten Pelalawan mengalami peningkatan yaitu dari 68,21 persen ditahun 2021 menjadi 69,18 persen pada tahun 2022. Peningkatan TPAK mengidentifikasi adanya peningkatan potensi ekonomi dari sisi pasokan tenaga kerja di Kabupaten Pelalawan. Jika dibandingkan dengan kondisi TPAK Pada level provinsi, pada tahun 2018-2022 TPAK Kabupaten Pelalawan **masih lebih tinggi**. Untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) digunakan untuk melihat

seberapa banyak angkatan kerja yang tidak mampu diserap oleh lapangan usaha yang tersedia.

Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pelalawan tahun 2022 adalah sebesar 2,73 persen atau dengan realisasi capaian sebesar 195.23 persen, jika dibandingkan dengan kondisi awal adalah sebesar 5.99 persen, Artinya Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pelalawan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 3.26 persen, (195.23 persen) artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) terdapat sekitar 2 (dua) orang yang merupakan pengangguran. Jika dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka pada level Propinsi, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pelalawan selama kurun waktu 2018-2022 cenderung lebih rendah. Meskipun tergolong rendah, namun tetap diperlukan kehatian-hatian menyikapi naik turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tersebut. Adanya pengangguran terbuka mengidentifikasi masih terdapat masyarakat yang belum optimal memanfaatkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya sehingga perlu mendapatkan perhatian dalam upaya menekan jumlah pengangguran dan meningkatkan produktifitas sumber daya manusia (SDM) yang ada. Program yang mendukung atas keberhasilan capaian kinerja TPAK yakni Program Peningkatan Kuantitas Tenaga Kerja dan Program Peningkatan Kesempatan Kerja. Adapun salah satu upaya untuk menekan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang terlalu tinggi adalah dengan mengembalikan usia sekolah ke bangku pendidikan sehingga saat menamatkan pendidikan telah memiliki keahlian baik secara akademis maupun ketrampilan tambahan lainnya yang dapat meningkatkan daya saing untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, layak sesuai dengan permintaan pasar kerja. Sebagai kendala dan hambatan dalam pencapaian Indikator TPAK adalah Pandemi Covid-19 sehingga terjadi peningkatan jumlah angka Pengangguran Terbuka terlihat dari meningkatnya jumlah penduduk usia kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja karena penyedia lapangan kerja membatasi dan mengurangi aktifitas usaha mereka, Namun disisi lain kelompok penduduk yang tergolong usia kerja tidak juga melakukan aktifitas yg aktif secara ekonomi, hal ini terlihat dari meningkatnya penduduk usia kerja yang termasuk kategori bukan angkatan kerja.

13. Analisis Pencapaian Sasaran : Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA 2022
				TARGET	REALISASI	
1	Penurunan Indeks Gini	Poin	NA	0,005	0,012	240.00
2	Indeks Pengeluaran	%	76.40	76,62	76.12	99.35

Indikator Indeks Gini Kabupaten Pelalawan Tahun 2022 adalah sebesar 0,012 atau dengan realisasi capaian sebesar 240.00 persen.

Jika dibandingkan dengan Indeks Gini Propinsi Riau tahun 2022 sebesar 0,327, Secara Nasional Nilai Indeks Gini mengalami fluktuasi dan mulai mengalami penurunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran. Namun demikian akibat adanya pandemi Covid-19 selama lebih kurang 3 (tiga) tahun terakhir ini. nilai Indeks Gini kembali mengalami kenaikan . Berdasarkan daerah tempat tinggal, Indeks Gini di daerah perkotaan tahun 2021 adalah sebesar 0,367. Sedangkan Indeks Gini Daerah Pedesaan adalah sebesar 0,276.

Kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual dan sosial masyarakat agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri semaksimal mungkin. Kesejahteraan sosial ini merupakan suatu keadaan ideal yang diinginkan oleh setiap masyarakat. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui berbagai kebijakan yang dirumuskan. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat harus dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Pelalawan. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari tingkat kemiskinan pada daerah tersebut. Upaya dalam menurunkan tingkat kemiskinan dapat mendorong terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat merupakan tujuan dari misi kedua, yaitu mewujudkan kemakmuran ekonomi di perkotaan dan perdesaan yang mandiri dan berdaya saing (Maju Ekonomi). Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran dan indikator pembangunan yang harus dicapai yaitu: a. Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat dengan indikator Tingkat Pengangguran

Terbuka; b. Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dengan indikator: • Penurunan Indeks Gini; • Indeks

Pada tahun 2022 besarnya Index Pengeluaran Kabupaten Pelalawan adalah sebesar 76,12 atau dengan realisasi capaian 99.35 persen. Jika dibandingkan dengan kondisi awal adalah 76.40, maka Indeks Pengeluaran Kabupaten Pelalawan mengalami penurunan sebesar 0.28 persen.

**14. Analisis Pencapaian Sasaran :
Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Berkelanjutan**

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA 2022
				TARGET	REALISASI	
1	Peningkatan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Poin	2.48	1,5	1.5	100.00

Infrastruktur merupakan input penting bagi kegiatan produksi dan dapat memengaruhi kegiatan ekonomi dalam berbagai cara baik secara langsung maupun tidak langsung. Infrastruktur tidak hanya merupakan kegiatan produksi yang akan menciptakan output dan kesempatan kerja, namun keberadaan infrastruktur juga memengaruhi efisiensi dan kelancaran kegiatan ekonomi di sektor-sektor lainnya.

Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Kabupaten Pelalawan Tahun 2022 adalah sebesar 1.5 atau dengan realisasi capaian sebesar 100 persen, jika dibandingkan pada kondisi awal atau tahun sebelumnya jauh lebih meningkat yakni sebesar 2.48. Infrastruktur yang merupakan fasilitas yang dikembangkan untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam hal pelayanan publik tidak dapat berfungsi sendiri-sendiri dan terpisah. Keterpaduan tersebut menentukan nilai optimasi pelayanan infrastruktur itu sendiri. Infrastruktur memiliki sifat eksternalitas. Berbagai infrastruktur seperti jalan, pendidikan kesehatan dan sebagainya memiliki sifat eksternalitas positif. Memberikan dukungan bahwa fasilitas yang diberikan oleh berbagai infrastruktur merupakan eksternalitas positif yang dapat meningkatkan produktivitas semua input dalam proses produksi. Pembangunan infrastruktur diharapkan menjadi salah satu pendorong pemerataan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pelalawan, sehingga dapat

mengurangi kesenjangan wilayah perkotaan dan perdesaan," Pada Tahun 2022 pembangunan infrastruktur menjadi prioritas. Dengan Harapan program ini dapat mengakselerasi pemulihan kondisi sosial dan mempercepat kebangkitan ekonomi. Penganggaran pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pelalawan menempati alokasi anggaran cukup besar dari sumber dana APBD Kabupaten Pelalawan, maupun dana dari Pusat. Indeks Kualitas Infrastruktur merupakan indikator yang mengukur tingkat kinerja pembangunan infrastruktur Kabupaten Pelalawan, perhitungan indeks kualitas infrastruktur berdasarkan tiga komponen perhitungan yakni ; (a) Indeks Infrastruktur Bina Marga dengan besaran 50 persen yang dihitung adalah Panjang Jalan Kabupaten dalam keadaan baik dengan rata-rata 40km/jam, (b) Indeks Infrastruktur Sumber daya Air dengan besaran 10 persen adalah menghitung panjang jaringan air, dan (c) perhitungan dari cipta karya 10 persen yang meliputi jumlah bangunan gedung pemerintahan atau fasilitas umum dalam kondisi baik. Adapun Program yang mendukung atas Indikator tersebut adalah Program Penyelenggaraan Jalan pada Kegiatan Penyelenggaraan jalan Kabupaten/Kota dengan indikator pajang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi jalan mantap .

15. Analisis Pencapaian Sasaran :
Meningkatnya Kualitas Penyediaan Infrastruktur Dasar
Kepada Masyarakat

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA 2022
				TARGET	REALISASI	
1	Peningkatan Indeks Konektivitas Wilayah	Poin	NA	2,50	2.50	100.00
2	Rasio Pemukiman Layak Huni	%	76.32	78,82	81,32	103.17

Konektivitas merupakan hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya, baik berupa fisik, operasional, maupun indikator lain yang dapat dihubungkan, Indeks konektivitas berarti daerah atau wilayah yang dihubungkan oleh jaringan jalan memiliki pola untuk mengetahui interaksi suatu wilayah. Indeks konektivitas ditandai oleh kondisi jaringan jalan merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui kekuatan interaksi di

suatu wilayah dengan mempertimbangkan jalan dan simpul yang ada. Target indikator konektivitas wilayah pada tahun 2022 sebesar 2,5.

Peningkatan Indeks Konektivitas Wilayah Kabupaten Pelalawan

Tahun 2022 adalah sebesar 2.5 atau dengan realisasi capaian sebesar 100 persen. Jauh lebih meningkat dibandingkan dengan kondisi awal. Perhitungan capaian kinerja konektivitas berdasarkan kondisi jalan (1.137.475 KM) berdasarkan panjang jalan Kabupaten dengan kondisi baik yaitu sebesar 440.268 KM, Panjang dengan kondisi sedang sebesar 512.076 KM, Panjang jalan Kondisi rusak ringan sepanjang 83.525 KM dan Panjang Jalan Kondisi Rusak Berat sepanjang 102.349 Km.

Indeks konektivitas wilayah mendukung kegiatan masyarakat di Kabupaten Pelalawan seperti akses pendidikan, kesehatan dan perekonomian suatu wilayah, dalam kedepannya upaya dalam peningkatan kinerja indeks konektivitas wilayah, dilakukan yakni ;

1. Memprioritaskan kondisi jalan poros kabupaten yang menghubungkan dengan ibu kota provinsi dan kabupaten dalam kondisi baik.
2. Membuat perencanaan yang kolaboratif dalam pengembangan konektivitas wilayah dalam mendukung keberadaan desa maju.

Rasio Pemukiman Layak Huni Kabupaten Pelalawan Tahun 2022 yakni sebesar 81,32 atau realisasi sebesar 103.17 persen. Jika dibandingkan dengan kondisi awal maka Rasio Pemukiman Layak Huni untuk Kabupaten Pelalawan jauh lebih meningkat yakni sebesar 76.32, artinya mengalami kenaikan pada tahun sebesar 5.00 persen.

Rasio Pemukiman Layak Huni tersebut memenuhi persyaratan yakni : 1. Persentase Rumah Tidak Layak Huni 2. Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh 3. Rasio Jumlah Pemukiman Layak Huni terhadap Jumlah Rumah. Penilaian terhadap kualitas rumah hunian yang mengadopsi indikator dari SDG's, terdiri atas empat indikator penyusun yaitu antara lain kelayakan : a. Ketahanan Bangunan : dilihat berdasarkan jenis atap, dinding, lantai yang digunakan b. Akses air minum c. Akses sanitasi d. Kepadatan Hunian (Luas lantai per kapita) Jika salah satu dari empat indikator tersebut diatas terdapat indikator yang tidak layak, maka dikategorikan rumah tersebut menjadi rumah tidak layak huni.

Rumah yang layak huni (RLH) adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni (UU No 1 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu kualitas fisik rumah dan kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar.

Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Keselamatan bangunan Persyaratan keselamatan bangunan meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur dan kualitas komponen non struktur bangunan. Komponen struktur meliputi pondasi, sloof, kolom, balok, & rangka atap. Komponen non struktur bangunan meliputi lantai, dinding, kusen dan daun pintu serta jendela, dan penutup atap.
2. Kesehatan penghuni Persyaratan kesehatan penghuni meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana penghawaan, pencahayaan, akses sanitasi layak, dan akses air minum layak. Sarana penghawaan minimal 5% (lima persen) dari luas lantai bangunan berupa bukaan jendela dengan memperhatikan sirkulasi udara. Sarana pencahayaan minimal 10% (sepuluh persen) dari luas lantai bangunan dengan memperhatikan sinar matahari. Akses sanitasi layak meliputi bangunan sebagai sarana mandi cuci kakus beserta septictank yang layak, tempat sampah, saluran pembuangan air kotor, dan sistem pembuangan air limbah. Akses air minum layak meliputi pemenuhan akses air minum yang terkoneksi dengan sistem sanitasi di dalam bangunan.
3. Kecukupan minimum luas bangunan Persyaratan kecukupan minimum luas bangunan meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per orang untuk kenyamanan hunian. Kecukupan minimum luas per orang dihitung 9 meter persegi dengan tinggi ruang minimal 2,8 meter. Pemenuhan luasan rumah memperhatikan ketersediaan lahan dan

kemampuan berswadaya. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Kota Singkawang selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Rumah Layak Huni : rumah tangga diklasifikasikan memiliki akses terhadap hunian/rumah layak huni apabila memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu:

- 1). Kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m2 per kapita (sufficient living space)
- 2). Memiliki akses terhadap air minum layak
- 3). Memiliki akses terhadap sanitasi layak
- 4). Ketahanan bangunan (durable housing), yaitu atap terluas berupa beton/ genteng/ seng/ kayu/ sirap; dinding terluas berupa tembok/ plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan dan batang kayu; dan lantai terluas berupa marmer/ granit/ keramik/ parket/vinil/karpet/ ubin/tegel/teraso/ kayu/papan/ semen/bata merah.

16. Analisis Pencapaian Sasaran :
Meningkatnya Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA 2022
				TARGET	REALISASI	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	63,54	65,96	69.20	104.91

Seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan pesatnya pembangunan, meningkatkan populasi jumlah penduduk dan berkembangnya teknologi yang berdampak pada tingginya kebutuhan akan barang dan jasa akan menyebabkan meningkatkan kuantitas produksi, Peningkatan kuantitas produksi berdampak pada peningkatan eksploitasi sumber daya alam. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dapat merusak dan menurunkan kualitas lingkungan. Tinggi nya beban pencemar menurunkan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang pada akhirnya menurunkan kualitas hidup masyarakat sendiri. Kabupaten Pelalawan memiliki banyak potensi yang memengaruhi kualitas lingkungan hidup, baik kualitas air, kualitas udara, maupun kualitas lahan. Potensi yang memengaruhi kualitas

lingkungan hidup adalah industri *pulp* dan kertas, industri minyak kelapa sawit, pariwisata, peternakan, pertanian, perkebunan, rumah sakit, tempat penginapan, hutan tanaman industri, permukiman, kendaraan bermotor, beban air limbah dan limbah B3, fasilitas pengolahan air minum, dan timbunan sampah. Setiap potensi tersebut dapat menimbulkan potensi air limbah, potensi emisi udara, dan mengubah tutupan lahan.

Untuk mengukur kualitas lingkungan hidup, diperlukan suatu indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat dijadikan bahan informasi dalam rangka pengambilan kebijakan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Pelalawan dalam upaya pengendalian lingkungan hidup adalah dengan melaksanakan kegiatan identifikasi dan pemantauan terhadap komponen lingkungan seperti udara, air, dan tutupan lahan, melalui perhitungan IKLH yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pelalawan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2022. Indikator kinerja pengelolaan hidup tersebut adalah indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Nilai IKLH dihitung berdasarkan 3 (tiga) indeks, yaitu indeks Kualitas Air (ika); indeks Kualitas Udara (IKU); dan indeks Kualitas Lahan (IKL) yang diukur berdasarkan tutupan vegetasi hutan dan vegetasi non hutan serta faktor koreksi yaitu kanal dan luasan area terbakar.

Pada Tahun 2022 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan adalah sebesar 69.20 atau realisasi capaian sebesar 104.91 persen. Jika dibandingkan kondisi awal (RPJMD) yakni 63,54 artinya mengalami kenaikan sebesar 5.66 persen. Adapun Indeks atau Indikator merupakan sarana yang digunakan untuk mereduksi banyaknya data dan informasi sehingga menjadi bentuk yang paling sederhana namun esensinya tetap dapat dipertahankan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat tentang suatu kondisi dan mutu lingkungan hidup pada ruang dan periode tertentu. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ini dapat menjadi acuan dalam proses pengambilan kebijakan karena menjadi salah satu indikator pembangunan. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Pelalawan berada dalam kategori

SEDANG, karena berada dalam rentang nilai 50-69,9. Berikut rincian capaian IKLH Kabupaten Pelalawan Tahun 2022

**RINCIAN CAPAIAN DAN TARGET IKLH KABUPATEN PELALAWAN
TAHUN 2022**

NO	INDEKS	TARGET	CAPAIAN
1	Indeks Kualitas Air	52.03	55.25
2	Indeks Kualitas Udara	78.26	81.30
3	Indeks Kualitas Lahan	67.14	70.79
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65.96	69.20

Pencapaian Nilai yang sudah melebihi dari target sebaiknya dapat ditingkat mengingat target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terus meningkat sesuai dengan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SE.4/Menlhk/Sekjen/KUM.1/4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan. Dalam menjaga dan meningkatkan IKLH di Kabupaten Pelalawan diperlukan berbagai upaya dan strategi dengan melibatkabn seluruh Instansi. Lembaga dan Unsur Pemerintah Daerah serta Masyarakat sehingga kualitas lingkungan akan meningkat dan tetap dapat mendukung kehidupan masyarakat di masa sekarang dan yang akan datang. Strategi Peningkatan IKLH dapat dilakukan melalui beberapa upaya sebagai berikut :

a. Strategi Peningkatan Kualitas Air , Upaya yang dilakukan :

1. Melakukan Identifikasi dan inventarisasi sumber pencemaran air dari berbagai aktivitas.
2. Melakukan pemberian informasi dan sosialisasi mengenai pengendalian pencemaran air permukaan kepada masyarakat dan pelaku usaha/industry.
3. Menurunkan beban pencenar pada sumber pencemar, baik sumber pencemar institusi dan non institusi.
4. Melakukan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terutama berkaitan dengan pembuangan air limbah ke permukaan, baik air limbah domestic dan air limbah industry.

5. Memulihkan kualitas air di badan air (pemurnia kualitas air dan perbaikan hidromorfologi)
6. Melakukan Pemantauan kualitas air yang masuk ke badan sungai secara terus menerus serta melakukan analisis kualitas air yang masuk atau berada disekitar aliran sungai secara periodic
7. Melakukan penataan sanitasi dengan membuat IPAL, terpadu pada permukiman padat penduduk disekitar bantaran sungai.
8. Mengurangi buangan sampah domestic kesungai & mengubah TPA yg masih menerapkan metode open dumping menjadi sanitary land fill.

b. Strategi Peningkatan Kualitas Udara ,Upaya yang dilakukan :

- 1.Melakukan pemantauan sumber-sumber pencemar dan melakukan perhitungan beban emisi
2. Mengendalikan kebakaran lahan dan hutan sebagai sumber emisi dari asap yang ditimbulkannya.
3. Meningkatkan pengawasan dan monitoring secara berkala terhadap mesin-mesin kendaraan serta pabrik-pabrik yang menghasilkan emisi.
4. Memperluas ruang terbuka hijau dipermukiman dan sekitar jalan untuk mengurangi emisi.

c. Strategi Peningkatan Kualitas Lahan , Upaya yang dilakukan :

1. Memberi peran kepada pemerintah kampung/kelurahan untuk mengelola sumber daya alam dan kelestarian lingkungan.
2. Meningkatkan tutupan lahan melalui rehabilitas hutan peningkatan tutupan vegetasi diperkotaan dan sepanjang jalan rehabilitasi lahan kritis dan terlantar, pengendalian kerusakan ekosistem, pemulihan ekosistem gambut, pemulihan tutupan laha/hutan dan peningkatan jumlah taman kota.
3. Mempertahankan tegakan hutan alam yang masih ada.
4. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pengelolaan Kawasan hutan.
5. Meningkatkan jumlah dan luas ruang terbuka hijau dan,
6. Membangun komitmen penegakkan hukum dengan berbagai pihak yang dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dibidang kehutanan.

17. Analisis Pencapaian Sasaran :
Meningkatnya Pariwisata Daerah melalui Pemajuan Budaya Melayu

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA 2022
				TARGET	REALISASI	
1	LPE Sektor Pariwisata	%	NA	2	13.43	671.50

Indikator LPE Sektor Pariwisata Kabupaten Pelalawan tahun 2022 adalah sebesar 13.43 atau capaian kinerjanya sebesar 671.50 persen. Jika dibandingkan dengan kondisi awal jauh mengalami kenaikan, yakni sebesar 13.43 persen. Sektor pariwisata menjadi peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah serta menjadi tumpuan pemerintah dalam pengembangan potensi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan terus berupaya untuk mengembangkan sektor pariwisata yang berbasis pada kebudayaan daerah. Peningkatan daya saing pariwisata dan ketahanan budaya daerah sebagai strategi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan didukung dengan pembangunan objek dan destinasi wisata serta memajukan budaya melayu sebagai jati diri masyarakat.

Pengembangan pariwisata Pelalawan bertumpu pada pengembangan ekowisata dengan aktivitas wisata utama adalah wisata air, mengamati flora fauna dan *surfing*. Dalam upaya meningkatkan manfaat yang diterima oleh masyarakat dari sektor pariwisata serta membuka peluang kerja, maka diversifikasi daya tarik wisata, dengan membuka daya tarik alam, desa dan budaya masyarakat perlu dikembangkan. Strategi pengembangan keragaman daya tarik sebaiknya dikembangkan sehingga memiliki keragaman yang komplit, seperti daya tarik wisata sungai, daya tarik wisata daratan, daya tarik wisata desa dan budaya. Dengan demikian wisatawan akan didorong untuk kembali lagi berkunjung ke Pelalawan untuk mencari pengalaman lain. Oleh karena itu strategi pengembangan keragaman daya tarik harus diikuti dengan strategi peningkatan moda transportasi dan fasilitas wisata lainnya guna akselerasi kunjungan wisatawan ke daya tarik wisata baru. Keragaman daya tarik akan meningkatkan lama tinggal wisatawan Pelalawan pada umumnya.

Strategi peningkatan daya saing pariwisata dan ketahanan budaya daerah merupakan strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dalam

meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata serta meningkatkan kualitas masyarakat yang berbudaya. Strategi ini didukung dengan pembangunan objek dan destinasi wisata serta memajukan budaya melayu sebagai jati diri masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan pariwisata daerah melalui pemajuan budaya melayu di Kabupaten Pelalawan.

Kabupaten Pelalawan cukup banyak tersimpan potensi wisata alam yang belum mendapat sentuhan yang benar dan tepat, mulai dari potensi wisata cagar alam Taman Nasional Tesso Nilo, wisata air fenomena alam selancar Bono yang eksotis, dan wisata budaya serta lainnya. Apabila mendapatkan penanganan yang tepat akan dapat membangkitkan pergerakan ekonomi bagi masyarakat. Konsep pengembangan pariwisata dimulai dengan menetapkan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) di Kabupaten Pelalawan antara lain:

- KSPD Teluk Meranti
- KSPD Tesso Nilo
- KSPD Istana Sayap Pelalawan
- KSPD Danau Kajuik Pelalawan
- KSPD Desa Betung dan Pusat Budaya Petalangan
- KSPD Hutan Suaka Marga Satwa Kerumutan

Setelah penetapan KSPD, dibentuk zonasi yang bertujuan untuk melindungi sumber-sumber daya alam dan untuk memberikan keragaman pengalaman bagi wisatawan berkunjung bagi para wisatawan. Berdasarkan jarak antar lokasi wisata, maka zona-zona yang diusulkan adalah:

a. **Zona Danau Kajuik-Istana Sayap.** Zona ini dirancang untuk mempermudah wisatawan untuk berkunjung dari satu destinasi wisatawan ke destinasi yang lain sehingga pengunjung diharapkan mampu mendapatkan pengalaman yang lebih tidak hanya bisa melihat peninggalan sejarah tentang kerajaan Pelalawan tetapi juga bisa menikmati keindahan Danau kajuid

b. **Zona Pusat Budaya Petalangan-Tugu Equator-Taman Nasional Tesso Nilo.** Zona ini yang dirancang untuk menerima kunjungan wisatawan yang ingin mengetahui budaya masyarakat Petalangan yang merupakan masyarakat suku asli Pelalawan, kemudian juga bisa melihat Tugu Equator dan wisatawan bisa mengunjungi Taman Nasional Tesso Nilo untuk melihat kekayaan flora fauna di Pelalawan

c. **Zona wisata Bono -Taman Suaka Marga Satwa.** Zona yang dirancang untuk menerima kunjungan wisatawan yang ingin melihat dan merasakan wisata Bono juga bisa melihat keindahan alam yang terdapat di Taman Suaka marga Satwa kerumutan. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat penting karena merupakan salah satu sumber devisa negara dan mampu memberikan sumbangan yang cukup signifikan bagi suatu pembangunan. Pengembangan pariwisata daerah terus dikembangkan sesuai dengan potensi yang dimiliki masing –masing daerah. Pengembangan pariwisata di Kabupaten Pelalawan dilakukan berbasis pada kebudayaan lokal, yaitu dengan pemajuan kebudayaan melayu. Pengembangan pariwisata ini terus dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata serta terus melestarikan kebudayaan lokal yang ada.

Meningkatkan pariwisata daerah melalui pemajuan budaya melayu merupakan tujuan dari misi keempat, yaitu mengembangkan pariwisata daerah berbasis partisipasi masyarakat dan budaya melayu sebagai perekat negeri (Maju Wisata & Budaya). Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran dan indikator pembangunan yang harus dicapai yaitu :

- a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata dengan indikator Pajak Restoran, Hiburan, Hotel (Rp. Juta);
- b. Meningkatnya kualitas masyarakat yang berbudaya dengan indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan.

18. Analisis Pencapaian Sasaran :
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Wisata

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA 2022
				TARGET	REALISASI	
1	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD (pajak Restoran, Hiburan, Hotel, Objek Wisata)	(Rp.Juta)	5.584	9.344	10.341	110.67

Sektor Pariwisata merupakan sektor yang dominan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Pariwisata Indonesia sudah dikenal oleh wisatawan di beberapa negara di dunia. Pariwisata dapat menjadi industri andalan untuk daerah yang tidak memiliki sumber daya alam migas. Pembangunan pariwisata merupakan

kegiatan dan usaha yang terkoordinasi untuk menarik wisatawan, menyediakan semua sarana dan prasarana serta fasilitas yang diperlukan dalam melayani permintaan wisatawan. Dewasa ini Kabupaten Pelalawan sedang giat-giatnya mengembangkan potensi pariwisata dan budaya daerah. Adapun Wisata unggulan yang menjadi ikon Kabupaten Pelalawan adalah Wisata Bono yang terdapat di Kecamatan Teluk Meranti disamping wisata lainnya seperti Objek wisata Istana Sayap di Kecamatan Pelalawan, Tugu Equator di Kecamatan Pangkalan Lesung, Danau Betung di Kecamatan Pangkalan Kuras dan Danau Tajwid di Kecamatan Langgam dan lain-lain. Objek wisata Kabupaten Pelalawan dapat dilihat dari jenis potensi wisata antara lain wisata alam/wisata buatan, wisata seni budaya dan wisata sejarah yang menyebar keseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan. Semakin berkembangnya pariwisata di Kabupaten Pelalawan juga akan mempengaruhi perekonomian masyarakat disekitarnya dan kecamatan pada umumnya yang terpenting lagi terhadap Kabupaten Pelalawan dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi simbol kemandirian suatu daerah, oleh karena itu mulai tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, merancang target PAD dari berbagai sektor. Salah satu dasarnya Sektor Pendapatan Pariwisata. Menurut Windayani dan Budhi (2017) terdapat efek langsung dari pengeluaran yang dikeluarkan oleh wisatawan contohnya adalah dapat menghasilkan pendapatan untuk bisnis dan rumah tangga, pendapatan pajak dan lapangan kerja. Kunjungan wisatawan ini yang memberi kontribusi yang paling besar dan sangat menentukan pemasukan dari Pajak Hotel, Restoran, hiburan serta objek wisata Buktinya adalah dengan kedatangan wisatawan maka tempat yang akan dicari pertama kali adalah penginapan serta rumah makan atau restoran untuk konsumsi wisata. Potensi di sektor pariwisata tersebut menjadi titik acuan dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran serta . Jumlah wisatawan memiliki pengaruh langsung ke PAD dan dapat juga berpengaruh tidak langsung yaitu melalui jumlah wisatawan ke pajak hotel (sebagai variabel intervening) lalu ke PAD.

Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD (Pajak Restoran, Hiburan, Hotel, Objek Wisata) Kabupaten Pelalawan Tahun 2022 adalah sebesar 10.341 atau realisasi sebesar 110.67 persen, Jika dibandingkan dengan kondisi Awal yakni sebesar 5.584 artinya mengalami kenaikan pada tahun

2022 sebesar 4.757 (Rp.juta). Upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- a. Memperluas basis penerimaan. Tindakan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah yang dalam perhitungan ekonom dianggap potensial, antara lain mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan;
- b. Memperkuat proses pemungutan. Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM;
- c. Meningkatkan pengawasan, antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.
- d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan;
- e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

19. Analisis Pencapaian Sasaran : Meningkatnya Kualitas Masyarakat yang Berbudaya

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA 2022
				TARGET	REALISASI	
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	%	0,52	0,58	0.60	103.45

Dalam adat budaya Melayu dikenal sebuah ungkapan “Adat bersendi syara’ syara’ bersendi Kitabullah”. Ungkapan ini dapat dimaknai setiap aktifitas hidup masyarakat Melayu Kabupaten Pelalawan harus berdasarkan atas tuntutan dan syariat agama Islam.

Indeks Pembangunan Kebudayaan mengacu pada kerangka pengukuran kebudayaan yang disusun UNISCO Culture Development Indicators (CDIs) serta menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan kebudayaan ditingkat nasional dan daerah, Terdapat 31 indikator penyusunan indeks tersebut yang dirangkum dalam tujuh dimensi pengukuran, diantaranya Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi dan Gender. Indeks Pembangunan Budaya tidak Mengukur Nilai Budaya disuatu daerah. Berdasarkan Badan Pusat Statistik nilai **Indeks Pembangunan Budaya Kabupaten Pelalawan** Tahun 2022 yakni sebesar 0.60 atau dengan capaian kinerja sebesar 100.45 persen. Jika dibandingkan dengan indeks Pembangunan Budaya secara Nasional adalah sebesar 55,34, artinya indeks Pembangunan Budaya Kabupaten Pelalawan jauh lebih besar. Masyarakat Kabupaten Pelalawan merupakan bagian masyarakat melayu yang menjunjung tinggi nilai nilai budaya melayu. Seperti kita ketahui, bahwa budaya melayu identik dengan nilai masyarakat relegius, sehingga untuk mencapai terwujudnya masyarakat yang berbudaya melayu, beriman dan bertaqwa diperlukan terobosan program progam yang mendukung agar tercapainya sasaran tersebut. Sasaran keberhasilan Meningkatnya Pemahaman dan Penerapan Nilai Budaya melayu salah satu indikator Kinerja Indeks Pembangunan Budaya.

Budaya melayu identik dengan masyarakat yang religius, sehingga untuk mencapai Terwujudnya Kehidupan Sosial Kemasyarakatan yang Berbudaya Melayu, Beriman, dan Bertaqwa, maka perlu upaya untuk mencapai arah tersebut melalui kegiatan Magrib Mengaji sebagaimana yang dijelaskan didalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Magrib Mengaji.

20. Analisis Pencapaian Sasaran :
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA 2022
				TARGET	REALISASI	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	%	40,05	50,00	56.65	113,30

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pelalawan Tahun 2022 berdasar surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : B/828/RB.06/2022 tanggal 6 Desember 2022 Perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 disampaikan Hasil Evaluasi Pemerintah Kabupaten Pelalawan mendapat nilai 56.65 dengan Kategori “CC” Jika dibandingkan dengan kondisi awal/sebelumnya capaian Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pelalawan yakni sebesar 49.62 atau dengan predikat “CC” , maka mengalami kenaikan sebesar 7.03, capaian ini melebihi target atau 113.30 persen. Berdasarkan Evaluasi yang dilaksanakan, Kesimpulan hasilnya adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	BOBOT	NILAI	
			2021	2022
A	Komponen Pengungkit			
	1. Pemenuhan	20,00	8,47	9.88
	2. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,20	5.78
	3. Reform	30,00	5,58	10.71
	TOTAL KOMPONEN PENGUNGKIT	60,00	19,25	26.37
NO	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	NILAI	
			2021	2022
B	Komponen Hasil			
	1. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,39	7.53
	2. Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,22	7.99
	3. Pemerintahan yang Bersih & Bebas KKN	10,00	7,63	7.99
	4. Kinerja Organisasi	10,00	6,13	6.77
	TOTAL KOMPONEN HASIL	40,00	30,37	30.28
	INDEK RB (Pengungkit+Hasil)	100,00	49,62	56.65

Sedangkan Hasil Antara Area Perubahan pada Pemerintahan Kabupaten Pelalawan telah dilakukan pengukuran oleh Instansi leading sektor dengan rinacian sebagai berikut :

NO	HASIL ANTARA	SKALA	NILAI
1	Indeks Sistem Merit	0-400	232.5
2	Indeks Profesional ASN	0-100	53.36
3	Indeks SPBE	1-5	1.36
4	Indek Tata Kelola Pengadaan Barang & Jasa	0-100	54.90
5	Indek Pelayanan Publik	0-5	3.10
6	Indeks Kapabilitas APIP	0-5	3
7	Maturitas SPIP	0-5	3
8	Indeks Pengawasan Kearsipan	0-100	76.36
9	Kepatuhan terhadap Standar Pelayan Publik	0-100	53.75

Penilaian ini bahwa Pemerintah Kabupaten Pelalawan memperoleh nilai 62,65 atau predikat B, menunjukan bahwa tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas penggunaan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemerintah Kabupaten Pelalawan sudah menunjukan hasil yang baik. Rinciannya adalah sebagai berikut :

21. Analisis Pencapaian Sasaran :
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA 2022
				TARGET	REALISASI	
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	%	62,65	70,00	64.78	92.54
2	Indeks Inovasi Daerah	%	6,50	60,00	53,39	88,98
3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	%	60,35	65,00	66,26	101.93

Tata kelola pemerintah yang baik akan mendorong kemajuan suatu daerah, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah

dalam menjalankan fungsinya sebagai institusi publik. Implementasi birokrasi di Kabupaten Pelalawan didukung dengan peningkatan dan pengembangan inovasi pemerintah daerah, peningkatan akuntabilitas, pengawasan dan kualitas tata kelola keuangan daerah, keterbukaan informasi serta pemanfaatan teknologi dalam peningkatan pelayanan publik. Dengan akuntabilitas kinerja pemerintahan yang baik serta pelayanan kepada masyarakat yang memuaskan, maka *Good Governance* di Kabupaten Pelalawan dapat terwujud. Strategi akselerasi penguatan perencanaan terintegrasi dan akuntabilitas kinerja merupakan strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Strategi ini didukung dengan peningkatan dan pengembangan inovasi pemerintah daerah, peningkatan akuntabilitas, pengawasan, dan kualitas tata kelola keuangan daerah dan keterbukaan informasi serta pelayanan publik berbasis IT untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pelalawan.

Indikator Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah berdasarkan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/899/AA.05/2022 tanggal 06 Desember 2022 Perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 disampaikan hasil evaluasi Pemerintah Kabupaten Pelalawan mendapat nilai 64.78 atau dengan peringkat penilaian "B", serta diberikan Piagam Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tertanggal 06 Desember 2022. Jika dibandingkan dengan capaian Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 yakni nilai sebesar 62.65 artinya mengalami kenaikan sebesar 2.13 poin. Penilaian yang telah dilakukan, bahwa Pemerintah Kabupaten Pelalawan memperoleh nilai 64,78 atau predikat B, menunjukkan yaitu *Implementasi AKIP sudah baik pada Pemerintah Daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja*. Rincian hasil evaluasinya adalah sebagai berikut :

NO	Komponen Penilaian	Bobot	NILAI	
			2021	2022
1	Perencanaan Kinerja	30	22,11	22.50
2	Pengukuran Kinerja	25	13,31	18.94
3	Pelaporan Kinerja	15	10,64	10.44
4	Evaluasi Kinerja Internal	10	6,00	12.90
5	Capaian Kinerja	20	10,59	-
6	Nilai Hasil Evaluasi	100	62,65	64.78

Realisasi Capaian Kinerja Indeks Inovasi Daerah yang dicapai tahun 2022 adalah terealisasi sebesar 53,39, atau dengan capaian sebesar 88,98 persen, predikat “**Memuaskan**”. Sedangkan Realisasi sebelumnya (kondisi Awal) atau Tahun 2021 capaian Kinerja Indeks Inovasi Daerah adalah sebesar 6.50 atau dengan realisasi capaian sebesar 81.25 persen.

Berdasarkan Radiogram Kepala Badan Strategis Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, tanggal 30 Januari 2023, Nomor 001.10/398/BSKDN tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2022 Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11- 6301.A Tahun 2022 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2022, Kabupaten Pelalawan mendapatkan Predikat Kabupaten Inovatif dengan **Skor Indeks 53,39 dengan peringkat 112** dari 415 Kabupaten seluruh Indonesia.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Riau pada tahun 2022 memperoleh Skor Indeks 50,94 dengan Predikat Inovatif, dan berada pada peringkat 16 dari 34 Provinsi di seluruh Indonesia. Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Penelitian dan Pengembangan diberikan amanat untuk melaksanakan Penilaian Inovasi Daerah yang ditetapkan sebagai salah satu Program Prioritas Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022. Sebagai salah satu bentuk implementasi dari upaya memotivasi serta memacu kreativitas pemerintah daerah untuk melakukan praktik yang inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri, melalui fungsi pembinaan, terus mendorong pemerintah daerah untuk melahirkan ide dan gagasan berupa inisiatif baru dan inovasi yang selanjutnya dilakukan uji coba sampai pada proses keberhasilan uji coba, yang kemudian diterapkan dengan perda dan perkada.

Pengukuran Indeks Inovasi Daerah

Sistem Perhitungan IGA 2022 berbeda dengan sistem perhitungan IGA 2021 ketika penyusunan target Renstra PD, Pada Perhitungan Profil Pemda terjadi kenaikan bobot dari 24% menjadi 25,20%, Bobot Perhitungan Jumlah Inovasi mengalami kenaikan dari 16% pada tahun 2021 menjadi 30,40% pada tahun 2022. Kenaikan bobotnya hampir menjadi 2x lipat dari tahun sebelumnya. Sementara jumlah inovasi mengalami penurunan dari 30 menjadi 7 inovasi yang dikirim. Penurunannya sebesar 75% atau 3x lipat dari inovasi tahun sebelumnya, Bobot Perhitungan Kematangan berubah dari 60% pada tahun 2021 turun menjadi 44,4% pada tahun 2022. Skor Kematangan Kab Pelalawan Pada tahun 2021 sebesar 67 poin. Jika skor kematangan tahun 2021 dikonversikan menggunakan sistem penilaian tahun 2022 akan berubah menjadi 50. Pada tahun 2022 skor kematangan sebesar 80,57.

a. Penghitungan Skor Total

Data profil inovasi daerah secara otomatis akan menghasilkan skor dan peringkat ranking indeks inovasi daerah. Selanjutnya hasil tersebut dianalisis dan diseleksi oleh Tim Penilai. Hasil analisis Tim Penilai menghasilkan nominator bagi Pemerintah Daerah inovatif untuk mengikuti tahap selanjutnya.

Dalam ajang IGA 2022 Pemerintah daerah mengupload/mengunggah data tentang inovasi daerah dan mengisi indikator inovasi sebagai berikut:

A. PROPOSAL INOVASI DAERAH

1. Nama inovasi Daerah
2. Tahapan Inovasi
3. Nama Inovasi Daerah
4. Tahapan Inovasi
5. Inisiator Inovasi Daerah
6. Jenis Inovasi
7. Bentuk inovasi
8. COVID 19 dan Non COVID 19
9. Urusan Inovasi Daerah
10. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah
11. Waktu Inovasi Daerah diterapkan
12. Rancang Bangun Inovasi Daerah & Pokok Perubahan yg akan dilakukan
13. Tujuan Inovasi DAERAH
14. Manfaat yang diperoleh

15. Hasil Inovasi

16. Anggaran

B. INDIKATOR SATUAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Visi dan misi

2. Tingkat Lembaga Kelitbangan

3. APBD tepat waktu

4. Kualitas peningkatan perizinan

5. Jumlah pendapatan perkapita

6. Tingkat pengangguran terbuka

7. Jumlah peningkatan investasi

8. Jumlah peningkatan PAO

9. Opini BPK

10. Nilai capaian Lakip

11. Penurunan angka kemiskinan

12. Jumlah inovasi

13. Nilai IPM

14. Penghargaan bagi inovator;

15. Jumlah penelitian atau kajian yang mendukung inovasi; dan

16. Roadmap SIDA.

C. INDIKATOR SATUAN INOVASI DAERAH

1. Regulasi inovasi daerah

2. Ketersediaan SOM terhadap inovasi daerah

3. Dukungan anggaran

4. Penggunaan IT

5. Bimtek inovasi

6. Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD

7. Keterlibatan aktor inovasi

8. Pelaksana inovasi daerah

9. Jejaring inovasi

10 Sosialisasi inovasi daerah

11 Pedoman teknis

12 Kemudahan informasi layanan

13 Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan

14 Penyelesaian layanan pengaduan

15 Online system

16 Replikasi

17 Kecepatan inovasi

- 18
Kemanfaatan inovasi
- 19
Monitoring dan evaluasi inovasi daerah
- 20
Kualitas inovasi daerah

Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah menetapkan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2021 yakni Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS.070/Balitbangda /2021 /1185 tanggal 31 Desember 2021, Tentang Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Pelalawan tahun 2021.

**INOVASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2022**

NO	NAMA INOVASI	INOVATOR	TAHUN PENERAPAN
1	SIKO (Sistem Informasi Kepegawaian Online)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2021
2	SITANJAK MERAH (Sistem Layanan Pajak Mandiri Bendahara Daerah)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2021
3	ADIK ATAN (Aplikasi Pendidikan dan Kesehatan)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2021
4	JUMAT BERKAH	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2021
5	BTS SIKA SIMIL (Beritahu Teman Sesama Siap Nikah Siap Hamil)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	2021
6	GENTING (Gerakan Anti Stunting)	Dinas Kesehatan	2021
7	Bedah Rumah Layak Huni	Dinas Sosial	2021
8	Commad Center	Dinas Komunikasi dan Informasi	2021
9	Penyangga Kaum Dhuafa	Kecamatan Pangkalan Lesung	2021
10	SALAY (Safari Layanan Komprehensif)	Kecamatan Langgam	2021
11	Panglima Basolang	Kecamatan Kerumutan	2021
12	PULANET (Pusat Layanan Taman Bacaan Internet)	Kecamatan Kuala Kampar	2021

Adapun Program yang mendukung IGA 2022 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pelalawan, berada pada Program Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovasi, dengan anggaran pada tahun 2022 Rp. 458.702.440, dengan realisasi

Rp. 458.278.406. Mengenai Hambatan dan Kendala dalam Pelaksanaan tidak tercapainya target atau skor tersebut diatas disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

- Adapun beberapa indikator pada profil Pemerintah Daerah Kabupaten yang tidak memperoleh skor yang maksimal, seperti APBD tepat waktu dan angka kemiskinan. Hal ini disebabkan karena dampak pandemic Covid-19.
- Terjadi perubahan komposisi penilaian IID (Indek Inovasi Daerah) pada tahun 2022, yang menitikberatkan pada bobot jumlah inovasi dari yang sebelumnya 0,2menjadi 0,38 sehingga banyaknya inovasi yang dikirimkan semakin berpengaruh terhadap skor akhir IID secara keseluruhan. Hal ini berbanding terbalik dengan realisasi jumlah inovasi yang dikirim oleh Kabupaten Pelalawan pada tahun 2022 yang hanya 7 Inovasi, dibandingkan tahun seelumnya sebanyak 46 Inovasi.

Indikator Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pelalawan tahun 2022 adalah sebesar 66.26, Kategori Perlu Perbaikan atau dengan Nilai (B), atau realisasi capaian sebesar 101.93 persen. Jika dibandingkan dengan kondisi Awal adalah sebesar 65.00, Kategori Perlu Perbaikan atau Nilai B, namun secara angka/poin mengalami peningkatan sebesar 1,26. Berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.1645/IX/2022 Tentang Penetapan Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kotaa diPropinsi Riau Tahun Anggaran 2021 tanggal 01 Niovenber 2022, bahwa Kabupaten Pelalawan di Propinsi Riau Klaster/Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi memperoleh urutan ke 2 (dua) setelah Kabupaten Siak.

HASIL PENGKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DIPROPINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2022

A. Kabupaten di Propinsi Riau Klaster/Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi

NO	KABUPATEN	INDEKS TOTAL	KATEGORI	NILAI
1	Siak	66.98	Perlu Perbaikan	B
2	Pelalawan	66.26	Perlu Perbaikan	B
3	Bengkalis	65.95	Perlu Perbaikan	B

B. Kabupaten di Propinsi Riau Klaster/Kemampuan Keuangan Daerah Sedang

NO	KABUPATEN	INDEKS TOTAL	KATEGORI	NILAI
1	Indragiri Hilir	75.46	Baik	A
2	Rokan Hulu	70.22	Perlu Perbaikan	B
3	Indragiri Hulu	62.10	Perlu Perbaikan	B
4	Kepulauan Meranti	42.66	Sangat Perlu Perbaikan	

C. Kabupaten di Propinsi Riau Klaster/Kemampuan Keuangan Daerah Rendah

NO	KABUPATEN	INDEKS TOTAL	KATEGORI	NILAI
1	Kuantan Singingi	64.43	Perlu Perbaikan	B

Disamping itu untuk diketahui berdasarkan Audit BPK di tahun 2022 sudah berhasil mencapai target. Dimana Laporan Keuangan Kabupaten Pelalawan tahun 2022 mendapatkan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan, sesuai dengan Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Riau Nomor : 86/S-HP/XVIII,PEK/04/2021 tanggal 30 April 2022 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2022. Artinya, Kondisi ini masih sama dengan tahun sebelumnya. Perlu disampaikan bahwa Kabupaten Pelalawan berhasil mempertahankan opini WTP ini selama 9 tahun berturut-turut sejak tahun 2013. Adapun program yang mendukung indikator ini adalah Peningkatan Tata Kelola Keuangan sesuai SAP dan Peningkatan dan Pemahaman Pengelolaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah.

22. Analisis Pencapaian Sasaran :
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA 2022
				TARGET	REALISASI	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80.33	91.00	81,74	89,82

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Pelalawan tahun 2022 adalah 81.74 dari target nilai 91.00, atau dengan realisasi capaian kinerja sebesar 89.82 persen realisasi ini didapat dari hasil Survey kuisisioner perangkat daerah khusus nya pelayanan public. Berdasarkan

data tersebut dapat dikatakan bahwa indikator ini masuk dalam kategori **"Memuaskan"** naik 9.49 persen dari pencapaian tahun sebelumnya, hal ini memperlihatkan komitmen Perangkat Daerah pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yg baik . Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan antara lain :

- a. Perangkat Daerah Pelayanan telah memiliki standard pelayanan publik yang menjadi acuan dalam pemberian pelayanan publik, aplikasi dilapangan yakni tersedianya sistem dalam memudahkan pengguna layanan
- b. Profesionalisme SDM dengan tersedianya SDM yang berkompetensi dalam memberikan layanan, dan sistem pemberian reward dan punishment sudah secara bertahap mulai diterapkan.
- c. Sarana Prasarana dan Inovasi sudah memberikan tempat yang ideal bagi pengguna layanan seperti menyediakan kursi untuk masyarakat berkebutuhan khusus, ruang laktasi, dan selama Covid-19 beberapa Unit sudah menerapkan website terintegrasi, pada pratiknya DPMPTSP. sudah menerapkan Inovasi perizinan melalui web integrasi <https://dpmptsp.pelalawankab.go.id>.
- d. Sebagian besar unit pelayanan sudah menggunakan media elektronik sebagai penyebaran informasi pelayanan dan media pengaduan masyarakat. Media penyebaran informasi pelayanan melalui <https://sipp.menpan.go.id/> dan media pelaporan online melalui www.lapor.go.id

Untuk memaksimalkan peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

- a. Perlu meningkatkan pelayanan, dan memperbaiki sarana dan prasarana pelayanan sehingga masyarakat merasa nyaman, karena sebagian Perangkat Daerah pelayanan belum memenuhi standar yang mendukung bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti toilet, garbarata (tempat rambatan) sehingga kedepannya akan lebih ditingkatkan oleh unit pelayanan. Inovasi pelayanan kedepannya lebih ditingkatkan dengan mengutamakan cepat, mudah, dan murah serta tidak diskriminatif yang mana mobilitas pengguna layanan sangat terbatas.
- b. Peningkatan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan publik, meningkatkan penyediaan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan

publik, yakni fasilitas untuk lansia dan penyandang Disabilitas, ruang bermain anak, dan ruang lactase. dengan didukung tersedianya fasilitas yang lengkap maka akan mempercepat proses penyelenggaraan pelayanan public kepada masyarakat

Capaian kinerja IKM tahun 2022 tersebut tidak terlepas adanya perbaikan pelayanan, atau perubahan pelayanan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Adapun Program yang mendukung pencapaian kinerja ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penataan Organisasi dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana.

Meningkatnya kualitas pelayanan publik merupakan bagian dari reformasi Birokrasi Pemerintahan yang mengindikasikan semakin baik pelayanan terhadap masyarakat maka akan berpengaruh pada perbaiki sektor ekonomi, kesehatan, dan pendidikan di Kabupaten Pelalawan. Penilaian kualitas pelayanan publik dapat diukur dari Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM yang berpedoman pada PERMENPAN RB Nomor 14 Tahun 2017, dan penilaian kepatuhan yang dikeluarkan oleh Ombudsman RI perwakilan Propinsi Riau hasil dari Survey Kepuasan masyarakat terhadap Perangkat Daerah Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai berikut :

TABEL INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2022

NO	PERANGKAT DAERAH	NILAI IKM
1	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	88,72
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	88,63
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	73,84
4	RSUD Selasih	71,59
5	Kantor Camat Pangkalan Kerinci	80,89
6	Kantor Camat Pelalawan	92,12
7	Kantor Camat Bunut	79,52
8	Kantor Camat Pangkalan Kuras	87,22
9	Kantor Camat Bandar Petalangan	98,78
10	Kantor Camat Pangkalan Lesung	79,81
11	Kantor Camat Ukui	77,93
12	Kantor Camat Kerumutan	90,96

13	Kantor Camat Langgam	86,83
14	Kantor Camat Bandar Sei.Kijang	86,06
15	Kantor Camat Teluk Meranti	78,85
16	Kantor Camat Kuala Kampar	77,86
17	Puskesmas Pangkalan Kerinci I	78,36
18	Puskesmas Pangkalan Kerinci II	79,03
19	Puskesmas Pelalawan	83,11
20	Puskesmas Bunut	68,96
21	Puskesmas Pangkalan Kuras I	83,57
22	Puskesmas Pangkalan Kuras II	79,09
23	Puskesmas Bandar Petalangan	76,41
24	Puskesmas Pangkalan Lesung	80,48
25	Puskesmas Ukui	81,39
26	Puskesmas Kerumutan	84,84
27	Puskesmas Langgam	77,82
28	Puskesmas Bandar Sei.Kijang	78,44
29	Puskesmas Teluk Meranti	80,20
30	Puskesmas Kuala Kampar	80,06
JUMLAH INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT		2452,35
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (RATA-RATA)		81,74

3. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2022

3.1. Akuntabilitas Keuangan

Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan, tidak terlepas dari

pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah disusun.

Realisasi APBD Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2022 dapat dirinci sebagai berikut.

- a. Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp.1.587.673.781.145,37 atau 94,35 persen dari yang ditarget sebesar Rp1.682.726.360.465,00 sedangkan Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp.1.594.521.031.700,36 atau 99,94 persen dari yang ditarget sebesar Rp.1.595.482.992.716,00
- b. Belanja dan Transfer Daerah Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp.1.695.322.707.784,30 atau 88,44 persen dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp.1.916.975.102.815,00 Sedangkan realisasi belanja pada Tahun 2021 sebesar Rp.1.639.582.070.034,63 atau 90,10 persen dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp.1.819.764.827.632,00.

Gambaran realisasi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah Tahun 2022 secara garis besar dapat dilihat pada Tabel 3.4

Tabel 3.4
RINGKASAN REALISASI APBD 2022

URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	(%)
--------	-------------------------	----------------	-----

1	2	3	4
I. Pendapatan Daerah	1.682.726.360.465,00	1.587.673.781.145,37	94,35
II. Belanja dan Transfer Daerah	1.916.975.102.815,00	1.695.322.707.784,30	88,44
III. Surplus (Defisit)	(234.248.742.350,00)	(107.648.926.638,93)	45,95
IV. Pembiayaan Daerah			
a. Penerimaan Daerah	234.248.742.350,00	234.281.317.349,78	100,01
b. Pengeluaran Daerah	0,00	0,00	0,00
SILPA	0,00	126.632.390.710,85	0,00

Struktur belanja dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2022 diklasifikasikan menurut urusan pemerintah daerah dan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan, terdiri dari 6 (enam) belanja urusan wajib pelayanan dasar, 18 belanja urusan wajib bukan pelayanan dasar, 6 (enam) belanja urusan pilihan dan 10 (sepuluh) belanja urusan pemerintah fungsi penunjang. Setiap urusan ditangani oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sehingga memudahkan pengukuran Indikator Kinerja Perangkat Daerah bersangkutan.

Urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Urusan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pelalawan

NO.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
A.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	
1.	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Kesehatan	Dinas Kesehatan
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

NO.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
5.	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Sosial	Dinas Sosial
B.	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	
7.	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9.	Pangan	Dinas KetahananPangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
10.	Pertanahan	Sekretariat Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
11.	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
12.	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15.	Perhubungan	Dinas Perhubungan
16.	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
17.	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
18.	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19.	Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
20.	Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika
21.	Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika
22.	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
23.	Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
24.	Kearsipan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
C.	Urusan Pilihan	
25	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan dan Kelautan
26	Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan

NO.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Olahraga
27	Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan
28	Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
29	Perindustrian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
30	Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja
D.	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	
31.	Administrasi Pemerintahan	Sekretariat Daerah.
32.	Pengawasan	Inspektorat Daerah
33.	Perencanaan	Dinas Perhubungan dan Badan Perencana Pembangunan Daerah
34.	Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
35.	Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
36.	Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
37.	Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
38.	Sekretariat DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
39.	Kewilayahan – Administrasi Pemerintah	Kecamatan Bunut, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan Kerumutan, Kecamatan Pelalawan, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan Kuala Kampar, Kecamatan Teluk Meranti, Kecamatan Ukui, Kecamatan Bandar Petalangan, Kecamatan Langgam
40	Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

a. Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

TABEL 3.6

**IKHTISAR REALISASI PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2022**

No	Uraian Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	248.871.591.795,00	191.902.295.863,37	77,11
1.1	Pajak Daerah	136.904.000.000,00	112.290.506.001,00	82,02
1.2	Retribusi Daerah	28.472.000.000,00	14.855.342.042,12	52,18
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	20.600.000.000,00	8.745.856.407,00	42,46
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	62.895.591.795,00	56.010.591.413,25	89,05
2	Pendapatn Transfer	1.433.298.796.615,00	1.394.933.912.883,00	97,32
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.295.975.558.215,00	1.255.720.494.341,00	96,89
2.1.	Dana Perimbangan	1.197.956.752.215,00	1.157.701.688.341,00	96,64
2.2	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00
2.3	Dana Desa	98.018.806.000	98.018.806.000,00	100,00
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	137.323.238.400,00	139.213.418.542,00	101,38
3.1	PendapatanBagi Hasil	128.000.000.000,00	131.181.060.197,00	102,49
3.2	Bantuan Keuangan	9.323.238.400,00	8.032.358.345,00	86,15
4	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	555.972.055,00	837.572.399,00	150,65
4.1	PendapatanHibah	0,00	0,00	0,00
4.2	Lain-lain Pendapatan Sesua idengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	555.972.055,00	837.572.399,00	150,65
	Jumlah Pendapatan	1.682.726.360.465,00	1.587.673.781.145,37	94,35

Uraian ringkas jenis pendapatan Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan sebesar Rp.191.902.295.863,37 atau 77,11 persen dari target sebesar Rp.248.871.591.795,00. Realisasi Pajak Daerah sebesar Rp.112.290.506.001,00 atau 82,02 persen dari target sebesar Rp.136.904.000.000,00. Realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp.14.855.342.042,12 atau 52,18 persen dari target sebesar Rp.28.472.000.000,00. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan sebesar Rp.8.745.856.407,00 tercapai 42,46 persen dari target sebesar Rp.20.600.000.000,00, dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah sebesar Rp.56.010.591.413,25 tercapai 89,05 persen dari target sebesar Rp.62.895.591.795,00.

b. Pendapatan Transfer Pemerintah

Realisasi penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.1.255.720.494.341,00 atau 96,89 persen, dari target Rp.1.295.975.558.215,00, Terdiri dari Dana Perimbangan sebesar Rp.1.157.701.688.341,00 atau 96,64 persen dari target sebesar Rp.1.197.956.752.215,00, Dana Desa sebesar Rp.98.018.806.000,00 atau 100,00% dari target sebesar Rp.98.018.806.000,00.

c. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Realisasi penerimaan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.139.213.418.542,00 atau 101,38 persen dari target Rp.137.323.238.400,00 terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Rp.131.181.060.197,00 atau 102,49 persen dari target Rp.128.000.000.000,00, Bantuan Keuangan sebesar Rp.8.032.358.345,00 atau 86,15 persen dari target Rp.9.323.238.400,00.

d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.837.572.399,00 atau 150,65 persen dari target Rp.555.972.055,00 merupakan Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia terealisasi sebesar Rp.837.572.399,00 atau 150,65 persen dari target sebesar Rp555.972.055,00.

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah terdapat berbagai hambatan dan permasalahan terutama menyangkut:

- a. Luasnya wilayah serta keadaan geografis Kabupaten Pelalawan yang terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan sebagian besar masih belum ditunjang dengan sarana prasarana transportasi yang memadai. Sementara sarana penunjang pelaksanaan tugas aparatur terutama untuk dapat menjangkau seluruh wilayah juga masih terbatas,

kondisi ini menyulitkan dalam pelaksanaan pengelolaan realisasi penerimaan yang efektif dan efisien terutama tagihan penerimaan yang bersumber dari obyek pajak dan retribusi yang berasal dari masyarakat.

- b. Belum memadainya data wajib pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Kabupaten Pelalawan.
- c. Belum efektifnya beberapa peraturan daerah yang berkenaan dengan sebagian besar kantor pusat perusahaan terutama usaha perkebunan berdomisili diluar wilayah kerja administratif Kabupaten Pelalawan, sehingga sulit melakukan kontak dengan pimpinan yang berwenang dalam perusahaan tersebut, sehingga menyulitkan dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- d. Adanya potensi Pendapatan Asli Daerah yang belum optimal direalisasikan, karena kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak baik masyarakat maupun dunia usaha yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pelalawan.
- e. Adanya beberapa potensi Pajak Daerah yang kewenangannya menjadi urusan Provinsi dan atau Pemerintah Pusat.

Solusi yang telah dilakukan dan akan dilakukan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah adalah:

- a. Kegiatan penyuluhan subyek pajak dan retribusi daerah kepada masyarakat luas terutama kepada aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat dan pengusaha-pengusaha yang ada di Kabupaten Pelalawan. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan.
- b. Kegiatan dibidang pendidikan dan pelatihan pendapatan daerah secara berkesinambungan bekerjasama dengan pihak yang kompeten untuk meningkatkan keterampilan pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan.
- c. Kegiatan penertiban pajak daerah dan retribusi daerah diterapkan pada Wajib Pajak/Wajib Retribusi disertai dengan penerapan sanksi administrasi.
- d. Kegiatan pendataan PBB telah menyempurnakan data yang ada untuk menambah penerimaan PBB.

- e. Sistem Pembayaran Pajak Daerah secara On-Line di Launching dan telah diimplementasikan. Bekerja sama dengan Bank Riau Kepri, Bank Mandiri, Bank BRI dan E-Commerce. Diharapkan dengan kemudahan ini dapat mendorong dan meningkatkan keinginan masyarakat untuk membayar pajak.
- f. Pemberian diskon 50 persen untuk pengurusan BPHTB bagi wajib pajak selama tahun 2022.

b. Belanja Daerah

Ikhtisar realisasi target kinerja belanja Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut:

Tabel 3.7
IKHTISAR REALISASI BELANJA
KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2022

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
A	Belanja	1.916.975.102.815,00	1.695.322.707.784,30	88,44
I	Belanja Operasi	1.397.616.184.211,00	1.244.814.152.870,30	89,07
1	Belanja Pegawai	600.698.359.302,00	577.468.918.041,00	96,13
2	Belanja Barang dan Jasa	753.302.191.731,00	630.861.062.598,30	83,75
3	Belanja Hibah	31.711.093.178,00	29.634.994.231,00	93,45
4	Belanja Bantuan Sosial	11.754.540.000,00	6.849.178.000,00	58,27
II	Belanja Modal	310.870.191.115,00	247.901.212.292,00	79,74
1	Belanja Tanah	2.000.000.000,00	1.587.665.000,00	79,38
2	Belanja Peralatan dan Mesin	83.459.013.910,00	66.462.156.898,00	79,63
3	Belanja Gedung dan Bangunan	97.183.421.911,00	65.853.866.305,00	67,76
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	118.661.136.446,00	105.786.198.732,00	89,15
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	9.566.618.848,00	8.211.325.357,00	85,83
III	Belanja Tak Terduga	624.070.390,00	569.816.500,00	91,31
1	Belanja Tak Terduga	624.070.390,00	569.816.500,00	91,31
IV	Belanja Transfer	207.864.657.099,00	202.037.526.122,00	97,20
1	Belanja Bagi Hasil	13.262.374.699,00	7.692.589.722,00	58,00
2	Bagi Hasil Pajak Pajak Daerah	10.415.174.699,00	7.692.589.722,00	73,86
3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	2.847.200.000,00	0,00	0,00
B	Transfer Bantuan Keuangan	194.602.282.400,00	194.344.936.400,00	99,87
1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Kabupaten/Kota			
2	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	87.426.084.800,00	87.426.084.800,00	100,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	107.176.197.600,00	106.918.851.600,00	99,76
	Jumlah Belanja	1.916.975.102.815,00	1.695.322.707.784,30	88,44

Dari Tabel 3.9 dapat dikemukakan hal-hal yang berkenaan Ikhtisar realisasi belanja Kabupaten Pelalawan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi sebesar Rp.1.244.814.152.870,30 atau 89,07 persen dari target belanja sebesar Rp.1.397.616.184.211,00 yang terdiri dari belanja pegawai terealisasi sebesar Rp.577.468.918.041,00 atau 96,13 persen dari target belanja sebesar Rp.600.698.359.302,00, Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp.630.861.062.598,30 atau 83,75 persen dari target belanja sebesar Rp.753.302.191.731,00 Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp.29.634.994.231,00 atau 93,45 persen dari target belanja sebesar Rp.31.711.093.178,00, dan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp.6.849.178.000,00 atau 58,27 persen dari target belanja sebesar Rp.11.754.540.000,00.
- b. Belanja Modal Rp.247.901.212.292,00 atau 79,74 persen dari target belanja sebesar Rp.310.870.191.115,00 yang terdiri dari belanja tanah terealisasi sebesar Rp.1.587.665.000,00 atau 79,38 persen dari target belanja sebesar Rp.2.000.000.000,00, belanja peralatan dan mesin terealisasi sebesar Rp.66.462.156.898,00 atau 79,63 persen dari target belanja sebesar Rp.83.459.013.910,00, belanja gedung dan bangunan terealisasi sebesar Rp.65.853.866.305,00 atau 67,76 persen dari target belanja sebesar Rp.97.183.421.911,00, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan terealisasi sebesar Rp.105.786.198.732,00 atau 89,15 persen dari target belanja sebesar Rp.118.661.136.446,00 dan Belanja Aset Tetap Lainnya

teralisasi sebesar Rp.8.211.325.357,00 atau 85,83 persen dari target belanja sebesar Rp.9.566.618.848,00.

c. Belanja tak terduga terealisasi Rp.569.816.500,00 atau 91,31 persen dari target belanja sebesar Rp.624.070.390.

d. Belanja transfer realisasinya sebesar Rp.202.037.526.122,00 atau 97,20% dari anggaran sebesar Rp.207.864.657.099,00 yang terdiri dari Transfer bagi hasil pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan. Untuk realisasi Transfer bagi hasil pajak daerah sebesar Rp.7.692.589.722,00 sebesar 73,86 persen dari target sebesar Rp.10.415.174.699,00, sedangkan untuk realisasi Transfer bagi retribusi daerah tidak terealisasi dari anggaran sebesar Rp.2.847.200.000,00. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa terealisasi sebesar Rp.87.426.084.800,00 atau 100 persen dari anggaran sebesar Rp.87.426.084.800,00, dan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa terealisasi sebesar Rp.106.918.851.600,00 atau 99,76 persen dari anggaran sebesar Rp.107.176.197.600,00.

Realisasi Belanja yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga, dan Belanja Tranfer secara keseluruhan mencapai Rp.1.695.322.707.784,30 atau 88,44 persen dari target belanja sebesar Rp.1.916.975.102.815,00. Anggaran belanja tidak terserap 100 persen secara umum disebabkan karena upaya efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dan adanya beberapa program/kegiatan yang tidak mencapai target.

Belanja pemerintah daerah dikelompokkan menjadi 6 (enam) kategori, yaitu:

- 1) rincian belanja menurut organisasi,
- 2) rincian belanja menurut fungsi,
- 3) rincian belanja menurut program dan kegiatan,
- 4) rincian belanja menurut urusan pemerintahan,
- 5) rincian belanja menurut belanja operasi dan belanja modal dan
- 6) rincian menurut jenis belanja.

Program dan kegiatan yang tidak terlaksana sesuai target umumnya dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- Keterlambatan penyiapan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran, sehingga banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena waktu yang terbatas;
- Adanya Faktor menyangkut persyaratan dan kemampuan kontraktor yang mengikuti lelang/tender yang tidak sesuai dengan perencanaan, terkait keterbatasan waktu tender ulang tidak bisa dilaksanakan;
- Adanya kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat;
- Adanya kegamangan dan ketakutan pejabat pengelola kegiatan (PPTK/PPK) akan dampak/risiko hukum yang akan ditanggung.
- Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan yang membuat adanya penghematan anggaran sehingga realisasi keuangan tidak mencapai hasil maksimal.

Anggaran dan realisasi masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat dalam Tabel 3.8 berikut:

TABEL 3.8
ANGGARAN DAN REALISASI OPD TAHUN ANGGARAN 2022

No.	OPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	498.943.925.702,00	474.563.799.992,00	24.380.125.710,00	95,11
2	Dinas Kesehatan	222.706.690.911,00	198.128.568.036,30	24.578.122.874,70	88,96
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	261.408.669.280,00	202.627.771.034,00	58.780.898.246,00	77,51
4	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	30.171.744.752,00	27.236.923.163,00	2.934.821.589,00	90,27
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.833.951.857,00	7.552.605.886,00	4.281.345.971,00	63,82
6	Dinas Sosial	13.166.000.101,00	10.295.622.597,00	2.870.377.504,00	78,20
7	Dinas Tenaga Kerja	5.947.437.024,00	4.498.471.588,00	1.448.965.436,00	75,64
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	15.285.199.548,00	12.587.826.806,00	2.697.372.742,00	82,35
9	Dinas Ketahanan Pangan,	40.699.243.690,00	29.112.892.421,00	11.586.351.269,00	71,53

No.	OPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
	Tanaman Pangan dan Holtikultura				
10	Dinas LingkunganHidup	26.393.613.984,00	23.621.726.781,00	2.771.887.203,00	89,50
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.363.986.998,00	10.633.269.666,00	730.717.332,00	93,57
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	17.859.057.994,00	15.016.322.560,00	2.842.735.434,00	84,08
13	Dinas Perhubungan	16.690.552.137,00	15.791.877.012,00	898.675.125,00	94,62
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	19.350.606.523,00	18.473.974.385,00	846.068.155,00	95,47
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah, Perindustrian dan Perdagangan	17.823.534.793,00	15.550.917.562,00	2.272.617.231,00	87,25
16	Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu	11.873.576.092,00	11.395.378.896,00	478.197.196,00	95,97
17	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	50.948.133.013,00	46.732.539.697,00	4.215.593.316,00	91,73
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	9.190.104.298,00	8.874.074.658,00	316.029.640,00	96,56
19	Dinas Perikanan dan Kelautan	13.317.459.424,00	12.061.394.361,00	1.256.065.063,00	90,57
20	Dinas Perkebunan dan Peternakan	52.140.442.806,00	25.268.665.268,00	26.871.777.538,00	48,46
21	Sekretariat Daerah	112.236.603.215,00	98.143.687.604,00	14.092.915.611,00	87,44
22	Inspektorat Daerah	19.872.317.023,00	17.741.232.406,00	2.131.084.617,00	89,28
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.867.548.131,00	8.345.751.179,00	521.796.952,00	94,12
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	260.321.192.460,00	245.921.511.051,00	14.399.681.409,00	94,47
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.748.787.082,00	8.855.283.919,00	1.893.503.163,00	82,38
26	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.928.637.785,00	5.651.789.635,00	276.848.150,00	95,33
27	Sekretariat DPRD	76.897.295.824,00	70.536.840.523,00	6.360.455.301,00	91,73
28	Kec. Bunut	5.507.335.780,00	5.051.219.512,00	456.116.268,00	91,72
29	Kec. Pangkalan Lesung	5.686.754.608,00	5.210.099.648,00	476.654.960,00	91,62
30	Kec. Kerumutan	3.814.044.700,00	3.521.115.096,00	292.929.604,00	92,32
31	Kec. Pelalawan	4.448.652.094,00	4.177.803.418,00	270.848.676,00	93,91
32	Kec. Pangkalan Kerinci	10.006.602.078,00	9.324.131.606,00	682.470.472,00	93,18
33	Kec. Bandar Sei Kijang	5.028.475.186,00	4.798.619.313,00	229.855.873,00	95,43
34	Kec. Pangkalan Kuras	5.510.467.433,00	5.363.032.506,00	147.434.927,00	97,32
35	Kec. Kuala Kampar	4.467.950.195,00	4.138.418.585,00	329.531.610,00	92,62
36	Kec. Teluk Meranti	4.957.133.584,00	4.687.817.700,00	269.315.884,00	94,57
37	Kec. Ukui	4.810.694.275,00	4.132.520.317,00	678.173.958,00	85,90
38	Kec. Bandar Petalangan	5.172.605.237,00	5.049.712.131,00	122.893.106,00	97,62

No.	OPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
39	Kec. Langgam	5.808.810.311,00	5.789.775.591,00	19.034.720,00	99,67
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.769.264.887,00	8.857.723.675,00	911.541.212,00	90,67
	JUMLAH	1.916.975.102.815,00	1.695.322.707.784,30	221.652.395.030,70	88,44

Terdapat beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pengelolaan belanja pemerintah daerah pada Tahun 2022, antara lain:

- Terlambatnya pelaksanaan APBD yang disebabkan terlambatnya proses pengadaan barang dan jasa oleh Perangkat Daerah, akibatnya waktu yang tersedia untuk pelaksanaan APBD berkurang dan selanjutnya diikuti dengan faktor alam seperti curah hujan yang cukup tinggi sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan. Akibat lebih lanjut, dana yang ada dan telah dialokasikan untuk suatu kegiatan pembangunan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal;
- Terlambatnya pengesahan perubahan APBD sehingga kegiatan yang dianggarkan di perubahan tidak terlaksana secara maksimal;
- Ketakutan pelaksana kegiatan akan dampak/risiko hukum yang akan ditanggung;
- Faktor eksternal yang sebenarnya dapat dikendalikan yaitu menyangkut kemampuan kontraktor dalam menyelesaikan kontrak perjanjian; dan
- Penggunaan aplikasi baru dari Kementerian Dalam Negeri dalam proses penatausahaan keuangan mengakibatkan agak terlambatnya proses pencairan pengajuan transaksi keuangan.

Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, langkah strategis yang akan diambil adalah:

- Proses Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secepatnya sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan, sehingga dana yang tersedia dapat digunakan seoptimal mungkin untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- Meningkatkan kemampuan aparatur melalui berbagai pendidikan dan pelatihan baik formal maupun informal sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas kinerja Sumber Daya Manusia aparatur; dan

- c. Meningkatkan evaluasi dan pengawasan terhadap kualifikasi dan kemampuan kontraktor sehingga kualitas pemilihan rekanan pelaksana pekerjaan menjadi lebih baik.

c. Pembiayaan

Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran. Pada tahun 2022, APBD Kabupaten Pelalawan mencatat defisit sebesar Rp.107.648.926.638,93, yang ditutup dari penerimaan pembiayaan tahun 2022. Sampai dengan saat ini, Pemerintah Kabupaten Pelalawan belum memandang perlu untuk melakukan pinjaman baik dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini antara lain dengan pertimbangan prinsip kesinambungan antar generasi, dengan kata lain kebijakan pembangunan saat ini jangan sampai menjadi beban daerah pada masa generasi. Adapun anggaran dan realisasi pembiayaan Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2022 adalah dapat dilihat pada Tabel 3.9

Tabel 3.9

TARGET DAN REALISASI PEMBIAYAAN PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2022

No.	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	234.248.742.350,00	234.281.317.349,78	100,01
.1	Penggunaan SilPA	234.248.742.350,00	234.248.742.349,78	100,00
.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
.3	Penerimaan Deviden Tunai	0,00	0,00	0,00
.4	Penerimaan Kembali Pinjaman	0,00	32.575.000,00	0,00
	TOTAL PENERIMAAN PEMBIAYAAN	234.248.742.350,00	234.281.317.349,78	100,01
II	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
3	Pembayaran Pokok Pinjaman	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	234.248.742.350,00	234.281.317.349,78	100,01
III	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	126.632.390.710,85	0,00

Realisasi penerimaan pembiayaan selain berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp.234.281.317.349,78 juga berasal dari penerimaan kembali pinjaman dana bergulir kepada koperasi sebesar Rp.32.575.000,00. Realisasi penerimaan pembiayaan dapat dijelaskan pada Tabel 3.10 berikut:

Tabel 3.10

**REALISASI PENERIMAAN PEMBIAYAAN PEMERINTAH
 KABUPATEN PELALAWANTAHUN 2022**

URAIAN	JUMLAH
Pelampauan Penerimaan PAD	(48.391.366.630,64)
Pajak Daerah	(18.164.402.772,62)
Retribusi Daerah	(20.644.731.262,00)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	(6.489.816.593,00)
Lain-lain PAD yang Sah	(3.092.416.003,02)
Pelampauan Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat	89.110.405.476,00
Bagi Hasil Pajak	41.141.648.263,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	83.618.158.278,00
Dana Alokasi Umum	0,00
Dana Alokasi Khusus	(35.950.377.382,00)
Dana Penyesuaian	0,00
Pelampauan Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah	300.976.317,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah	4.378.220.455,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	(4.077.244.138,00)
Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	752.146.873,00
Pendapatan Hibah	(56.839.480.000,00)
Pelampauan penerimaan lain-lain	57.591.626.873,00
Pelampauan penerimaan pembiayaan	(8.071.000,00)
Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	174.630.253.767,72
Belanja Operasi	124.267.779.639,42
Belanja Pegawai	20.203.716.570,00
Belanja Barang dan Jasa	101.940.515.756,77
Belanja Hibah	1.228.837.312,65
Belanja Bantuan Sosial	894.710.000,00
Belanja Modal	34.376.828.467,30
Belanja Modal Tanah	802.578.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.439.212.852,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.090.573.491,85

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	13.330.654.337,45
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	713.809.786,00
Belanja Tak Terduga	1.708.807.004,00
Belanja Tak Terduga	1.708.807.004,00
Transfer	14.276.838.657,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.435.317.777,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	(8.841.520.880,00)
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00
Sisa Belanja Lainnya	18.155.373.863,70
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	18.155.373.863,70
Sisa Dana DBH DR	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman	32.575.000,00
SILPA	126.632.390.710,85

3.2 Analisis Rasio Laporan Keuangan Keuangan Pemerintah Daerah

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Berdasarkan APBD

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}}$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2011 s/d 2022 dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut:

Tabel 3.11
RASIO KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN APBD

TAHUN	REALISASI PAD (RP)	TOTAL PENDAPATAN (RP)	RASIO
1	2	3	4 = 2/3
2011	46.649.861.645,47	1.134.243.349.087,47	4,11%
2012	55.629.512.175,87	1.312.050.966.193,35	4,24%
2013	71.443.863.741,21	1.338.450.187.270,21	5,34%
2014	86.278.846.807,95	1.485.407.190.108,46	5,81%
2015	109.085.093.812,87	1.311.303.333.835,76	8,32%
2016	107.077.951.960,58	1.404.762.616.079,71	7,62%
2017	181.808.597.388,70	1.465.379.972.442,88	12,41%
2018	136.697.900.750,86	1.469.020.695.865,13	9,31%
2019	155.693.478.613,31	1.701.183.861.075,04	9,15%
2020	145.390.617.242,78	1.475.155.958.200,77	9,86%
2021	159.141.287.665,35	1.594.521.031.700,36	9,98%
2022	191.902.295.863,37	1.597.747.906.880,37	12,01%
Rata – rata	120.566.608.972,36	1.307.892.169.753,26	9,22%

Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian keuangan diatas, kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tahun anggaran 2011 s.d 2022 masih sangat rendah rata-rata 9,22 persen, yaitu Tahun 2011 sebesar 4,11 persen, Tahun 2012 sebesar 4,24 persen, Tahun 2013 sebesar 5,34%, Tahun 2014 sebesar 5,81 persen, Tahun 2015 sebesar 8,32 persen, Tahun 2016 sebesar 7,62 persen, Tahun 2017 sebesar 12,41 persen, Tahun 2018 sebesar 9,31 persen, Tahun 2019 sebesar 9,15 persen, Tahun 2020 sebesar 9,86 persen, Tahun 2021 sebesar 9,98 persen, dan tahun 2022 sebesar 12,01 persen.

Kinerja pengelolaan keuangan Kabupaten Pelalawan pada tahun 2012 rasio kemandirian mengalami kenaikan 0,13 persen dari 4,11 persen pada tahun 2011 menjadi 4,24 persen pada Tahun 2012. Pada tahun 2013 rasio kemandirian mengalami kenaikan 1,10% dari Tahun 2012 sebesar 4,24 persen menjadi 5,34 persen pada tahun 2013. Tahun 2014 rasio kemandirian mengalami kenaikan 0,47 persen dari Tahun 2013 sebesar 5,34 persen menjadi 5,81 persen. Tahun 2015 rasio kemandirian mengalami kenaikan 2,51 persen dari Tahun 2014 sebesar 5,81 persen menjadi 8,32 persen. Tahun 2016 rasio kemandirian

mengalami penurunan 0,70 persen dari Tahun 2015 sebesar 8,32 persen menjadi 7,62 persen, Tahun 2017 rasio kemandirian mengalami kenaikan 4,79 persen dari Tahun 2016 sebesar 7,62 persen menjadi 12,41 persen, tahun 2018 rasio kemandirian mengalami penurunan 3,11 persen dari tahun 2017 sebesar 12,41 persen menjadi 9,30 persen, tahun 2019 rasio kemandirian mengalami penurunan 0,16 persen dari tahun 2018 sebesar 9,31 persen menjadi 9,15 persen, tahun 2020 rasio kemandirian mengalami kenaikan 0,70 persen dari tahun 2019 sebesar 9,15 persen menjadi 9,86 persen, sedangkan tahun 2021 rasio kemandirian mengalami kenaikan 0,12 persen dari tahun 2020 sebesar 9,86 persen menjadi 9,98 persen, serta tahun 2022 rasio kemandirian mengalami kenaikan 2,03 persen dari tahun 2021 sebesar 9,98 persen menjadi 12,01 persen.

b. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100 persen. Namun semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin tinggi.

$$\text{Rasio efektifitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah}}{\text{Target penerimaan PAD yang ditetapkan}}$$

Rasio Rasio Efektivitas Tahun Anggaran 2011 s.d 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.12 berikut:

Tabel 3.12
RASIO EFEKTIVITAS

TAHUN	TARGET PAD (RP)	REALISASI PAD (RP)	RASIO EFEKTIFITAS
-------	-----------------	--------------------	-------------------

1	2	3	4 = 3/2
2011	35.277.033.829,00	46.649.861.645,47	132,24%
2012	39.585.757.585,00	55.629.512.175,87	140,53%
2013	60.993.804.589,00	71.443.863.741,21	117,13%
2014	88.488.486.000,00	86.278.846.807,95	97,50%
2015	115.724.832.488,00	109.085.093.812,87	94,26%
2016	168.086.580.286,00	107.077.951.960,58	63,70%
2017	195.875.870.692,41	181.808.597.388,70	92,82%
2018	133.558.462.607,41	136.697.900.750,86	102,35%
2019	155.158.906.702,15	155.693.478.613,31	100,34%
2020	148.682.087.597,96	145.390.617.242,78	97,79%
2021	196.779.941.464,00	159.142.130.790,35	80,87%
2022	248.871.591.795,00	191.902.295.863,37	77,11%
Rata-rata	132.256.946.302,99	120.566.679.232,78	91,16%

Dari perhitungan rasio efektivitas dapat dilihat bahwa efektivitas rata-rata tahun 2011 s.d 2022 sebesar 91.16 persen. Tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah realisasi PAD dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 20,47 persen, capaian PAD tahun 2022 terealisasi 77,11 persen dari target PAD.

c. Ratio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasional dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasional berarti persentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

1)Rasio Keserasian Belanja:

$$\text{Rasio Belanja Operasional} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}}$$

Tabel 3.13
RASIO BELANJA OPERASIONAL

TAHUN	BELANJA OPERASI (RP)	BELANJA MODAL (RP)	TOTAL BELANJA (RP)	RASIO
1	2	3	4 = 2+3	5 = 2/4
2011	702.010.022.437,08	261.657.345.285,64	963.667.367.722,72	72,85%
2012	825.942.822.343,37	308.829.848.496,87	1.134.772.670.840,24	72,78%
2013	1.048.144.956.622,32	296.763.912.527,94	1.344.908.869.150,26	77,93%
2014	1.033.862.347.574,03	327.477.591.172,28	1.361.339.938.746,31	75,94%
2015	1.081.520.716.608,47	453.584.905.312,88	1.535.105.621.921,35	70,45%
2016	1.033.339.830.691,29	454.684.129.007,32	1.488.023.959.698,61	69,44%
2017	1.001.818.096.949,07	254.665.598.182,60	1.256.483.695.131,67	79,73%
2018	935.160.433.227,32	161.281.235.359,71	1.096.441.668.587,03	85,29%
2019	1.063.405.436.434,15	255.820.334.183,06	1.319.225.770.617,21	80,61%
2020	1.098.877.388.617,61	339.904.096.973,29	1.438.781.485.590,90	76,38%
2021	1.136.411.786.555,98	313.035.735.430,65	1.449.447.521.986,63	78,40%
2022	1.244.814.152.870,30	247.901.212.292,00	1.695.322.707.784,30	73,43%
Rata - rata	1.017.108.999.244,25	306.300.495.352,02	1.340.293.439.814,77	75,89%

Rasio Belanja Modal =

Total Belanja Modal

Total Belanja

Tabel 3.14

RASIO BELANJA MODAL

TAHUN	BELANJA OPERASI (RP)	BELANJA MODAL (RP)	TOTAL BELANJA (RP)	RASIO
1	2	3	4 = 2+3	5 = 3/4
2011	702.010.022.437,08	261.657.345.285,64	963.667.367.722,72	27,15%
2012	825.942.822.343,37	308.829.848.496,87	1.134.772.670.840,24	27,22%
2013	1.048.144.956.622,32	296.763.912.527,94	1.344.908.869.150,26	22,07%
2014	1.033.862.347.574,03	327.477.591.172,28	1.361.339.938.746,31	24,06%
2015	1.081.520.716.608,47	453.584.905.312,88	1.535.105.621.921,35	29,55%
2016	1.033.339.830.691,29	454.684.129.007,32	1.488.023.959.698,61	30,56%
2017	1.001.818.096.949,07	254.665.598.182,60	1.256.483.695.131,67	20,27%
2018	935.160.433.227,32	161.281.235.359,71	1.096.441.668.587,03	14,71%
2019	1.063.405.436.434,15	255.820.334.183,06	1.319.225.770.617,21	19,39%
2020	1.098.877.388.617,61	339.904.096.973,29	1.438.781.485.590,90	23,62%
2021	1.136.411.786.555,98	313.035.735.430,65	1.449.447.521.986,63	21,60%
2022	1.244.814.152.870,30	247.901.212.292,00	1.695.322.707.784,30	14,62%
Rata - rata	1.017.108.999.244,25	306.300.495.352,02	1.340.293.439.814,77	22,85%

Dari rasio diatas diketahui bahwa belanja operasional pemerintahan masih mendominasi jumlah belanja APBD dari tahun

2011 s.d 2022, persentase belanja operasional dibanding total belanja Tahun 2021 menunjukkan penurunan sebesar 4,97 persen dari sebesar 78,40 persen tahun 2021 menjadi sebesar 73,43 persen pada Tahun 2022. Penurunan belanja operasi Tahun 2022 tersebut diiringi dengan penurunan belanja modal terhadap jumlah belanja sebesar 6,98%, dari sebesar 21,60% pada tahun 2021 menjadi 14,62% pada tahun 2022.

2)Rasio Keserasian Belanja per Fungsi

Tabel 3.15

RASIO KESERASIAN BELANJA PER FUNGSI TA 2022

FUNGSI PEMERINTAHAN DAERAH	REALISASI (RP)	RASIO (%)
1	2	3 = (2/Jumlah Belanja)
Pelayanan Umum	542.084.663.629,00	31,98
Ketertiban dan Keamanan	43.647.252.724,00	2,57
Ekonomi	110.624.611.603,00	6,53
Lingkungan Hidup	31.799.466.055,00	1,88
Perumahan dan Fasilitas Umum	196.581.249.746,00	11,60
Kesehatan	202.561.119.860,30	11,95
Pariwisata dan Budaya	23.358.304.769,00	1,38
Pendidikan	499.641.782.074,00	29,47
Perlindungan Sosial	45.024.257.324,00	2,66
Jumlah Belanja	1.695.322.707.784,30	100,00

Dari rasio keserasian belanja per fungsi TA 2022 tersebut terlihat bahwa fungsi pemerintahan daerah yang mendapat prioritas Pemerintahan Kabupaten Pelalawan adalah pelayanan umum, pendidikan serta Kesehatan.

Alokasi anggaran kesehatan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2022 diatas 10 persen dikarenakan adanya prioritas pembangunan Kabupaten Pelalawan saat ini diutamakan adalah memenuhi kebutuhan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, listrik. Kebutuhan infrastruktur di Kabupaten Pelalawan belum semua daerah terpenuhi. Dengan alokasi anggaran yang diberikan pada bidang kesehatan saat ini, pelayanan kesehatan

kepada masyarakat telah optimal yakni dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh penduduk di puskesmas, dan pelayanan kesehatan rujukan gratis bagi lebih kurang 45 persen penduduk.

d. Rasio Pengelolaan Belanja

Rasio pengelolaan belanja menunjukkan bahwa kegiatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah memiliki ekuitas antara periode yang positif, yaitu belanja yang dilakukan tidak lebih besar dari total pendapatan yang diterima pemerintahan daerah. Rasio ini menunjukkan adanya surplus atau defisit anggaran. Surplus atau defisit yaitu selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode laporan.

$$\text{Rasio Pengelolaan Belanja} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Total Belanja}} \times 100$$

Tabel 3.16
RASIO PENGELOLAAN BELANJA

TAHUN	TOTAL PENDAPATAN (RP)	TOTAL BELANJA (RP)	RASIO
1	2	3	4 = 2/3
2011	1.134.243.349.087,47	1.011.938.175.602,72	112,09%
2012	1.312.050.966.193,35	1.147.776.021.252,42	114,31%
2013	1.338.450.187.270,21	1.345.054.743.351,26	99,51%
2014	1.485.407.190.108,46	1.473.927.741.146,31	100,78%
2015	1.311.303.333.835,76	1.684.164.043.497,35	77,86%
2016	1.404.727.616.079,71	1.639.133.494.244,61	85,70%
2017	1.465.379.972.442,88	1.434.664.887.985,67	102,14%
2018	1.469.020.695.865,13	1.279.027.719.741,03	114,85%
2019	1.701.183.861.075,04	1.520.505.690.317,21	111,88%
2020	1.475.175.151.309,77	1.654.090.429.455,90	89,18%
2021	1.594.520.188.575,36	1.639.582.070.034,63	97,25%
2022	1.587.673.781.145,37	1.695.322.707.784,30	93,65%
Rata - rata	1.439.928.024.415,71	1.460.432.310.367,78	98,60%

Rasio pengelolaan belanja tersebut menunjukkan bahwa jumlah belanja tahun 2022 meningkat dan pendapatan mengalami peningkatan

namun Pemerintah Kabupaten Pelalawan untuk tahun 2022 mengalami defisit, sehingga Kabupaten Pelalawan mendanai defisit belanja dari sisa anggaran lebih (SILPA) tahun sebelumnya.

e. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian.

1) Persentase Pertumbuhan PAD

$$\text{Persentase pertumbuhan} = \frac{\text{PAD tahun p} - \text{PAD tahun p-1}}{\text{PAD tahun p-1}} \times 100$$

Tabel 3.17

RASIO PERSENTASE PERTUMBUHAN PAD

TAHUN	PAD TAHUN P-1 (RP)	PAD TAHUN P (RP)	RASIO
1	2	3	4 = (3-2) / 2
2011	38.382.025.593,18	46.649.861.645,47	21,54%
2012	46.649.861.645,47	55.629.512.175,87	19,25%
2013	55.629.512.175,87	71.443.863.741,21	28,43%
2014	71.443.863.741,21	86.278.846.807,95	20,76%
2015	86.278.846.807,95	109.085.093.812,87	26,43%
2016	109.085.093.812,87	107.077.951.960,58	-1,84%
2017	107.077.951.960,58	181.808.597.388,70	69,79%
2018	181.808.597.388,70	136.697.900.750,86	-24,81%
2019	136.697.900.750,86	155.693.478.613,31	13,91%
2020	155.693.478.613,31	145.390.308.154,78	-6,63%
2021	145.390.308.154,78	159.142.130.790.35	9,46%
2022	159.142.130.790,35	191.902.295.863,37	20,59%
Rata - rata	107.773.297.619,59	120.566.653.475,44	11,87%

2) Persentase Pertumbuhan Total Pendapatan

$$\text{Persentase Pertumbuhan} = \frac{\text{Pendapatan tahun p} - \text{Pendapatan tahun p-1}}{\text{Pendapatan tahun p-1}} \times 100$$

Tabel 3.18

RASIO PERSENTASE PERTUMBUHAN TOTAL PENDAPATAN

TAHUN	PENDAPATAN TAHUN P-1 (RP)	PENDAPATAN TAHUN P (RP)	RASIO
1	2	3	4 = (3-2) / 2
2011	847.618.876.825,18	1.134.243.349.087,47	33,82%
2012	1.134.243.349.087,47	1.312.050.966.193,35	15,68%
2013	1.312.050.966.193,35	1.338.450.187.270,21	2,01%
2014	1.338.450.187.270,21	1.485.407.190.108,46	10,98%
2015	1.485.407.190.108,46	1.311.303.333.835,76	-11,72%
2016	1.311.303.333.835,76	1.404.762.616.079,71	7,13%
2017	1.404.762.616.079,71	1.465.379.972.442,88	4,32%
2018	1.465.379.972.442,88	1.469.020.695.865,13	0,25%
2019	1.469.020.687.452,13	1.701.183.861.075,04	15,80%
2020	1.701.183.861.075,04	1.475.175.151.309,77	-13,29%
2021	1.475.175.151.309,77	1.594.521.031.700,36	8,09%
2022	1.594.521.031.700,36	1.587.673.781.145,37	-0,43%
Rata - rata	1.378.259.768.615,03	1.439.931.011.342,79	4,47%

Dari perhitungan diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan pendapatan Kabupaten Pelalawan pada TA 2022 menunjukkan penurunan. Penurunan pendapatan Kabupaten Pelalawan pada tahun 2022 sebesar negatif 0,43 persen mengalami penurunan jika dibandingkan pertumbuhan tahun 2021 sebesar 8,09 persen. Pertumbuhan PAD tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 11,13 persen jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 9,46 persen. Hal tersebut disebabkan karena realisasi pos-pos PAD yakni Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

3) Persentase Pertumbuhan Belanja Operasional

Persentase Pertumbuhan
=
Belanja Operasi p – Belanja Operasi tahun p-1
X 100

Tabel 3.19

RASIO PERSENTASE PERTUMBUHAN BELANJA OPERASIONAL

TAHUN	BELANJA OPERASI TAHUN P-1 (RP)	BELANJA OPERASI TAHUN P (RP)	RASIO
1	2	3	4 = (3-2) / 2
2011	568.423.610.661,40	702.010.022.437,08	23,50%
2012	702.010.022.437,08	825.942.822.343,37	17,65%
2013	825.942.822.343,37	1.048.144.956.622,32	26,86%
2014	1.048.144.956.622,32	1.033.862.347.574,03	-1,36%
2015	1.033.862.347.574,03	1.081.520.716.608,47	4,68%
2016	1.081.520.716.608,47	1.033.339.830.691,29	-4,45%
2017	1.033.339.830.691,29	1.001.818.096.949,07	-3,05%
2018	1.001.818.096.949,07	935.160.433.227,32	-6,65%
2019	935.160.433.227,32	1.063.405.436.434,15	13,71%
2020	1.063.405.436.434,15	1.098.877.388.617,61	3,34%
2021	1.098.877.388.617,61	1.136.411.786.555,98	3,42%
2022	1.136.411.786.555,98	1.244.814.152.870,30	9,54%
Rata - rata	960.743.120.726,84	1.017.108.999.244,25	5,87%

4) Persentase Pertumbuhan Belanja Modal

Persentase Pertumbuhan = $\frac{\text{Belanja Modal p} - \text{Belanja Modal tahun p-1}}{\text{Belanja Modal tahun p-1}} \times 100$

Tabel 3.20

RASIO PERSENTASE PERTUMBUHAN BELANJA MODAL

TAHUN	BELANJA MODAL TAHUN P-1 (RP)	BELANJA MODAL TAHUN P (RP)	RASIO
1	2	3	4 = (3-2) / 2
2010	302.294.499.982,80	147.878.455.924,18	-51,08%
2011	147.878.455.924,18	261.657.345.285,64	76,94%
2012	261.657.345.285,64	308.829.848.496,87	18,03%
2013	308.829.848.496,87	296.763.912.527,94	-3,91%
2014	296.763.912.527,94	327.477.591.172,28	10,35%
2015	327.477.591.172,28	453.584.905.312,88	38,51%
2016	453.584.905.312,88	454.684.129.007,32	0,24%
2017	454.684.129.007,32	254.665.598.182,60	-43,99%
2018	254.665.598.182,60	161.281.235.359,71	-36,67%
2019	161.281.235.359,71	255.820.334.183,06	58,62%
2020	255.820.334.183,06	339.904.096.973,29	32,87%
2021	339.904.096.973,29	313.035.735.430,65	-7,90%
2022	313.035.735.430,65	247.901.212.292,00	-20,81%

TAHUN	BELANJA MODAL TAHUN P-1 (RP)	BELANJA MODAL TAHUN P (RP)	RASIO
Rata – rata	298.298.283.679,94	294.114.184.626,80	- 1,40%

Belanja Kabupaten Pelalawan yaitu belanja operasi tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 9,54 persen dibandingkan tahun 2021 sebesar 3,42 persen. Belanja modal Kabupaten Pelalawan tahun 2022 mengalami penurunan menjadi negatif 20,81 persen dibandingkan tahun 2021 sebesar negatif 7,90 persen. Rata-rata rasio pertumbuhan belanja operasional tahun 2011 s/d 2022 sebesar 5,87 persen. Rata-rata rasio pertumbuhan Belanja Modal tahun 2011 s/d 2021 sebesar negatif 1,40 persen.

Dari analisa rasio pertumbuhan di atas kinerja pengelolaan keuangan Kabupaten Pelalawan mengalami peningkatan pada Tahun 2022, hal ini disebabkan kondisi pandemi Covid 19 yang sudah mulai mereda yang membuat sektor-sektor ekonomi di masyarakat bisa bergerak, dan Pendapatan Asli Daerah bisa di optimalkan lagi.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Pelalawan adalah merupakan perwujudan suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan visi, misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran secara periodic (berdasarkan tahun anggaran) atau bisa juga dikatakan bahwa Laporan Kinerja merupakan perwujudan akuntabilitas seseorang atau pimpinan kolektif Lembaga/ Instansi kepada pihak-pihak yang memberikan mandat.

A. KESIMPULAN

- 1) Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam melaksanakan amanahnya berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/ Perubahan Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Perjanjian Kinerja Bupati Pelalawan Tahun 2022.
- 2) Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2022 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan pada tahun anggaran 2022. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Sasaran, maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
- 3) Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan memberikan gambaran bahwa keberhasilan secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara

B. PERMASALAHAN

Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan adalah:

- 1) Sebagian besar instansi Pemerintah Kabupaten Pelalawan sudah memahami cara penyusunan Laporan Kinerja, karena keterbatasan waktu dan kurangnya penyampaian data oleh Perangkat Daerah menghambat pengumpulan data dan penyusunan menjadi terlambat.
- 2) Belum adanya standar yang valid dan akurat sebagai acuan kinerja kegiatan kegiatan dan sasaran-sasaran yang dilaksanakan mengakibatkan indikator kinerja dan satuan pengukurannya sering kali bias dan sulit ditelusuri, antara lain satuan pengukuran kinerja outcome masih menggunakan persentase sehingga data tersebut akan tergantung dengan data lain dan sifat (uncontrollable) yang tentunya indikator kinerjanya yang bias dan semu.

C. SARAN

- 1) Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk memperteguh pelaksanaan pembangunan sehingga tidak hanya menjadi wacana dan pergulatan pemikiran semata-mata, namun benar-benar dapat diaplikasikan dalam penyelenggaraan system pemerintahan yang baik.
- 2) Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan akan ditingkatkan untuk secara pro-aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
- 4) Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan satuan kerja perangkat daerah dan dunia usaha

- 5) Agar implementasi Sistem AKIP benar-benar efektif, perlu segera direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan out put maupun outcomes kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergitas tersebut, kinerja organisasi dari setiap satuan kerja perangkat daerah yang dibiayai oleh APBD benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.
- 6) Menjadikan SAKIP sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel, dengan menerapkan fungsi reward and punishment yang tegas dan ketat.

Segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Pelalawan mengharapkan laporan Kinerja (Lkj) tahun 2022 ini dapat memenuhi kewajiban pelaporan akuntabilitas sebagaimana yang telah ditetapkan serta sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan yang berguna dalam upaya perbaikan dan peningkatan kinerja selanjutnya.

PENGUKURAN KINERJA SASARAN TAHUN 2022
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN		%	OPD
							PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	72,71	72,94	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	277,958,765,399	274,038,759,583	98.59	
						Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	270,279,600	177,602,000	65.71	
2	Terwujudnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Kesenjangan Gender	Indeks Pendidikan	62,79	64,29	102.39	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	270,434,444,999	266,759,899,544	98.64	
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	186,994,936	176,240,000	94.25	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	183,071,480	181,784,080	99.30	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	837,021,480	836,439,901	99.93	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	623,302,932	612,695,250	98.30	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5,032,663,972	4,928,485,932	97.93	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	390,986,000	365,612,876	93.51	
						PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	215,269,441,526	205,452,899,217	95.44	
						Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	132,510,214,826	128,266,995,838	96.80	
						Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	69,026,517,745	64,693,218,441	93.72	
						Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	10,383,835,405	9,462,242,457	91.12	
						Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3,348,873,550	3,030,442,481	90.49	
						PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1,124,531,640	987,100,750	87.78	Sekretariat Daerah
						Fasilitasi Kerjasama Daerah	984,574,136	876,816,746	89.06	
						Cakupan Pelayanan Administrasi (dengan Satuan %)	139,957,504	110,284,004	78.80	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	89,15	88,94	99.76	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1,760,558,652	1,703,747,154	96.77	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
						Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,245,565,590	1,215,186,502	97.56	
						Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	514,993,062	488,560,652	94.87	
		Indeks Pembangunan Gender	60	70,98	118.30	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	133,414,640	129,991,255	97.43	DP3AP2KB
						Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	88,360,560	85,037,175	96.24	
						Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	45,054,080	44,954,080	99.78	
						PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	215,619,120	174,246,350	80.81	

3	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Indeks Kesehatan	79,11	89,41	113.02	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	139,048,400	121,425,630	87.33	Dinas Kesehatan
						Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	35,000,000	15,750,000	45.00	
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	41,570,720	37,070,720	89.18	
						PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	18,765,060	17,265,060	92.01	
						Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat DaerahKabupaten/Kota	18,765,060	17,265,060	92.01	
						PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	70,103,892,497	52,073,423,118	74.28	
						Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	27,881,834,622	23,704,391,924	85.02	
						Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40,905,324,387	27,214,150,966	66.53	
						Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	570,174,200	485,945,500	85.23	
						Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80,238,128	71,218,128	88.76	
						Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	66,640,000	55,405,000	83.14	
						Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	599,681,160	542,311,600	90.43	
						PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	183,961,538	169,305,678	92.03	
						Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	23,030,000	21,690,000	94.18	
						Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	25,845,000	24,270,000	93.91	
						Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	74,899,968	74,899,968	100.00	
						Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	22,410,710	22,410,710	100.00	
						Pemeriksaan dan Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	37,775,860	26,035,000	68.92	
4	Terwujudnya Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga yang Kompetitif dan Berdaya Saing	Kategori Kabupaten Layak Pemuda	Pratama	-	-	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	6,616,328,320	6,109,947,359	92.35	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
						Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	6,516,328,320	6,009,947,359	92.23	

						Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000	100,000,000	100.00	
						PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	24,616,742,121	22,887,658,940	92.98	
						Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	18,309,872,556	17,598,183,995	96.11	
						Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,725,155,045	1,172,935,445	67.99	
						Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	408,767,640	272,931,500	66.77	
						Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	3,040,000,000	3,000,000,000	98.68	
						Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Kreasi	1,132,946,880	843,608,000	74.46	
5	Meningkatnya Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat	Peningkatan Indeks Kerukunan Umat Beragama	0,5	0,5	100	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	38,228,834,544	20,529,356,569	53.70	Sekretariat Daerah
						Administrasi Tata Pemerintahan	984,574,136	876,816,746	89.06	
6	Terwujudnya Masyarakat yang Agamis dan Berakhlak Mulia	Tingkat Pertumbuhan Rasio Keterisian Rumah Ibadah	2,5	2,5	100	Fasilitasi Kerjasama Daerah	139,957,504	110,284,004	78.80	
						Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	35,787,545,760	18,262,949,255	51.03	
						Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1,316,757,144	1,279,306,564	97.16	
7	Meningkatnya Petumbuhan Ekonomi Mandiri dan Berdaya Saing	Laju Pertumbuhan Ekonomi	2,83	4,39	155.12	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	7,717,003,290	6,825,728,476	88.45	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman
						Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1,529,110,800	1,277,787,700	83.56	
8	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah serta Pengembagan Desa Mandiri	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,49	3,12	69.49	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewana, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	6,187,892,490	5,547,940,776	89.66	
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3,376,253,417	3,090,477,377	91.54	
						Pengembangan Prasarana Pertanian	63,800,000	63,800,000	100.00	
						Pembangunan Prasarana Pertanian	3,312,453,417	3,026,677,377	91.37	
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	30,752,076,552	8,094,968,261	26.32	Dinas Perkebunan
						Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	20,303,315,304	2,539,830,554	12.51	
						Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	5,658,427,248	4,281,041,487	75.66	
						Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	174,766,600	170,820,520	97.74	
						Penyediaan Benih Bibit/Ternak dan Hijauan Pakakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	4,615,567,400	1,103,275,700	23.90	
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	6,575,246,680	3,936,021,829	59.86	

9	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	2	7	350	Pengembangan Prasarana Pertanian	4,411,234,304	2,235,532,883	50.68	Dinas Perikanan
						Pembangunan Prasarana Pertanian	919,745,856	733,480,600	79.75	
						Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	1,244,266,520	967,008,346	77.72	
						PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	4,318,200,889	3,875,501,914	89.75	
						Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	65,089,196	47,225,080	72.55	
						Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	4,253,111,693	3,828,276,834	90.01	
						PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	482,602,144	477,056,740	98.85	
						Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	20,951,120	20,466,120	97.69	
						Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	190,033,588	187,087,888	98.45	
						Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	271,617,436	269,502,732	99.22	
		LPE Kategori Industri Pengolahan	2.63	4.71	179.09	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	3,614,796,748	2,796,076,620	77.35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
						Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3,614,796,748	2,796,076,620	77.35	
						PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	6,059,560,112	5,218,634,925	86.12	
						Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	6,059,560,112	5,218,634,925	86.12	
						PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1,512,683,710	1,180,679,421	78.05	
						Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku	1,512,683,710	1,180,679,421	78.05	
						PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2,219,930,263	1,360,884,702	61.30	
						Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	2,219,930,263	1,360,884,702	61.30	
						PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2,163,990,992	2,043,185,534	94.42	
						Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	2,163,990,992	2,043,185,534	94.42	
						PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN	68,654,400	62,878,900	91.59	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
						Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	68,654,400	62,878,900	91.59	
						PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2,595,626,792	2,246,670,288	86.56	

10	Meningkatnya Kualitas Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	6.5	8.4	129.23	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2,555,340,428	2,212,404,788	86.58	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
						Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	40,286,364	34,265,500	85.05	
						PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	219,198,400	206,529,150	94.22	
						Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	119,288,400	107,579,900	90.18	
						Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	99,910,000	98,949,250	99.04	
						PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	684,660,584	626,432,650	91.50	
						Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	684,660,584	626,432,650	91.50	
						PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	964,559,580	903,267,043	93.65	
						Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan	964,559,580	903,267,043	93.65	
						PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	511,839,000	356,647,150	69.68	
11	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	8.23	8.97	108.99	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	511,839,000	356,647,150	69.68	Dinas Tenaga Kerja
12	Meningkatnya Kesempatan Kerja bagi Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	5.33	2.73	51.22	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	93,711,478	91,112,223	97.23	
						Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	58,716,000	56,117,000	95.57	
						Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	34,995,478	34,995,223	100.00	
						PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1,831,157,984	586,513,624	32.03	
						Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	41,954,208	40,984,848	97.69	
						Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	1,789,203,776	545,528,776	30.49	
						PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL	1,268,665,284	1,043,598,051	82.26	
						Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	83,817,500	52,855,000	63.06	
13	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Indeks Gini	0.005	0.012	240	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1,184,847,784	990,743,051	83.62	
						PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3,485,125,224	1,180,715,010	33.88	
						Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	3,339,935,224	1,077,145,010	32.25	
						Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	145,190,000	103,570,000	71.33	
						PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	427,533,808	418,336,712	97.85	
						Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	409,258,890	400,762,442	97.92	

						Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	18,274,918	17,574,270	96.17	
						PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	798,331,813	606,411,900	75.96	Sekretariat Daerah
						Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	596,466,813	415,479,100	69.66	
						Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	201,865,000	190,932,800	94.58	
14	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrasutruktur Wilayah yang Berkelanjutan	Peningkatan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	1.5	1.5	100	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	105,013,170,201	96,764,786,748	92.15	Dinas Pekerja
						Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	105,013,170,201	96,764,786,748	92.15	Umum dan Dinas Perhubungan
						PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	4,746,556,524	4,497,807,820	94.76	
15	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Infrastruktur Dasar kepada Masyarakat	Peningkatan Indeks Konektivitas Wilayah	2.5	2.5	100	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2,844,806,896	2,801,400,618	98.47	
						Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	38,064,000	32,640,000	85.75	
						Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	654,078,488	638,199,422	97.57	
						Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1,065,665,400	885,291,000	83.07	
						Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/KotaPersetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	22,089,000	21,119,680	95.61	
						Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	121,852,740	119,157,100	97.79	
						PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	4,136,958,368	3,889,353,534	94.01	
						Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	69,057,760	66,235,860	95.91	
						Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang	35,256,000	25,260,000	71.65	
						Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Bersewaan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	34,246,000	28,746,000	83.94	
						Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha				
						Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	449,619,384	410,138,200	91.22	
						Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	1,123,226,080	1,113,153,180	99.10	
						Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	2,425,553,144	2,245,820,294	92.59	
						PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	6,459,492,105	6,255,932,303	96.85	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6,459,492,105	6,255,932,303	96.85	
		Rasio Permukiman Layak Huni	78.82	81.32	103.17	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	7,798,919,994	6,599,143,718	84.62	Dinas Pekerjaan Umum dan

16	Meningkatnya Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65.96	69.2	104.91	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	7,798,919,994	6,599,143,718	84.62	Umum dan Penataan Ruang
						PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	33,628,216,395	26,182,921,504	77.86	
						Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	33,628,216,395	26,182,921,504	77.86	
						PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAHPROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3,882,229,160	3,830,844,200	98.68	
						Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	3,882,229,160	3,830,844,200	98.68	
						PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	19,716,960,223	17,621,890,440	89.37	
						Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	19,716,960,223	17,621,890,440	89.37	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	868,665,892	475,687,788	54.76	
						Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	161,333,364	50,392,000	31.23	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	373,677,552	247,511,788	66.24	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	333,654,976	177,784,000	53.28	
						PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	37,631,036,885	6,046,521,288	16.07	Dinas Lingkungan
						Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	37,631,036,885	6,046,521,288	16.07	
						PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	87,123,800	26,564,960	30.49	
						Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	87,123,800	26,564,960	30.49	
						PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	13,375,297,934	12,686,803,852	94.85	
						Pengelolaan Sampah	13,375,297,934	12,686,803,852	94.85	
						PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	494,862,890	488,515,774	98.72	
						Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	292,053,760	287,257,024	98.36	
						Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	202,809,130	201,258,750	99.24	
						PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	497,891,940	426,355,840	85.63	
						Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	256,681,840	241,871,840	94.23	
						Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	119,890,100	69,484,000	57.96	
						Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	121,320,000	115,000,000	94.79	

17	Meningkatnya Pariwisata Daerah melalui Pemajuan Budaya Melayu	LPE Sektor Pariwisata	2	13.43	671.5	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	5,498,871,290	5,229,576,406	95.10	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Keperguruan Tinggi dan Olahraga
18	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Wisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (Pajak Restoran, Hiburan, Hotel, Retribusi Objek Wisata) (Rp. Juta)	9.344	10.341	110.67	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	225,292,000	171,105,940.0	75.95	
						Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5,253,499,290	5,051,895,466	96.16	
						Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	20,080,000	6,575,000	32.74	
						PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	2,560,109,440	2,192,962,266	85.66	
19	Meningkatnya Kualitas Masyarakat yang Berbudaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	0.580	0.600	103.45	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2,560,109,440	2,192,962,266	85.66	Dinas Pendidikan
						PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	4,691,685,885	4,611,049,059	98.28	
						Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	415,954,000	388,477,379	93.39	
						Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	940,240,960	931,358,420	99.06	
						Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3,335,490,925	3,291,213,260	98.67	
20	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	50.00	56.65	113.3	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	1,216,032,892	1,206,492,942	99.22	BAPPEDA
						Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,216,032,892	1,206,492,942	99.22	
						PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	782,186,220	700,865,539	89.60	
						Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	579,659,280	527,762,439	91.05	
						Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan DaerahAnalisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan DaerahAnalisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	35,265,720	33,485,100	94.95	
21	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	50.00	56.65	113.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan DaerahPengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	167,261,220	139,618,000	83.47	BKPSDM
						PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	357,555,940	315,207,320	88.16	
						Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	189,712,000	166,817,553	87.93	
						Koordinasi Perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	167,843,940	148,389,767	88.41	
						PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3,609,375,487	2,747,667,498	76.13	
21	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	50.00	56.65	113.3	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1,126,523,200	879,415,524	78.06	BKPSDM
						Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Mutasi dan Promosi ASN	532,513,976	409,699,525	76.94	
						Pengembangan Kompetensi ASN	803,442,207	460,846,124	57.36	
						Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1,146,896,104	997,706,325	86.99	

							PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1,404,545,280	699,167,012	49.78	
							Pengembangan Kompetensi Teknis	7,730,000	4,710,000	60.93	
							Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1,396,815,280	694,457,012	49.72	
							PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	375,995,180	359,077,020	95.50	Dinas Kearsipan dan perpustakaan
							Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	69,299,780	69,299,780	100.00	
							Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	229,407,336	222,383,936	96.94	
							Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	77,288,064	67,393,304	87.20	
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19,819,642,420	18,359,199,777	92.63	Sekretariat Daerah
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64,771,516	56,784,696	87.67	
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18,414,746,512	17,029,854,002	92.48	
							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	59,803,192	56,928,832	95.19	
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27,512,000	21,080,000	76.62	
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,252,809,200	1,194,552,247	95.35	
							PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1,412,485,200	1,371,576,116	97.10	Balitbang
							Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	429,686,400	415,819,837	96.77	
							Pengembangan Inovasi dan Teknologi	982,798,800	955,756,279	97.25	
							PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2,718,003,354	2,419,136,350	89.00	BPKAD
							Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	2,718,003,354	2,419,136,350	89.00	
							PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	212,908,064,915	206,523,757,490	97.00	
							Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2,165,156,528	1,838,900,331	84.93	
							Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1,068,025,511	1,050,594,077	98.37	
							Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	788,752,887	751,580,559	95.29	
							Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	208,605,469,489	202,708,208,622	97.17	
							Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	280,660,500	174,473,901	62.17	
							PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2,112,826,542	2,053,060,595	97.17	
							Pengelolaan Barang Milik Daerah	2,112,826,542	2,053,060,595	97.17	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	5,178,057,108	4,073,249,996	78.66	Inspektorat Kab. Pelalawan
							Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1,245,592,120	789,490,390	63.38	
							Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	3,932,464,988	3,283,759,606	83.50	
							PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	272,716,560	181,394,200	66.51	
							Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	13,860,000	11,435,000	82.50	

22	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Publik	91	81,74	89.82	Pendampingan dan Asistensi	258,856,560	169,959,200	65.66	Dinas Komunikasi dan Informatika
						PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	742,419,208	712,814,660	96.01	
						Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	742,419,208	712,814,660	96.01	
						PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	4,752,925,244	4,683,752,984	98.54	
						Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup	2,796,420,660	2,783,037,265	99.52	
						Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1,956,504,584	1,900,715,719	97.15	
						PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5,082,790,184	4,947,738,023	97.34	Satuan Polisi Pamong Praja
						Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4,190,280,184	4,077,204,334	97.30	
						Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	591,560,000	570,090,000	96.37	
						Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	300,950,000	300,443,689	99.83	
						PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1,026,911,600	925,714,520	90.15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Pelayanan Pendaftaran Penduduk	130,310,000	122,144,800	93.73	
						Penataan Pendaftaran Penduduk	896,601,600	803,569,720	89.62	
						PROGRAM PENCATATAN SIPIL	176,919,740	153,426,720	86.72	
						Pelayanan Pencatatan Sipil	14,996,500	14,771,720	98.50	
						Penyelenggaraan Pencatatan Sipi	103,540,000	86,380,000	83.43	
						Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	58,383,240	52,275,000	89.54	
						PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	64,773,000	49,580,000	76.54	
						Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	64,773,000	49,580,000	76.54	
							1,233,074,539,201	1,081,811,625,795	87.73	
		TOTAL								

RENCANA AKSI PERUBAHAN TAHUN 2022
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]